



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW Nasional adalah dokumen Tata Ruang Wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah dokumen Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Banjar adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Banjar adalah dokumen Tata Ruang Wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Kota Banjar adalah dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Kota Banjar untuk 4 (empat) periode per 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.
16. Misi yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.
17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
19. Arah kebijakan transformasi adalah strategi perubahan yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan.
20. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.
21. Sasaran Pokok adalah penjabaran kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan.
22. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
23. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 20 Tahun yang terbagi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

26. Kegiatan Pembangunan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
27. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian.
29. Indikator Utama adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian pembangunan berupa kinerja sasaran pokok dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Karakteristik Daerah/wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis, luas wilayah, sosial ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman antara lain:
 - a. penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJPD, antara lain untuk:
 - a. menetapkan visi dan misi Daerah;
 - b. menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah;
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota, serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan Antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka panjang. Penyajian analisis menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis.
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
Memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN
Memuat Arah Kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Sedangkan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI : PENUTUP

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Daerah; dan
 - c. kesesuaian antara capaian hasil pembangunan Daerah dengan indikator utama pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA BANJAR,

TTD

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(5/207/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjar untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

C. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan

RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan :

- a. *teknokratik*, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *partisipatif*, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. *politis*, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. *atas-bawah dan bawah-atas*, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diterapkan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kota/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- e. *holistik-tematik*, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- f. *integratif*, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- g. *spasial*, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

E. Tahapan

Tahapan penyusunan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. konsultasi rancangan awal;
- d. penyusunan rancangan;
- e. pelaksanaan musrenbang;
- f. perumusan rancangan akhir;
- g. rewiu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
- i. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- j. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
- k. penetapan Peraturan Daerah.

F. Muatan

Muatan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;

- e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 87



PEMERINTAH
KOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2024

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BANJAR TAHUN 2025-2045



BAPPELITBANGDA
Kota Banjar



www.bappelitbangda.banjarkota.go.id



0265-745270



bappeda@banjarkota.go.id



Jl. Batulawang No.26 Kota Banjar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar 2025-2045 dapat kami susun sesuai jadwal melalui amanat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 25 Tahun 2004, Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 serta instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan 20 tahun dengan periode tahun 2025-2045.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan hasil penggabungan dan penyelarasan antara kebijakan pembangunan tingkat nasional dan berbagai kebijakan sektoral, sehingga proses penyusunan RPJPD dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan RPJPD Provinsi serta RPJP Nasional.

Evaluasi hasil RPJPD sebelumnya menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan serta rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi RPJPD periode sebelumnya, serta mempertimbangkan dokumen lingkungan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menangani kebijakan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, serta memperhitungkan aspek pembangunan berkelanjutan (SDG's) dan isu lingkungan strategis. Selain itu, RPJPD juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman untuk arah pengembangan wilayah, dan penyusunan RPJPD dilakukan bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan atau revisi RTRW.



Diharapkan dokumen RPJPD 2025-2045 ini menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi dan Program Pembangunan bagi Calon Kepala Daerah serta penyusunan RPJMD Kota Banjar ke depan, dimana arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditentukan pertahapan dapat dilaksanakan guna mewujudkan visi RPJPD Kota Banjar Tahun 2045 menjadi “Kota Banjar yang Madani, Maju dan Berkelanjutan”.

Terima kasih Kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045.

Banjar, Oktober 2024
PJ WALI KOTA BANJAR

Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si.,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-7
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Geografi.....	II-1
2.1.1.1 Posisi Strategis Kota Banjar.....	II-2
2.1.1.2 Penggunaan Lahan	II-13
2.1.1.3 Lingkungan Hidup.....	II-15
2.1.1.4 Kebencanaan	II-16
2.1.1.5 Ketahanan Daerah.....	II-17
2.1.1.6 Ketahanan Pangan.....	II-19
2.1.1.7 Ketahanan Energi.....	II-21
2.1.1.8 Ketahanan Air	II-22
2.1.2 Demografi	II-23
2.1.2.1 Pertumbuhan Penduduk.....	II-24
2.1.2.2 Kepadatan Penduduk	II-25
2.1.2.3 Jumlah dan Sebaran	II-28
2.1.2.4 Komposisi Penduduk	II-29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-32



2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	II-32
2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-34
2.2.1.3 Indeks Gini	II-36
2.2.1.4 Angka Kemiskinan	II-38
2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-40
2.2.1.6 Nilai Tukar Petani (NTP)	II-41
2.2.1.7 Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	II-43
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-44
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat	II-45
2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga	II-47
2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak	II-48
2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender	II-49
2.2.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender	II-51
2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender	II-53
2.2.2.7 Indeks Pembangunan Pemuda	II-55
2.2.2.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-56
2.3 Aspek Daya Saing	II-57
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-57
2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-58
2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	II-59
2.3.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	II-61
2.3.1.4 Indeks Ekonomi Hijau	II-63
2.3.1.5 Rasio Kewirausahaan	II-64
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-64
2.3.2.1 Indeks Pendidikan	II-64
2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-65
2.3.2.3 Indeks Literasi Digital	II-67
2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-67
2.3.2.5 Angka Ketergantungan	II-68
2.3.2.6 Indeks Pengeluaran	II-69
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-71



2.3.3.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan	
Infrastruktur	II-71
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-71
2.3.4.1 Indeks Demokrasi.....	II-72
2.3.4.2 Indeks Rasa Aman.....	II-72
2.3.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban.....	II-72
2.3.4.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-73
2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah.....	II-73
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-73
2.4.1 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan.....	II-74
2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	II-74
2.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik.....	II-75
2.4.1.3 Indeks Inovasi Daerah	II-76
2.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-76
2.5 Evaluasi RPJPD Tahum 2005-2025	II-77
2.5.1 Capaian Pembangunan Periode I (2005-2008).....	II-78
2.5.2 Capaian Pembangunan Periode II (2009-2013).....	II-80
2.5.3 Capaian Pembangunan Periode III (2014-2018).....	II-81
2.5.4 Capaian Pembangunan Periode IV (2019-2023).....	II-83
2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan	
Publik	II-85
2.6.1 Proyeksi Demografi	II-85
2.6.2 Proyeksi Sarana Prasarana	II-91
2.6.2.1 Rumah	II-91
2.6.2.2 Air Bersih	II-92
2.6.2.3 Energi/listrik.....	II-94
2.6.2.4 Persampahan.....	II-96
2.6.2.5 Sarana Kesehatan.....	II-98
2.6.2.6 Sarana Pendidikan	II-99
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan	
Kewilayahan	II-101
2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan	



Kewilayahan Nasional.....	II-101
2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayan	
Provinsi Jawa Barat.....	II-127
2.7.3 Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW	
Kota Banjar	II-129
2.7.4 Proyek/Kegiatan Strategis	II-135
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Permasalahan.....	III-1
3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	III-1
3.1.1.1 Geografi	III-1
3.1.1.2 Demografi	III-2
3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-3
3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	III-3
3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	III-5
3.1.3 Aspek Daya Saing	III-5
3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi.....	III-5
3.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	III-6
3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur	III-6
3.1.3.4 Daya Saing Investasi.....	III-7
3.1.4 Aspek Pelayanan Umum	III-7
3.1.4.1 Tata Kelola Pemerintahan	III-7
3.1.5 Permasalahan Pembangunan Daerah	III-8
3.2 Isu Strategis	III-27
3.2.1 Isu Strategis Global	III-27
3.2.2 Isu Strategis Nasional	III-37
3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat.....	III-46
3.2.4 Identifikasi Permasalahan dan	
Isu Strategis Kota Banjar.....	III-49
3.2.4.1 Hasil Penjaringan Isu.....	III-49
3.2.4.2 Isu TPB Berdasarkan Capaian TPB	III-51
3.2.4.3 Isu TPB Berdasarkan Muatan Lingkungan Hidup	III-52



3.2.4.4 Isu TPB Berdasarkan Dokumen Perencanaan	III-53
3.2.4.5 Isu TPB Berdasarkan Hasil Kuesioner	III-54
3.2.4.6 Isu TPB Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	III-54
3.2.5 Pengelompokan Isu Strategis Kota Banjar	III-55
BAB IV VISI DAN MISI	IV-1
4.1 Visi	IV-1
4.1.1 Visi Negara	IV-1
4.1.2 Visi Indonesia Emas 2024	IV-2
4.1.3 Visi Jawa Barat 2045	IV-4
4.1.4 Visi Kota Banjar 2045	IV-8
4.2 Misi	IV-14
4.2.1 Misi Pembangunan Nasional 2045	IV-14
4.2.2 Misi Pembangunan Jawa Barat 2045	IV-16
4.2.3 Misi Pembangunan Kota Banjar 2045	IV-20
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1 Arah Kebijakan	V-1
5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan	V-1
5.1.2 Upaya Trasformatif	V-12
5.2 Sasaran Pokok	V-13
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah	V-13
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi	V-18
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan	V-55
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2 Pembiayaan	VI-3
6.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko	VI-5



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Topografi Kota Banjar	II-4
Tabel 2.2 Morfologi Kota Banjar	II-5
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng Kota Banjar.....	II-6
Tabel 2.4 Intensitas Hujan Kota Banjar Tahun 2022	II-8
Tabel 2.5 Sistem DAS Kota Banjar	II-10
Tabel 2.6 Hidrogeologi Kota Banjar.....	II-10
Tabel 2.7 Jenis Tanah Kota Banjar.....	II-11
Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kota Banjar	II-13
Tabel 2.9 Kejadian Bencana di Kota Banjar	II-17
Tabel 2.10 Capaian Ketahanan Pangan Kota Banjar Tahun 2019-2023	II-19
Tabel 2.11 Capaian Ketersediaan Pangan di Kota Banjar	II-20
Tabel 2.12 Kepadatan Penduduk Kota Banjar Tahun 2022.....	II-27
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kota Banjar Tahun 2013-2022	II-29
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Banjar	II-29
Tabel 2.15 Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Banjar.....	II-30
Tabel 2.16 Rasio Penduduk Berdasarkan Usia	II-31
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	II-31
Tabel 2.18 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Banjar	II-42
Tabel 2.19 Produksi Perikanan Kota Banjar	II-44
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Bidang Sosial di Kota Banjar	II-45
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan KB.....	II-48
Tabel 2.22 Capaian Bidang Perlindungan Anak	II-49
Tabel 2.23 Capaian Bidang Kepemudaan	II-55
Tabel 2.24 Capaian Bidang Kebudayaan	II-57
Tabel 2.25 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banjar	II-74
Tabel 2.26 Indeks Pelayanan Publik Kota Banjar.....	II-75



Tabel 2.27 Proyeksi Penduduk Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-86
Tabel 2.28 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-86
Tabel 2.29 Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2025-2045.....	II-87
Tabel 2.30 Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Banjar Tahun 2025-2045.....	II-88
Tabel 2.31 Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-91
Tabel 2.32 Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-92
Tabel 2.33 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-94
Tabel 2.34 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-95
Tabel 2.35 Spesifikasi Fasilitas Persampahan.....	II-96
Tabel 2.36 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-97
Tabel 2.37 Standar Fasilitas Kesehatan.....	II-98
Tabel 2.38 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-99
Tabel 2.39 Standar Fasilitas Pendidikan.....	II-100
Tabel 2.40 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Kota Banjar Tahun 2025-2045	II-100
Tabel 2.41 Keterkaitan Kebijakan Kewilayahan Nasional dengan Kota Banjar.....	II-103
Tabel 2.42 Program Utama Sistem Pusat Permukiman Kota Banjar	II-139
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan di Kota Banjar	III-10
Tabel 3.2 Crosscutting Isu Capaian TPB.....	III-51
Tabel 3.3 Ketersediaan Air Kota Banjar	III-60
Tabel 3.4 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah	



Tahun 2025-2045	III-68
Tabel 4.1 Keselarasan Visi Jawa Barat Terhadap RPJPN	IV-8
Tabel 4.2 Keselarasan Indikator Visi dan Target antara RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjar	IV-13
Tabel 4.3 Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Banjar 2025-2045	IV-27
Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045	V-10
Tabel 5.2 Upaya Transformatif Kota Banjar Tahun 2025-2045	V-12
Tabel 5.3 Penyelarasan arah Pembangunan RPJPD Kota Banjar dengan Provinsi Jawa Barat serta RPJPN Tahun 2025-204	V-15
Tabel 5.4 Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Kota Banjar tahun 2025	V-20
Tabel 5.5 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan (IKU)	V-56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya	I-8
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kota Banjar	II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Banjar	II-4
Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Banjar	II-6
Gambar 2.4 Peta Kelerengan Kota Banjar	II-7
Gambar 2.5 Peta Geologi Kota Banjar	II-9
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kota Banjar	II-12
Gambar 2.7 Peta Hutan Produksi di Kota Banjar	II-12
Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan di Kota Banjar	II-14
Gambar 2.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjar	II-15
Gambar 2.10 Indeks Risiko Bencana Kota Banjar	II-18
Gambar 2.11 Peta LP2B di Kota Banjar	II-21
Gambar 2.12 Peta Daerah Aliran di Kota Banjar	II-23
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjar	II-24
Gambar 2.14 Kepadatan Penduduk Kota Banjar	II-26
Gambar 2.15 Kepadatan Penduduk Kota Banjar	II-28
Gambar 2.16 Peta Kepadatan Penduduk di Kota Banjar	II-28
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Banjar	II-33
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar	II-35
Gambar 2.19 Indeks Gini Kota Banjar	II-37
Gambar 2.20 Angka Kemiskinan Kota Banjar	II-38
Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjar	II-40
Gambar 2.22 Indeks Keluarga Sehat Kota Banjar	II-46
Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Gender Kota Banjar	II-50
Gambar 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Banjar	II-52
Gambar 2.25 Indeks Ketimpangan Gender Kota Banjar	II-54
Gambar 2.26 PDRB Kota Banjar Tahun 2013-2022	II-58
Gambar 2.27 PDRB Per Kapita Kota Banjar Tahun 2013-2022	II-60
Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	



Kota Banjar Tahun 2013-2021.....	II-63
Gambar 2.29 Indeks Pendidikan Kota Banjar	
Tahun 2013-2021	II-65
Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
Kota Banjar Tahun 2013-2021.....	II-66
Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Kota Banjar Tahun 2013-2021.....	II-68
Gambar 2.32 Rasio Ketergantungan Kota Banjar.....	II-69
Gambar 2.33 Indeks Pengeluaran Kota Banjar	
Tahun 2013-2021	II-70
Gambar 2.34 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2025	II-89
Gambar 2.35 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2030	II-89
Gambar 2.36 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2035	II-89
Gambar 2.37 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2040	II-90
Gambar 2.38 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2045	II-90
Gambar 3.1 Megatren Global 2045.....	III-29
Gambar 3.2 Timbunan Sampah Tahun 2022.....	III-61
Gambar 3.3 Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Banjar	III-61
Gambar 4.1 Kerangka Visi Indonesia.....	IV-1
Gambar 4.2 Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-3
Gambar 4.3 Keterkaitan Isu Strategis dan Visi 2045	IV-4
Gambar 4.4 Tema Pembangunan Jawa Barat dalam RPJPN	IV-5
Gambar 4.5 Visi Provinsi Jawa Barat 2045.....	IV-5
Gambar 4.6 Rumusan Visi Kota Banjar 2045	IV-9
Gambar 4.7 Keterkaitan Perumusan Visi.....	IV-11
Gambar 4.8 Perumusan Misi Nasional	IV-14
Gambar 4.9 Misi Kota Banjar 2025-2045	IV-21
Gambar 4.10 Keterkaitan Misi RPJPN dengan RPJPD	
Kota Banjar	IV-25
Gambar 4.11 Keterkaitan Misi Provinsi dengan Kota Banjar.....	IV-26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan dengan memerhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Peran Provinsi Jawa Barat yang terkoneksi langsung dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi tentu sangat menguntungkan dan menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu destinasi menarik sebagai tujuan investasi, begitu pula letak geografis Kota Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat sekaligus pintu gerbang perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap sebagai sektor pengembangan industri dan perikanan, diharapkan mampu menangkap peluang pengembangan dengan memperhatikan keunggulan dan tantangan dengan mempertimbangkan arah pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan lokal Kota Banjar.

Kota Banjar merupakan daerah otonom dengan peningkatan status kota administratif menjadi Daerah Otonomi Baru sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 9 Maret 2001 Nomor 188.4/KEP/DPRD-10/2001 mengenai



Persetujuan Peningkatan Status Kota Administratif Banjar dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni 2001 Nomor 135/Kep.DPRD-27/2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Peningkatan Status Kota Administratif Banjar menjadi Daerah Otonom serta dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat, maka pembentukan Kota Banjar sebagai Kota yang mandiri menjadi suatu kebutuhan yang sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih muda dengan sederet prestasi yang membanggakan, capaian prestasi juga tidak lepas dari berbagai tantangan serta isu pembangunan, Kota Banjar diharapkan mampu tumbuh maju diberbagai aspek pembangunan, maka Pemerintah Kota Banjar perlu menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang bersifat jangka panjang untuk periode dua puluh (20) tahun. Penyusunan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan dokumen RPJPD dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis, menyesuaikan dinamika perubahan dan berorientasi pada tindakan antisipatif melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*, holistik-tematik, integratif, dan spasial.



RPJPD Kota Banjar disusun melalui proses partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Selain itu, penyusunan RPJPD dilakukan untuk mengarahkan pembangunan Kota Banjar ke arah yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta mencapai tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penting bagi Kota Banjar untuk memerhatikan setiap tahapan dalam penyusunan RPJPD ini, agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang yang berkualitas, komprehensif, dan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya.

RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 yang disusun berdasarkan visi dan misi daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, sasaran pokok dalam tahapan jangka panjang. Arah pembangunan jangka panjang tersebut disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah Kota Banjar dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan daerah. Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah.

Dokumen RPJPD ini berfungsi sebagai panduan untuk menyusun RPJMD Kota Banjar setiap 5 (lima) tahun selama periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini juga memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengevaluasi perkembangan pembangunan di Kota Banjar. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjar perlu merancang RPJPD 2025-2045 dengan cermat agar dokumen perencanaan ini dapat berperan secara efektif sebagai referensi dalam pelaksanaan pembangunan demi mencapai visi dan misi Kota Banjar yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung



pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Banjar dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan selama 20 tahun ke depan;
2. Memberikan arah dan pedoman untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang daerah, sehingga dapat mencapai tujuan strategis Kota Banjar yang ditetapkan;
3. Mengendalikan pembangunan daerah dalam jangka panjang, sehingga semua program dan kebijakan pembangunan di Kota



Banjar dapat disusun dan dilaksanakan secara terencana dan terarah.

4. Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar dapat bersinergi dan saling berkoordinasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang mengacu pada dokumen RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 antara lain:

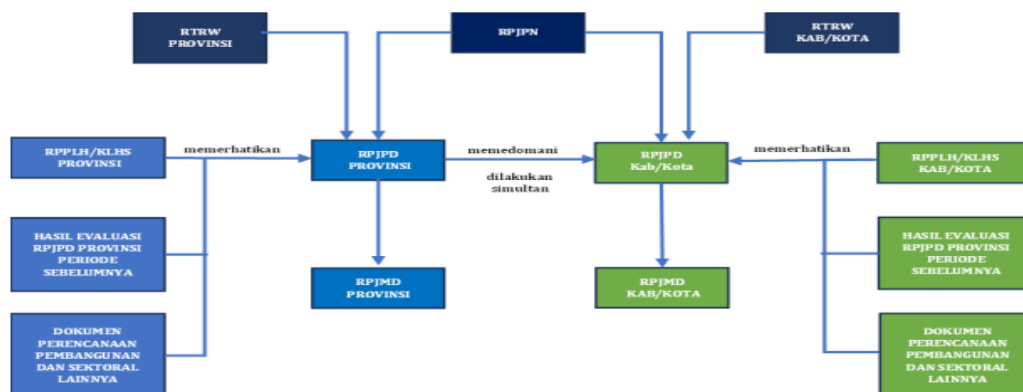
1. Mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Kota Banjar dalam jangka panjang 20 tahun ke depan;
2. Mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumber daya alam, ekonomi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki Kota Banjar;
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleransi, transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan Kota Banjar selama 20 tahun ke depan.

1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan pada tingkat daerah yang memiliki periode perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan dan pemerataan pendapatan warga, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing wilayah. RPJPD Kota Banjar merupakan hasil penggabungan dan keselarasan antara

kebijakan pembangunan tingkat nasional dan berbagai kebijakan sektoral.

Merujuk pada penjelasan di atas, penyusunan dokumen RPJPD Kota Banjar secara substantif tidak dapat berdiri sendiri. Dokumen RPJPD Kota Banjar ini berhubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, termasuk program pembangunan (*aspatial*) dan dokumen tata ruang (*spatial*). Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJPD Kota Banjar, perlu mempertimbangkan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan dokumen perencanaan Kota Banjar itu sendiri.



Gambar 1. 1

Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Sumber: Pedoman Umum Penyusunan RPJPD 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) di tingkat kabupaten dan kota untuk periode 2025-2045 harus sejalan dengan arah kebijakan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan wilayah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal ini mengacu pada kinerja dan indikator yang sesuai dengan cakupan kewenangan masing-masing daerah. RPJPN 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten dan kota.

Proses penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan RPJPD provinsi serta RPJPN. Evaluasi hasil RPJPD sebelumnya menjadi landasan penting



dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan serta rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi RPJPD periode sebelumnya, seperti evaluasi RPJPD 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.

Proses penyusunan RPJPD juga mempertimbangkan dokumen lingkungan seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menangani kebijakan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, serta memperhitungkan aspek pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan strategis. Selain itu, RPJPD juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman untuk arah pengembangan wilayah, dan penyusunan RPJPD dilakukan bersamaan dan terkoordinasi dengan penyusunan atau revisi RTRW. Jika menjelaskan hubungan RPJPD Kota Banjar dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 RPJPN adalah rencana pembangunan yang bersifat nasional, yang mencakup arah, tujuan, dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, RPJPD Provinsi adalah rencana pembangunan yang diterapkan di tingkat Provinsi Jawa Barat sedangkan untuk Kota Banjar dalam menyusun RPJPD tentu sesuai kaidah peraturan dan dalam proses yang mencakup arah, tujuan dan kebijakan pembangunan harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Selain itu harus mempertimbangkan evaluasi RPJPD periode sebelumnya serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, diantaranya RTRW, KLHS dan dokumen teknis diskusi tematik lainnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen RPJPD berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045.

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

Pada BAB ini berisi Permasalahan Isu Strategis Daerah Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis daerah Arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana berdasarkan UU RPJPN 2025-2045.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pada bab ini menjelaskan Visi Daerah Tahun 2025-2045, Indikator Visi serta Misi Daerah Tahun 2025-2045.



BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bab ini dikemukakan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan hubungan sasaran pokok dengan tahapan pembangunan, dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20, Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025-2045, serta Sasaran Pokok Tahun 2025-2045.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan penjelasan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 periode ke depan, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam dokumen RPJPD mempunyai fungsi untuk menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Gambaran geografi dalam dokumen ini dijelaskan dengan indikator-indikator seperti Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW, Persentase Alih Fungsi Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Aspek demografi menjelaskan karakteristik yang berkaitan dengan demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini dijabarkan melalui indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Kepadatan Penduduk.

2.1.1 Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan di dalam geosfer dengan fokus pada aspek lingkungan dan wilayah. Aspek geografi juga bisa disebut dengan bagian dari studi yang mempelajari karakteristik fisik, lingkungan, dan spasial dari bumi, termasuk fenomena alam seperti iklim, topografi, tanah, vegetasi, dan perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Hal ini meliputi juga analisis tentang bagaimana faktor-faktor geografis memengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan, distribusi populasi, perkembangan ekonomi, dan pola kehidupan sosial.



2.1.1.1 Posisi Strategis Kota Banjar

Secara geografis Kota Banjar terletak di antara 07019'30" - 07026'30" Lintang Selatan dan 108028'00" - 108040'00" Bujur Timur. Berdasarkan pengukuran pada Peta Rupa Bumi Bakosurtanal (sekarang Badan Informasi Geospasial) tahun 2003, luas wilayah Kota Banjar adalah 13.140,44 Ha atau 131,97 km².

A. Batas Daerah

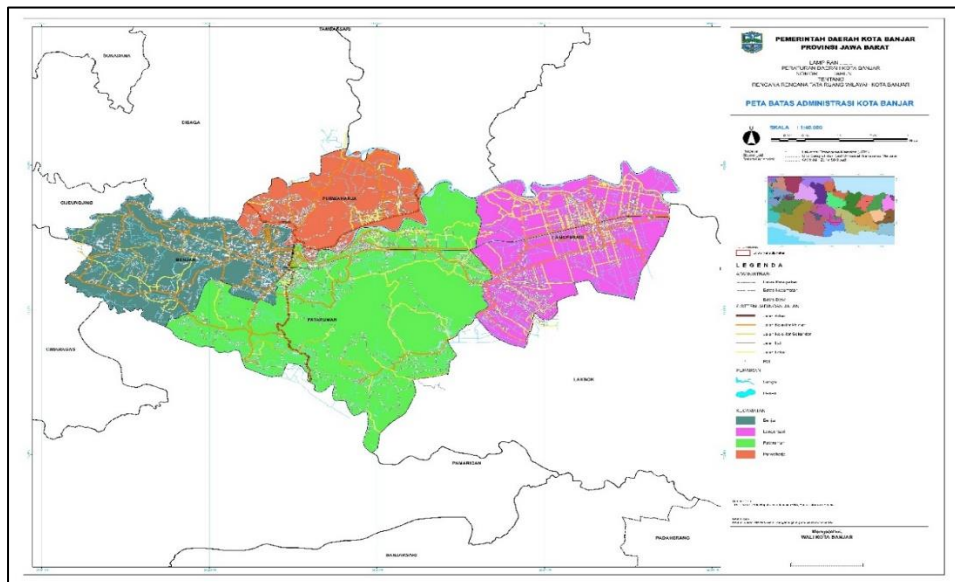
Batas wilayah Kota Banjar merupakan salah satu aspek dari muatan strategis, untuk luas wilayah Kota Banjar yang terdiri dari 16 (enam belas) desa, 9 (sembilan) kelurahan, dan 4 (empat) Kecamatan. Kota Banjar mempunyai bata-batas wilayah administrasi, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Cisaga (Kabupaten Ciamis), Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanaraja (Kabupaten Cilacap).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Laktok (Kabupaten Ciamis), Kecamatan Wanareja (Kabupaten Cilacap).
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Laktok (Kabupaten Ciamis).
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeunjing (Kabupaten Ciamis).

Secara administratif, Kota Banjar terbagi menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Banjar, Purwaharja, Pataruman, dan Langensari, Jumlah keseluruhan desa/kelurahan di Kota Banjar mencapai 25, dengan total 297 RW dan 1.146 RT.

- a. Kecamatan Banjar terdiri dari 7 desa/kelurahan dengan total 96 RW dan 356 RT, dengan luas 26,24 km² sekitar 20 persen dari luas Kota Banjar.

- b. Kecamatan Purwaharja memiliki 4 desa/kelurahan dengan 56 RW dan 149 RT, dengan luas 18,27 km² atau 14 persen dari total luas Kota Banjar.
- c. Kecamatan Pataruman, terdapat 8 desa/kelurahan dengan 95 RW dan 375 RT, yang merupakan kecamatan terluas, menempati wilayah seluas 54,05 km² atau sekitar 41 persen dari total luas Kota Banjar.
- d. Kecamatan Langensari terdiri dari 6 desa/kelurahan dengan 50 RW dan 266 RT, memiliki luas wilayah 33,41 km² atau sekitar 25 persen dari total luas Kota Banjar.



Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

B. Topografi

Kota Banjar mempunyai kondisi topografi yang beragam yang memperlihatkan variasi ketinggian wilayah, mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Rentang ketinggian Kota Banjar berkisar antara 0 hingga 500 Mdpl, dengan ketinggian mayoritas terpusat di rentang 26 –100 Mdpl berada di Kecamatan Pataruman. Berikut tabel topografi Kota Banjar.

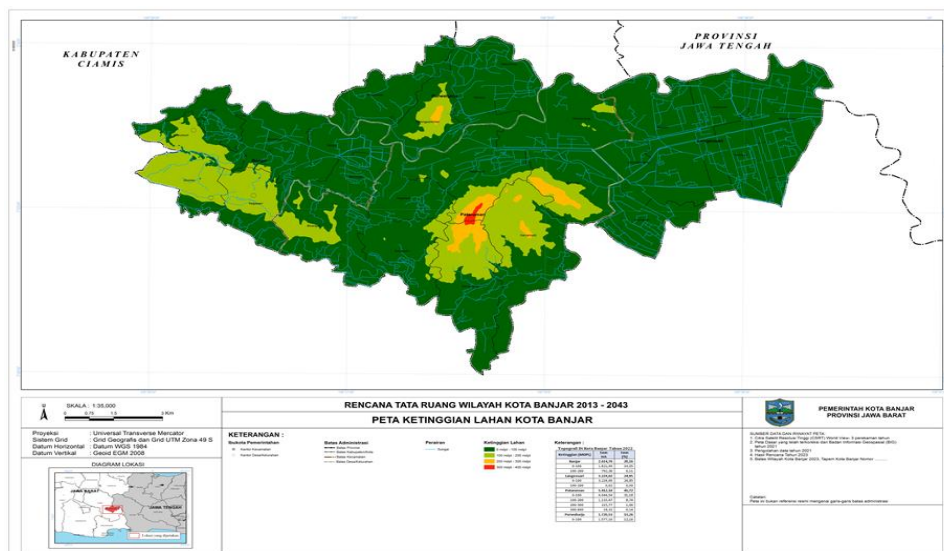


Tabel 2.1
Topografi Kota Banjar

Ketinggian (MDPL)	Luas (HA)	Luas (%)
0-100	10.657,58	82,24
Banjar	1.820,60	14,05
Langensari	3.220,82	24,85
Pataruman	4.040,56	31,18
Purwaharja	1.575,61	12,16
100-200	2.051,30	15,83
Banjar	791,5793	6,11
Langensari	0,01998	0
Pataruman	1.132,35	8,74
Purwaharja	127,3344	0,98
200-300	231,4517	1,79
Pataruman	215,5574	1,66
Purwaharja	15,89432	0,12
300-400	18,30195	0,14
Pataruman	18,30195	0,14
Grand Total	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

Mdpl yang dominan terdapat di Kecamatan Pataruman. Pengenalan karakteristik ini memegang peranan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah atau kota, memungkinkan identifikasi dan analisis potensi serta aktivitas yang sesuai dan dapat dikembangkan di setiap daerah sesuai dengan kondisi topografi.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023



C. Morfologi

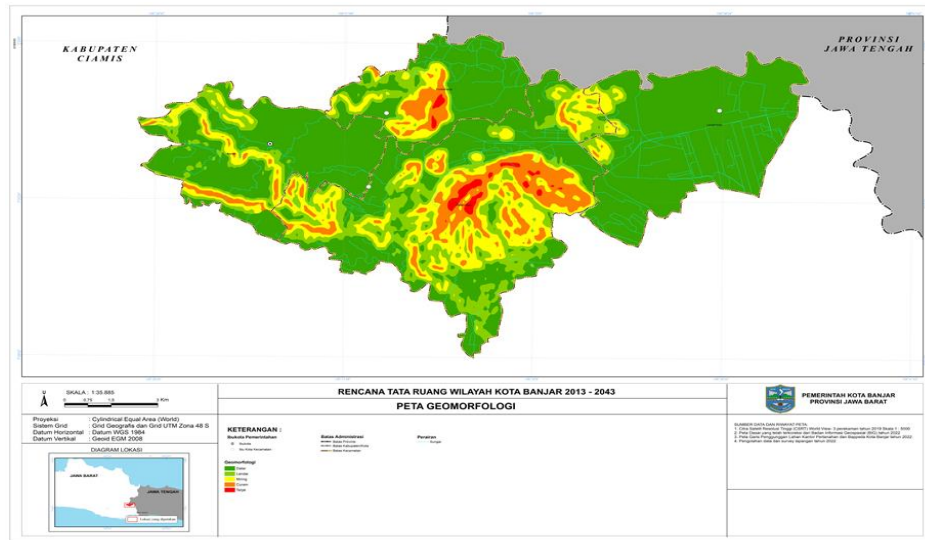
kondisi morfologi Kota Banjar memiliki beragam jenis daratan dan bentuk morfologi datar terluas terdapat di wilayah kecamatan Langensari Kota Banjar seluas 3.028,96 Ha. Berikut tabel morfologi Kota Banjar :

Tabel 2.2
Morfologi Kota Banjar

Geomorfologi	Luas (Ha)	Luas (%)
Kec. Banjar	2.612,23	20,16
Datar	1.892,23	14,6
Landai	375,39	2,9
Miring	267,81	2,07
Curam	76,79	0,59
Kec. Langensari	3.220,87	24,86
Datar	3.025,98	23,35
Landai	97,14	0,75
Miring	93,46	0,72
Curam	4,29	0,03
Kec. Pataruman	5.406,74	41,72
Datar	1.976,06	15,25
Landai	1.326,68	10,24
Miring	1.279,17	9,87
Curam	740,36	5,71
Terjal	84,48	0,65
Kec. Purwahaerja	1.718,78	13,26
Datar	1.078,33	8,32
Landai	224,86	1,74
Miring	226,62	1,75
Curam	170,49	1,32
Terjal	18,49	0,14
Kota Banjar	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

Bentuk morfologi landai, miring dan curam serta terjal secara berturut-turut terdapat di Kecamatan Pataruman di Kota Banjar seluas 1.327,99 Ha, morfologi miring dengan luas 1.280,43 Ha dan bentuk morfologi curam sebesar 741,09 Ha. Serta bentuk morfologi terjal dengan luas 84,56 Ha. Secara umum Kemiringan lereng curam tersebar di seluruh kecamatan, sementara kemiringan sangat curam hanya terdapat di Kecamatan Pataruman dan Purwahaerja, berlokasi pada topografi yang tinggi dan sangat tinggi.



Gambar 2.3 Peta Morfologi Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

D. Kemiringan Lereng

Kota Banjar memiliki berbagai macam interval kemiringan lereng diawali dengan 0 – 8% (datar) yang tersebar diseluruh kecamatan degan luas hamparan 8.000,04 Ha. Kemudian Kota Banjar memiliki interval kemiringan lereng 8 – 15% (landai) yang tersebar diseluruh kecamatan degan luas hamparan 2.067,79 Ha. Interval landai merupakan luas terbesar dari interval kemiringan lereng lainnya. Kemiringan landai biasanya berada setelah kemiringan datar. Berikutnya Lokasi kemiringan lereng dengan interval lainnya yaitu tersebar diseluruh kecamatan.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng Kota Banjar

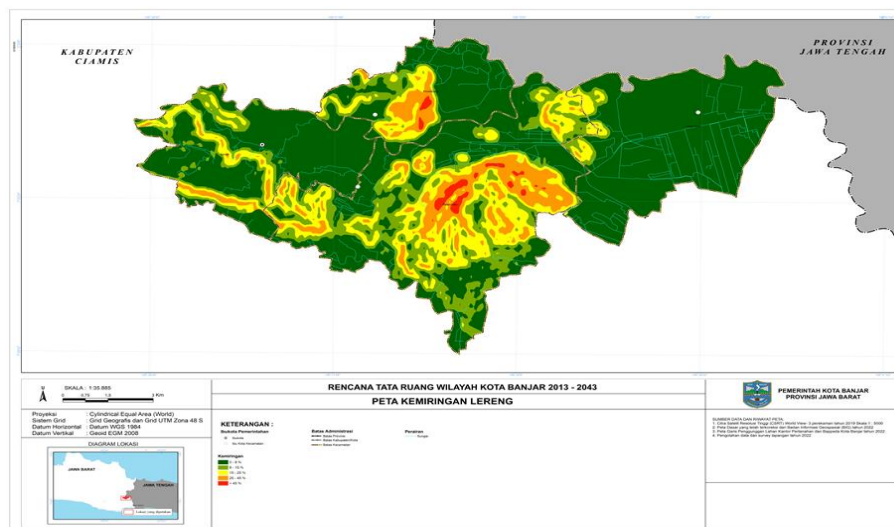
Kemiringan	Luas HA	Luas (%)
Kec. Banjar	2.612,17	20,16
0 - 8 %	1.892,19	14,6
8 - 15 %	375,38	2,9
15 - 25 %	267,81	2,07
25 - 45 %	76,79	0,59
Kec. Langensari	3.220,82	24,85
0 - 8 %	3.025,93	23,35
8 - 15 %	97,14	0,75
15 - 25 %	93,46	0,72
25 - 45 %	4,29	0,03



Kemiringan	Luas HA	Luas (%)
Kec. Pataruman	5.406,90	41,72
0 - 8 %	1.975,12	15,24
8 - 15 %	1.327,81	10,25
15 - 25 %	1.279,15	9,87
25 - 45 %	740,34	5,71
> 45 %	84,48	0,65
Kec. Purwaharja	1.718,74	13,26
0 - 8 %	1.078,31	8,32
8 - 15 %	224,86	1,74
15 - 25 %	226,61	1,75
25 - 45 %	170,49	1,32
> 45 %	18,49	0,14
Kota Banjar	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

Kemiringan lereng dengan interval 25 – 45% merupakan kemiringan lereng yang curam. Luas hamparan kemiringan lereng dengan interval 25 – 40% yaitu 1.023,23 Ha. Sedangkan kemiringan lereng >45% merupakan kemiringan lereng yang sangat curam. Luas dari kemiringan lereng sangat curam yaitu 103,28 Ha. Kemiringan lereng 25 – 45% dan >45% berlokasi pada topografi yang tinggi dan sangat tinggi. Hal itu terjadi karena pada saat kenaikan elevasi suatu wilayah menjadi sangat tinggi maka kemiringan lereng juga semakin curam.



Gambar 2.4 Peta Kelereng Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023



E. Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan data Curah hujan yang berada di wilayah Kota Banjar bahwan persebaran intensitas curah hujan di Kota Banjar dapat dilihat pada Peta Curah Hujan. Pada tahun 2021 tercatat rata-rata curah hujan dalam setahun mencapai 274,25 milimeter. Pada tahun 2021, intensitas curah hujan tertinggi berada pada bulan Oktober yaitu 31,50 mm/hari. Sedangkan intensitas curah hujan terendah berada pada bulan Agustus yaitu 4 mm/hari.

Tabel 2.4
Intensitas Hujan Kota Banjar Tahun 2022

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Intensitas Hujan	
				(mm/hari)	(mm/jam)
1	Januari	246,5	16	15,41	0,64
2	Febuari	626,5	22	28,48	1,19
3	Maret	218	12	18,17	0,76
4	April	350	20	17,50	0,73
5	Mei	126	8	15,75	0,66
6	Juni	181	11	16,45	0,69
7	Juli	42	10	4,20	0,18
8	Agustus	24	6	4,00	0,17
9	September	136	5	27,20	1,13
10	Oktober	661,5	21	31,50	1,31
11	November	516	21	24,57	1,02
12	Desember	163,5	19	8,61	0,36
Total		3291	171	211,83	8,83
Rata - Rata Intensitas		274,25	14,25	17,65	0,74

Sumber :BPS Kota Banjar Tahun 2022

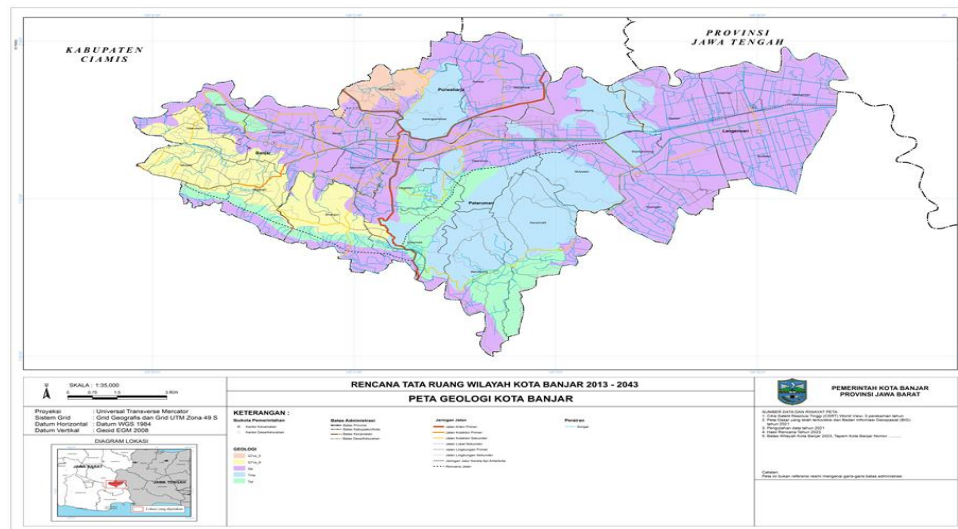
F. Geologi

Stratigrafi daerah Kota Banjar terbagi dalam beberapa formasi dan satuan batuan dengan litologinya sebagai berikut:

- Alluvium, yang tersebar di wilayah Kota Banjar, yaitu pada bagian wilayah dengan morfologi datar;
- Batuan beku bersusunan andesit berupa lava, breksi aliran, sumbat gunung api, yaitu pada bagian wilayah yang merupakan perbukitan utama (komplek Gunung Sangkur dan kompleks Gunung Babakan) dan sebagian perbukitan minor (Pasir Tumpeng, Pasir Jengkol, Pasir Leutik, Pasir Gembok, dan perbukitan Mandalareh-Cadasgantung);



- Endapan lahar, yaitu di sebelah barat kompleks Gunung Babakan, pada morfologi bergelombang di Kecamatan Purwahrja bagian barat
- Formasi Tapak, terdiri dari batupasir kehijauan kasar (bawah), batupasir dengan sisipan napal (atas), yaitu di bagian barat dan selatan wilayah Kota Banjar di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Pataruman pada morfologi perbukitan minor dan bergelombang.



Gambar 2.5 Peta Geologi Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

G. Hidrologi

Sungai utama yang terdapat di Kota Banjar adalah Sungai Citanduy. Wilayah Sungai Citanduy merupakan salah satu Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan. Wilayah Sungai Citanduy seluas 447.285,93 Km² bersumber dari Gunung Cakrabuana (± 1.720 MSL) di Kabupaten Tasikmalaya dengan panjang 175 Km dan bermuara di Laguna Segara-Anakan di Kabupaten Cilacap. Sungai utama yang terdapat di Kota Banjar adalah Sungai Citanduy. Wilayah Sungai Citanduy merupakan salah satu Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan. Wilayah Sungai Citanduy seluas 447.285,93 Km² bersumber dari Gunung Cakrabuana (± 1.720 MSL) di Kabupaten Tasikmalaya dengan panjang



175 Km dan bermuara di Laguna Segara-Anakan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2.5
Sistem DAS Kota Banjar

No	Sistem DAS	Kecamatan				Kota Banjar
		Pataruman	Banjar	Purwaha harja	Langensari	
1	Sistem Cijolang	-	-	1.106,63	-	1.106,63
2	Sistem Cilisung - Ciseel	2.539,36	-	-	2.929,82	5.469,18
3	Sistem Ciseel – Cikembang-Cimaragas	1.462,32	319,56	-	-	1.781,89
4	Sitem Citanduy	1.307,02	2.257,24	687,37	349,31	4.600,94
Jumlah		5.308,71	2.576,80	1.793,99	3.279,13	12.958,63

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

H. Hidrogeologi

Tata air yang berada di dalam tanah (geohidrologi) dapat berbentuk aliran air tanah atau pun sungai bawah tanah. Berikut data hidrogeologi di Kota Banjar.

Tabel 2.6
Hidrogeologi Kota Banjar

Hidrogeologi	Kecamatan				Kota Banjar	%
	Pataruman	Banjar	Purwa harja	Langensari		
Akuiver dengan produktivitas rendah setempat berarti	2.409,33	368,87	793,24	2.870,18	6.441,61	49,71
Akuiver dengan produktivitas sedang dengan penyebaran luas	0,00	1.071,34	379,74	0,00	1.451,08	11,20
Daerah air tanah langka atau tak berarti	2.571,36	0,00	399,07	350,27	3.320,70	25,63
Setempat Akifer dengan produktivitas sedang	426,09	1.172,37	146,78	0,00	1.745,24	13,47
Jumlah	5.406,78	2.612,58	1.718,81	3.220,45	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

I. Jenis Tanah

Kota Banjar memiliki tujuh jenis tanah yang tersebar di hamparan lahannya yaitu Aluvial Hidromorf, Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan, Asosiasi Podsolik Kuning dan Regosol, Latosol Coklat Tua Kemerahan, Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat, Podsolik Merah Kekuningan dan Litosol,



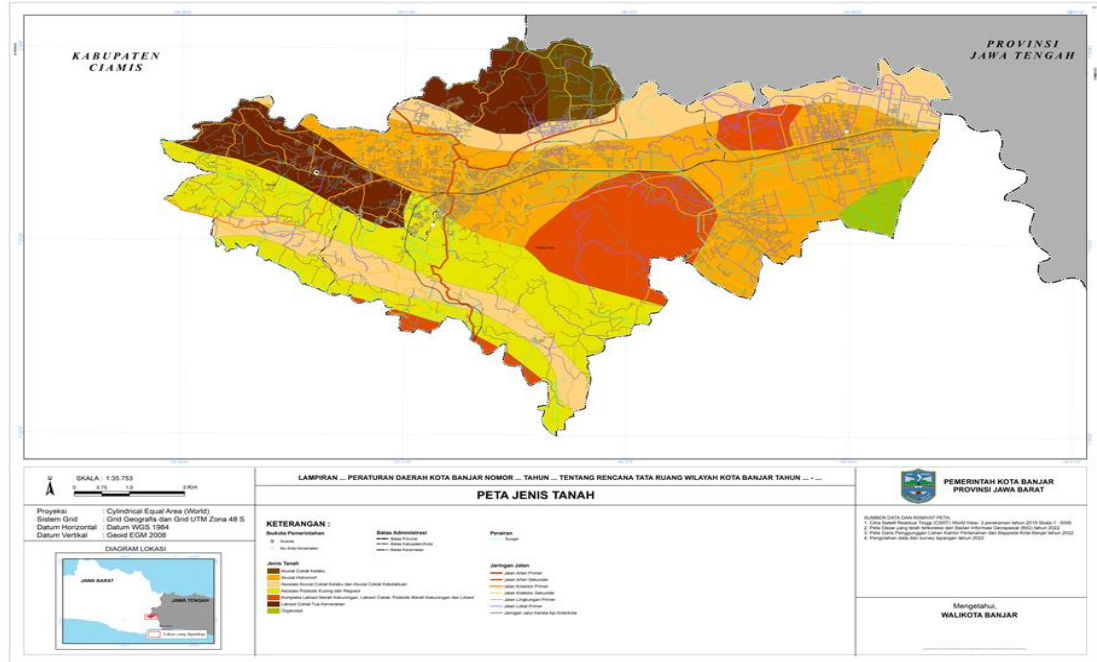
Organosol, serta Aluvial Coklat Kelabu. Jenis tanah Aluvial Hidromorf berada di semua kecamatan di Kota Banjar.

Tabel 2.7
Jenis Tanah Kota Banjar

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	(%)
1	Banjar	2.612,22	20,16
a.	Aluvial Hidromorf	464,48	3,58
b.	Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan	233,38	1,8
c.	Asosiasi Podsolik Kuning dan Regosol	989,94	7,64
d.	Latosol Coklat Tua Kemerahan	924,43	7,13
2.	Langensari	3.220,87	24,86
a.	Aluvial Hidromorf	2.067,41	15,95
b.	Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan	638,68	4,93
c.	Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat, Podsolik Merah Kekuningan dan Litosol	309,08	2,39
d.	Organosol	205,72	1,59
3.	Pataruman	5.406,75	41,72
a.	Aluvial Hidromorf	1.196,44	9,23
b.	Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan	966,15	7,46
c.	Asosiasi Podsolik Kuning dan Regosol	1.823,78	14,07
d.	Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat, Podsolik Merah Kekuningan dan Litosol	1.407,48	10,86
e.	Latosol Coklat Tua Kemerahan	12,90	0,1
4.	Purwaharja	1.718,78	13,26
a.	Aluvial Coklat Kelabu	444,53	3,43
b.	Aluvial Hidromorf	267,30	2,06
c.	Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan	428,59	3,31
d.	Latosol Coklat Tua Kemerahan	0,00	4,46
	Grand Total	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

Jenis tanah Aluvial Hidromorf merupakan jenis tanah dengan luas terbesar yang terdapat di Kota Banjar dengan luas sebesar 2.069,45 Ha. Jenis tanah ini mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permiabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman.

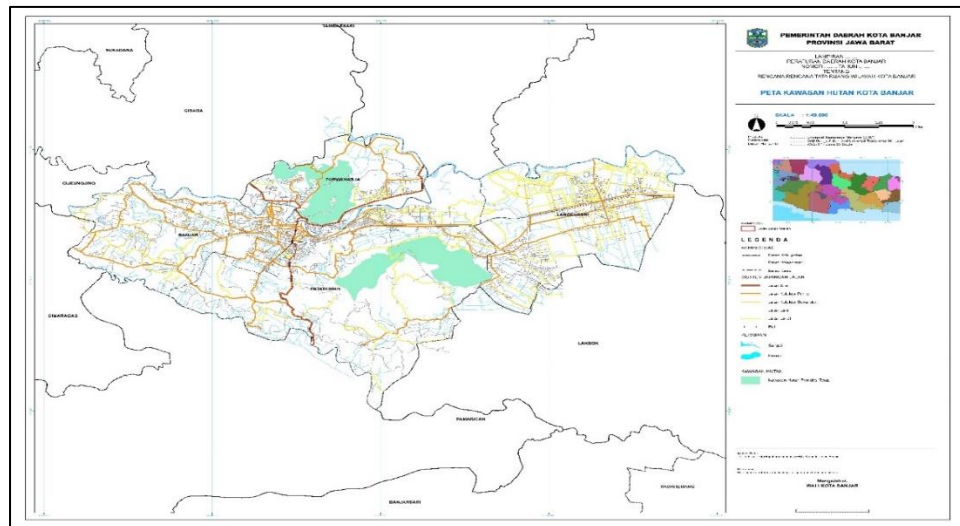


Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

J. Kehutanan

Kawasan hutan di Kota Banjar ditetapkan sebagai hutan produksi tetap berdasarkan SK Menteri Kehutanan (SK.4765/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK.4762/Menhut-VII/KUH/2014) memiliki luasan 1.122,89 Ha



Gambar 2.7 Peta Hutan Produksi di Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023



2.1.1.2 Penggunaan Lahan

Alih fungsi lahan mengacu pada perubahan tujuan atau penggunaan lahan dari satu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lainnya. Menurut (Hidyat, 2008) alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Menurut (Setiawan, 2016) alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Proses ini sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi yang terus meningkat. Berikut luas lahan dan persentase dari masing masing jenis penggunaan lahan di Kota Banjar tahun 2023

Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kota Banjar

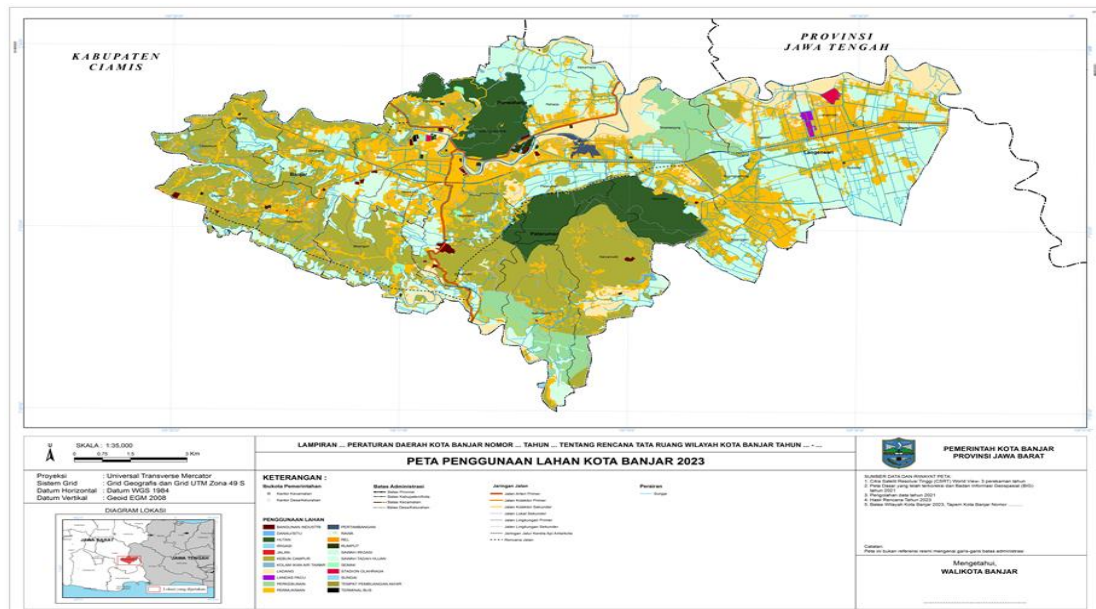
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	Bangunan Industri	42,00	0,32
2.	Danau/Situ	7,93	0,06
3.	Hutan	1102,86	8,51
4.	Irigasi	17,35	0,13
5.	Jalan	27,94	0,22
6.	Kebun Campur	3196,59	24,67
7.	Kolam Ikan Air Tawar	703,70	5,43
8.	Ladang	989,29	7,63
9.	Landas Pacu	14,17	0,11
10.	Perkebunan	613,43	4,73
11.	Permukiman	2775,28	21,42
12.	Pertambangan	29,28	0,23
13.	Rawa	1,58	0,01
14.	Rel	31,55	0,24
15.	Rumput	28,45	0,22
16.	Sawah Irigasi	2263,95	17,47
17.	Sawah Tadah Hujan	924,42	7,13
18.	Semak	51,84	0,40
19.	Stadion Olahraga	18,90	0,15
20.	Sungai	111,91	0,86



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
21.	Tempat Pembuangan Akhir	2,96	0,02
22.	Terminal Bus	3,26	0,03
	Luas Total	12.958,63	100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

Penggunaan lahan di Kota Banjar tercermin dalam statistik dari total luas wilayah, 24,6% dimanfaatkan sebagai lahan sawah, mencerminkan signifikansi sektor pertanian dalam perekonomian kota. Kawasan hutan membentang sebesar 8,51%, menunjukkan komitmen terhadap pelestarian alam. Sementara itu, persentase besar, yaitu 66,89%, digunakan untuk keperluan lainnya, mencakup sejumlah kegiatan termasuk pemukiman, industri, dan area terbuka. Kebun campuran menjadi penggunaan dominan dalam penggunaan lahan Kota Banjar, mencakup luas 3196,59 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan lahan ini mencerminkan diversifikasi pertanian dan upaya untuk memaksimalkan potensi tanah yang subur. Sementara itu, lahan permukiman juga memainkan peran penting dengan luas mencapai 2775,28 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.



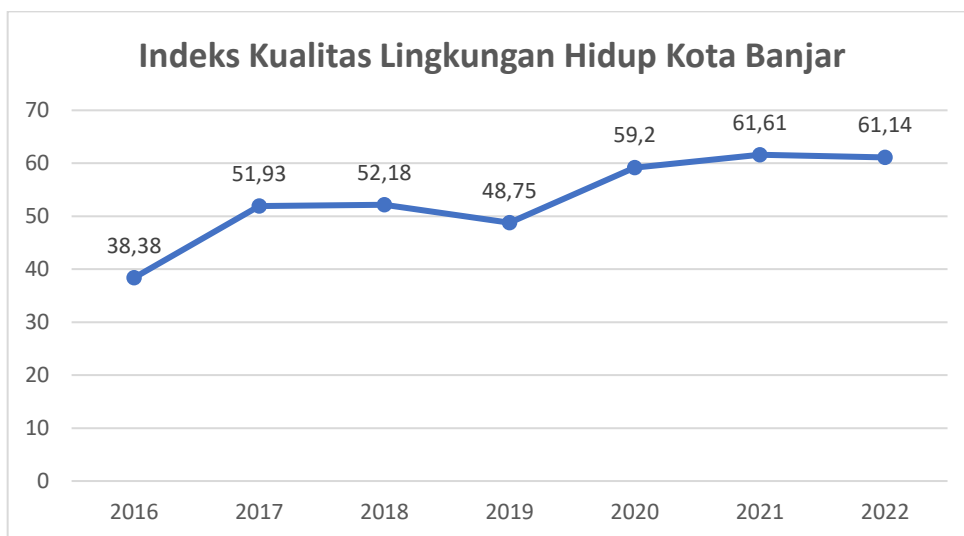
Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan di Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023



2.1.1.3 Lingkungan Hidup

Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH, atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, memberikan gambaran atau tanda awal tentang kondisi lingkungan hidup dalam rentang waktu tertentu. Ini memberikan kesimpulan awal mengenai keadaan lingkungan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Komponen yang diperhitungkan pada IKLH adalah IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara), dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan), tetapi pada tingkat provinsi perhitungan IKLH ditambah dengan IKAL (Indeks Kualitas Air Laut).



Gambar 2. 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, 2016-2022

Berdasarkan diagram di atas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjar mayoritas meningkat di tiap tahunnya, mulai dari 2016-2022. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 nilai IKLH adalah 38,38, kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 51,93. Dilanjutkan pada tahun 2018 mengalami



kenaikan yang tidak terlalu signifikan menjadi 52,18, tetapi pada tahun 2019 IKLH mengalami penurunan sehingga menjadi 48,75. Penurunan yang terjadi ini tidak diketahui penyebabnya, antara rumus perhitungan IKLH yang berubah atau nilai masing-masing indeks mengalami penurunan.

Tetapi pada tahun 2020 IKLH Kota Banjar mengalami kenaikan yang signifikan yaitu lebih dari 10 poin sehingga menjadi 59,2. Pada tahun 2021 IKLH Kota Banjar mengalami sedikit kenaikan menjadi 61,61 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 61,14. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan rumus hitung dari DLHK sehingga menyebabkan seluruh IKLH kabupaten kota di Indonesia mengalami penurunan.

Diagram di atas menampilkan IKLH Kota Banjar selama periode tahun 2016 hingga 2022, dari data yang disajikan tersebut dapat dilihat bahwa naik dan turunnya IKLH di Kota Banjar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meski begitu, dengan tren data yang mayoritas mengalami kenaikan setiap tahunnya, menunjukkan kinerja yang baik dari Pemerintah Kota Banjar dalam mengatasi masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup memang harus ditangani dengan baik, hal ini dikarenakan kualitas lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat, sebab kegiatan dan aktivitas masyarakat akan selalu berhubungan dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

2.1.1.4 Kebencanaan

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), setidaknya terdapat 5 (lima) jenis bencana yang terjadi di Kota Banjar, yaitu :

1. **Banjir** adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
2. **Banjir Bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai



- pada alur sungai.
3. **Angin** kencang adalah angin dengan kecepatan di atas 25 knots (45 km/jam). Angin kencang adalah angin yang dibuat oleh udara yang dingin secara signifikan yang disebabkan oleh hujan, kemudian setelah mencapai permukaan tanah angin tersebut menyebar ke segala arah dan menimbulkan angin kencang. Angin kencang dikaitkan dengan badai yang disebabkan oleh jumlah curah hujan yang tinggi
 4. **Kekeringan** adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang terdapat tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
 5. **Tanah Longsor** merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Tabel 2.9
Kejadian Bencana di Kota Banjar

Jenis Bencana Tahun 2021	Kecamatan				Jumlah Kejadian
	Banjar	Langensari	Pataruman	Purwahaaja	
Cuaca Ekstrem	32	5	7	11	55
Tanah Longsor	3	0	2	2	7
Banjir	0	0	0	2	2
Kekeringan	54	0	39	0	93
Jumlah Kejadian	89	5	48	15	157

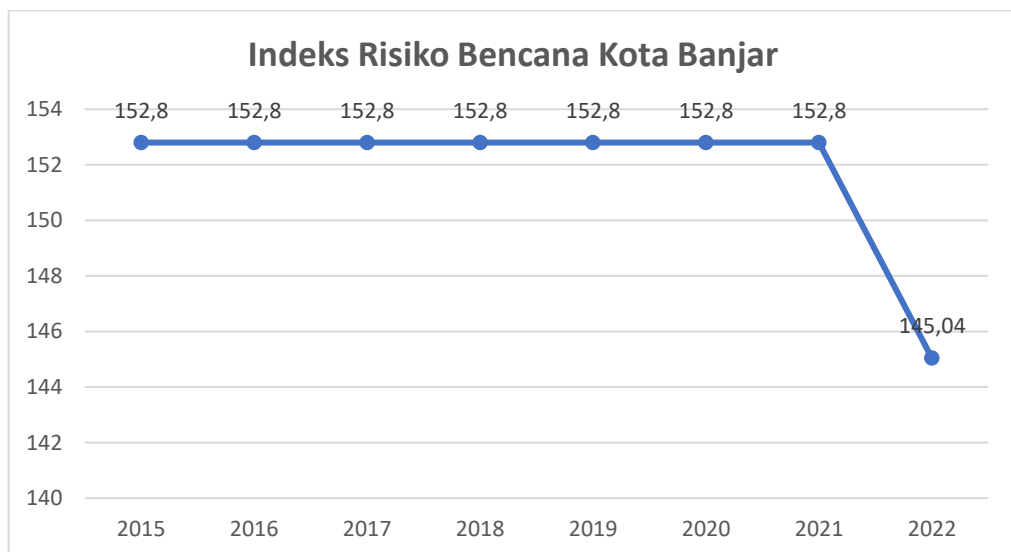
Sumber: Data dan Informasi Bencana (DIBI) BNPB (diolah), 2023

2.1.1.5 Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Mengatur Penanggulangan Bencana menjadi Urusan Wajib Daerah, diharapkan



dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Indeks Risiko Bencana merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari berbagai bahaya (*multi hazard*), dengan tingkatan, 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian (indeks rawan bencana, BNPB, 2013). IRB terdiri dari 71 indikator yang dapat dilihat dari dokumen perangkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB.



Gambar 2.10 Indeks Risiko Bencana Kota Banjar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, 2015-2022



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Banjar mempunyai nilai yang konsisten dari tahun 2015 hingga 2021, tetapi pada tahun 2022 nilainya turun menjadi 145,04. Penyebab penurunan IRB ini belum jelas, bisa jadi terkait dengan perubahan rumus perhitungan IRB atau penurunan nilai pada indeks-indeks tertentu.

2.1.1.6 Ketahanan Pangan

World Food Summit pada tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat (Safa'at, S 2013). Dalam undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Hasil Lokakarya Ketahanan Pangan Nasional (DEPTAN, 1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu ke waktu agar tetap hidup sehat.

Tabel 2.10
Capaian Ketahanan Pangan Kota Banjar Tahun 2019-2023

No.	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)	Kebutuhan per Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit
1	Beras	27.290,99	18.711,09	8.579,90
2	Gula Pasir	639,47	597,43	42,04
3	Minyak Goreng	1.846,80	1.663,86	182,94
4	Bawang Merah	530,20	460,82	69,38
5	Bawang Putih	315,60	278,82	36,78
6	Cabai Merah	547,00	114,81	432,19
7	Cabai Rawit	491,60	328,38	163,22
8	Daging Sapi	520,50	144,47	376,03
9	Daging Ayam	1.870,70	1.808,21	62,49



No.	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)	Kebutuhan per Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit
10	Telur Ayam Ras	1.565,60	1.508,81	56,79
11	Jagung	616,00	49,90	566,10
11	Kedelai	195,20	13,86	181,34
2023		36.429,66	25.680,44	10.749,22
2022		35.864,63	24.990,59	10.874,14
2021		36.003,30	24.383,80	11.619,50
2020		47.264,00	36.924	10.340,00
2019		34.381,70	28.163,40	6.218,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2024

Tingkat ketersediaan pangan, yang diukur berdasarkan tersedianya cadangan beras dan jagung sesuai dengan kebutuhan, menunjukkan variasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, capaian menggambarkan ketersediaan pangan yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan yang berarti menunjukkan adanya surplus dalam cadangan beras dan jagung sesuai dengan kebutuhan populasi. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan mencerminkan potensi penurunan ketersediaan pangan yang dapat memengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Perubahan ini mungkin dipicu oleh faktor-faktor seperti perubahan cuaca, ketidakstabilan pasar, atau perubahan kebijakan. Diperlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam menjaga ketersediaan pangan yang optimal, melalui penetapan lahan pertanian.

Tabel 2.11
Capaian Ketersediaan Pangan di Kota Banjar

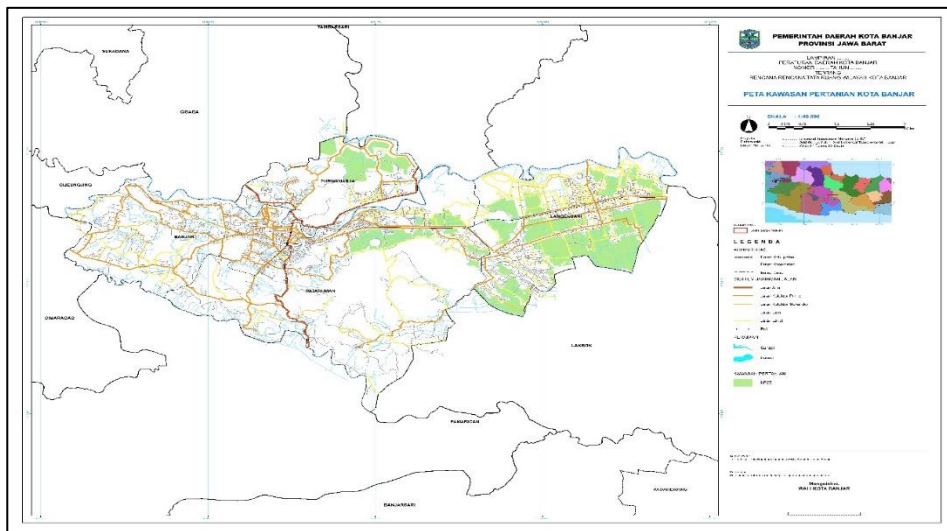
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	n/a	n/a	135,32	164,95	99,737

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,



ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Berdasarkan Berita Acara (BA) tentang Rapat Koordinasi Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan KP2B dalam rangka Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat tanggal 6 November 2020 pembahasan hasil rapat Koordinasi yang dilakukan adalah Luas KP2B untuk Kota Banjar disepakati sebesar 1.646,08 Ha dengan sesuai luasan pada Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat dengan sebaran lokasi sesuai SHP terbaru yang di serahkan oleh Kota Banjar



Gambar 2.11 Peta LP2B di Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

2.1.1.7 Ketahanan Energi

Di Indonesia, ketahanan energi didefinisikan sebagai keadaan dimana pasokan energi tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang, sambil tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap lingkungan (sesuai Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014). Dewan Energi Nasional telah menyusun komponen yang terkait dengan definisi ini, meliputi ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan penerimaan oleh masyarakat. Komponen-komponen ini terdiri dari 20 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat



ketahanan energi nasional (berdasarkan Sekretariat Jenderal DEN 2020).

2.1.1.8 Ketahanan Air

Menurut Amron (2010), ketahanan air melampaui sekadar ketersediaan air, namun juga mencakup usaha untuk memperoleh akses air, menjaga keamanan air dari potensi kerusakan, serta menyediakan pasokan air yang berkelanjutan. Konsep ketahanan air terkait erat dengan empat aspek, yakni aksesibilitas, keberlanjutan, keamanan, dan ketersediaan potensi air. Sebuah studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dan Asia Pacific Water Forum (APWF) pada tahun 2013 merumuskan lima dimensi ketahanan air, termasuk ketahanan air rumah tangga, ketahanan air dalam konteks ekonomi, perkotaan, lingkungan, dan dalam menghadapi bencana terkait air. Salah satu dari lima dimensi ini, yaitu ketahanan air rumah tangga, dipelajari karena aspek fundamental dalam ketahanan air adalah situasi di tingkat rumah tangga. Ketahanan air di tingkat rumah tangga merupakan fondasi yang penting dalam upaya mengatasi kemiskinan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kota Banjar memiliki 4 (Empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Cintanduy, DAS Cijolang – Citapen, DAS Ciseel, DAS Ciseel-Cikembang dan DAS Cilisung – Ciseel – Citanduy yang terbagi dalam kawasan DAS yaitu:

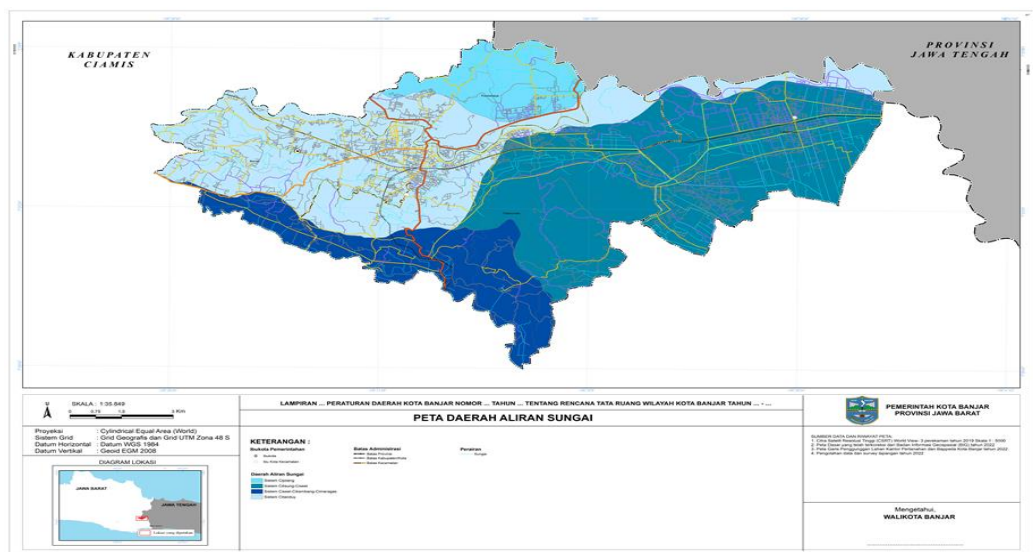
- DAS bagian hulu Kota Banjar yaitu DAS Citanduy 4.684,91 Ha yang tersebar di Kecamatan Pataruman bagian barat dan Kecamatan Langensari;
- DAS di bagian tengah Kota Banjar yaitu DAS Cijolang – Citapen yang berada di Kecamatan Purwaharja, DAS Cilisung yang berada di Kecamatan Langensari dan Kecamatan Pataruman bagian timur;
- DAS bagian hilir di bagian selatan Kota Banjar yaitu di sebagian DAS Ciseel-Cikembang yang areanya mencakup : sebagian kecil Kecamatan Banjar di bagian selatan (sebagian Desa Situbatu



dan Neglasari), sebagian kecil Kecamatan Pataruman bagian selatan (sebagian Desa Binangun, Batulawang).

Secara umum cakupan area masing-masing sistem hidrologi/aliran air di Kota Banjar adalah sebagai berikut :

1. **Sistem Citanduy**, yaitu arah aliran hidrologi/drainase yang menuju langsung ke Sungai Citanduy.
2. **Sistem Cijolang**, yaitu arah aliran hidrologi/drainase yang menuju ke Sungai Cijolang melalui Sungai Citapen dan yang dibatasi tanggul Sungai Cijolang.
3. **Sistem Ciseel-Cikembang-Cimaragas**, yaitu arah aliran hidrologi/drainase yang menuju langsung ke Sungai Ciseel-Cikembang-Cimaragas.
4. **Sistem Cilisung**, yaitu arah aliran hidrologi/drainase yang menuju ke Sungai Cilisung yang selanjutnya ke Ciseel/Citanduy di bagian hilir di luar wilayah Kota Banjar.



Gambar 2.12 Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

2.1.2 Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data

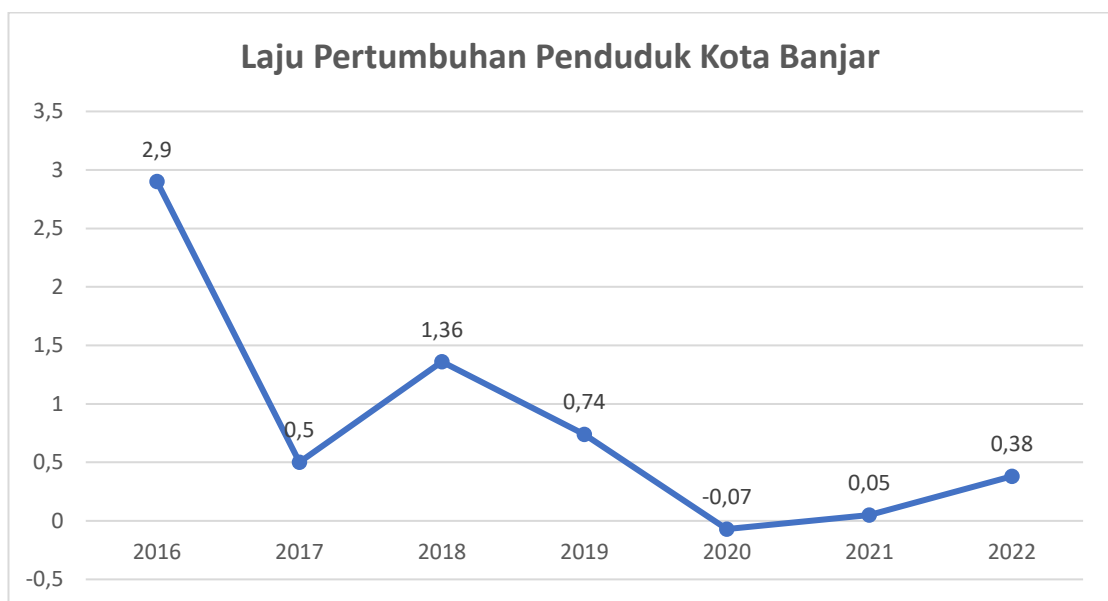


Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK Semester I Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Banjar pada tahun 2022 mencapai 206.370 jiwa atau meningkat sebanyak 791 jiwa jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2021 yang mencapai 205.579 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjar di tahun 2022 pada semester pertama sebesar 0,38%.

Adapun yang menjadi faktor penyebab pertumbuhan penduduk, antara lain kelahiran (fertilitas/natalitas), kematian (mortalitas) dan migrasi (perpindahan). Kelahiran dan kematian disebut faktor alami atau faktor demografi, sedangkan migrasi disebut faktor non alami atau non demografi, sedangkan pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang diperhitungkan dari selisih antara kelahiran, kematian, dan migrasi (imigrasi dan emigrasi).

2.1.2.1 Pertumbuhan Penduduk

Karakteristik demografi sebuah wilayah umumnya tercermin melalui beberapa faktor seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan populasi, komposisi usia penduduk, distribusi geografis, dan keadaan ketenagakerjaan.



Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjar

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, 2016-2022



Selama periode yang diamati yaitu tahun 2016-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjar menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada awal periode, tahun 2016, Pertumbuhan penduduk mencapai titik tertingginya di angka 2,9, namun situasinya berubah secara signifikan pada tahun 2017 ketika laju pertumbuhan penduduk tiba-tiba menurun tajam menjadi 0,5. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 1,36. Tetapi, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali menjadi masing masing 0,74 dan -0,07. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingkat kematian di Kota Banjar tinggi. Kemudian tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan sedikit menjadi masing-masing 0,05 dan 0,38.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjar yang fluktuatif selama periode tersebut mencerminkan dedikasi dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta pihak terkait untuk mengendalikan jumlah penduduk di Kota Banjar. Faktor-faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk meliputi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung meningkatkan pertumbuhan penduduk, sementara tingkat kematian yang rendah juga berkontribusi pada pertumbuhan yang cepat. Selain itu, masuknya penduduk dari luar (imigrasi) ke suatu wilayah akan meningkatkan jumlah penduduk, sementara migrasi keluar (emigrasi) akan mengurangi jumlah penduduk.

2.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *crude population density* (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan



pada suatu wilayah administrasi. Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi.



Gambar 2. 14 Kepadatan Penduduk Kota Banjar

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, 2016-2022

Selama periode yang dijadikan sebagai sampel, tercatat bahwa kepadatan penduduk Kota Banjar menunjukkan kenaikan yang berlangsung mulai dari tahun 2016-2022. Meskipun begitu, terdapat penurunan kecil pada tahun 2017, dimana kepadatan penduduk menurun dari 1.533,37 menjadi 1.526,00. Penurunan kepadatan penduduk bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti migrasi penduduk keluar dari suatu daerah, tingkat kelahiran yang menurun, atau bahkan penurunan akibat peristiwa tertentu seperti bencana alam atau perubahan kebijakan migrasi. Faktor-faktor ini bisa



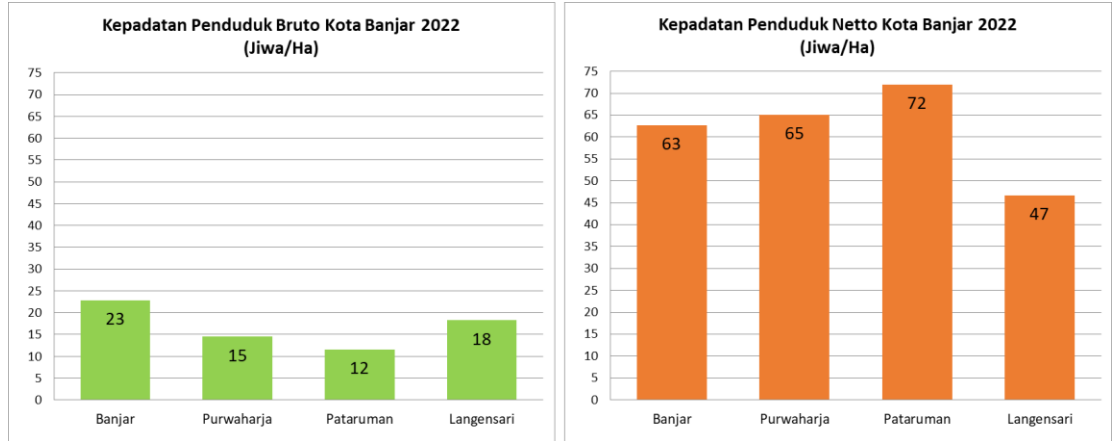
memengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah dan berdampak pada kepadatan penduduknya. Misalnya, jika terjadi migrasi besar-besaran keluar dari suatu kota atau wilayah, hal itu bisa menurunkan kepadatan penduduknya. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa yang mengurangi jumlah penduduk secara signifikan, seperti bencana alam yang menyebabkan banyak orang meninggalkan wilayah tertentu.

Angka tertinggi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa saat ini kepadatan penduduk di Kota Banjar sudah mencapai 1.563,76. Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa Kota Banjar memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak dibandingkan dengan luas wilayahnya. Hal ini sering kali mengindikasikan tingkat urbanisasi yang tinggi, infrastruktur yang padat, dan permukiman yang padat. Kepadatan penduduk yang tinggi juga bisa menjadi indikator tingginya aktivitas ekonomi dan sosial dalam wilayah tersebut.

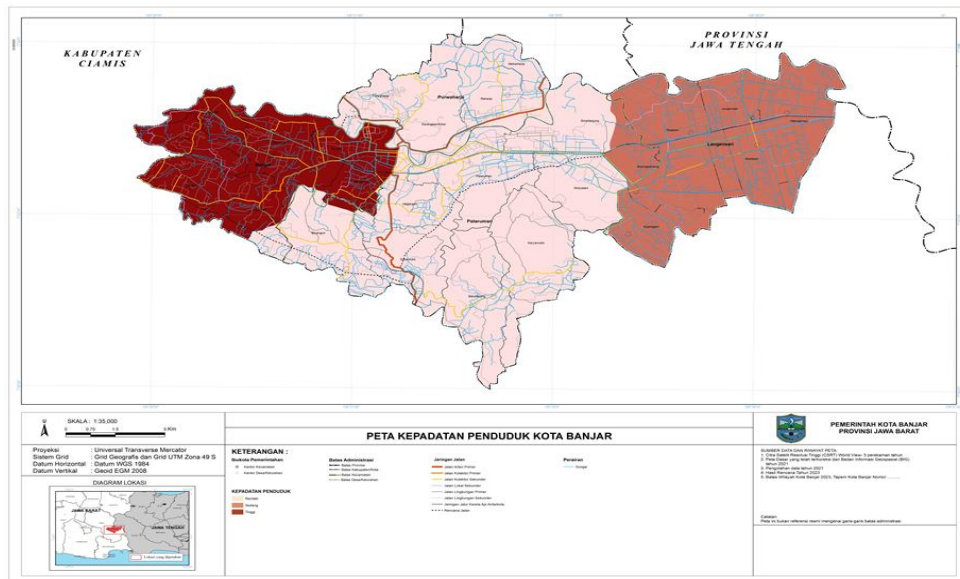
Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Kota Banjar Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Terbangun (Ha)*	Kepadatan Penduduk Bruto Tahun 2022 (Jiwa/Ha)	Kepadatan Penduduk Netto Tahun 2022 (Jiwa/Ha)*	Kepadatan Penduduk Rata - Rata Tahun 2013 - 2022 BRUTO (Jiwa/Ha)	Kepadatan Penduduk Rata - Rata Tahun 2013 - 2022 NETTO (Jiwa/Ha)
1	Banjar	59.800	2.612,58	953,85	23	63	22	61
2	Purwaharja	24.990	1.718,83	384,06	15	65	14	62
3	Pataruman	62.800	5.406,78	873,05	12	72	11	70
4	Langensari	58.870	3.220,45	1.260,74	18	47	18	45
<i>Kota Banjar</i>		<i>206.460</i>	<i>12.958,63</i>	<i>3.471,70</i>	<i>16</i>	<i>59</i>	<i>15</i>	<i>58</i>

Sumber : dokumen area terbangun dalam guna lahan Kota Banjar, 2022



Gambar 2. 15 Kepadatan Penduduk Kota Banjar
Sumber: dokumen area terbangun dalam guna lahan Kota Banjar, 2022



Gambar 2.16 Peta Kepadatan Penduduk di Kota Banjar

Sumber : Rancangan RTRW Kota Banjar 2024-2044 (diolah), 2023

2.1.2.3 Jumlah dan Sebaran

Jumlah penduduk di Kota Banjar tahun 2022 adalah sebesar 206.460 jiwa, tahun 2013 adalah sebesar 187.183 jiwa, tahun 2018 adalah sebesar 204.100 jiwa, dan tahun 2022 adalah sebesar 206.460 jiwa, dengan rata rata jumlah penduduk selama 10 tahun adalah sebesar 199.885 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak pada tahun 2022 adalah Kecamatan Pataruman yaitu



62.800 jiwa, dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Purwahaerja yaitu 24.990 jiwa.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kota Banjar Tahun 2013-2022

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banjar	53.939	55.255	56.778	58.222	58.084
2	Purwahaerja	22.344	22.966	23.414	24.108	24.253
3	Pataruman	57.410	58.750	60.332	61.773	61.333
4	Langensari	53.490	53.874	56.039	58.229	57.678
Kota Banjar		187.183	190.845	196.563	202.332	201.348

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)					Rata-rata
		2018	2019	2020*	2021*	2022	
1	Banjar	59.067	59.330	58.530	59.080	59.800	57.809
2	Purwahaerja	24.456	24.540	24.200	24.550	24.990	23.982
3	Pataruman	62.135	62.540	61.320	61.970	62.800	61.036
4	Langensari	58.442	59.220	56.930	57.810	58.870	57.058
Kota Banjar		204.100	205.630	200.980	203.410	206.460	199.885

Sumber : BPS Kota Banjar Dalam Angka Tahun 2014 – 2023

2.1.2.4 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan jumlah penduduk menurut klasifikasi jenis kelamin dan usia.

A. Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kota Banjar

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	8.093	7.821	15.914
2.	5-9	7.451	6.913	14.364
3.	10-14	7.881	7.363	15.244
4.	15-19	8.596	8.092	16.688
5.	20-24	8.779	8.164	16.943
6.	25-29	8.771	8.107	16.878
7.	30-34	7.861	7.600	15.461
8.	35-39	7.763	7.306	15.069
9.	40-44	6.791	6.620	13.411



No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10.	45-49	6.227	6.575	12..802
11.	50-54	6.005	6.683	12.688
12.	55-59	5.893	6.615	12.508
13.	60-64	4.984	5.306	10.290
14.	65-69	4.033	4.177	8.210
15.	70-74	2.335	2.680	5.015
16.	75+	2.110	2.862	4.972
Kota Banjar		103.573	102.884	206.457

Sumber : BPS Kota Banjar dalam angka (diolah), 2023

B. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dapat dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Banjar pada tahun 2022.

Tabel 2.15

Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Banjar

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Banjar	99,49
2	Purwahaerja	101,33
3	Pataruman	100,31
4	Langensari	101,99
	Kota Banjar	100,67

Sumber : BPS Kota Banjar dalam angka (diolah), 2023

C. Berdasarkan Usia

Komposisi penduduk berdasarkan usia produkti dan tidak produktif, dikeyahui angka beban ketergantungan usia nin produktif adalah mencapai 45, dimana artinya usia produktif dan usia non prdouktif cenderung setara. Hal ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menggerakkan perekonomian dan pembangunan Kota Banjar secara umum.



Tabel 2.16
Rasio Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kecamatan	Usia Tidak Produktif	Usia Produktif	Angka Beban Ketergantungan
		(0-14 & 65+ Th)	(15-64 Th)	
1	Banjar	18.456	41.343	46
2	Purwaharja	7.713	17.277	44
3	Pataruman	19.382	43.417	44
4	Langensari	18.169	40.700	45
Jumlah		63.719	142.738	45

Sumber : BPS Kota Banjar dalam angka (diolah), 2023

D. Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk di Kota Banjar dirinci menurut agama terdiri dari enam agama dan satu aliran kepercayaan. Agama yang terdapat di Kota Banjar yaitu Agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduk di Kota Banjar beragama Islam.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kecamatan	Penduduk						
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Kong hucu	Aliran Kepercayaan
1	Banjar	58.412	402	90	2	28	28	31
2	Purwaharja	24.088	136	27	15	4	4	6
3	Pataruman	53.335	551	104	10	31	31	37
4	Langensari	59.116	82	21	0	0	0	0
Jumlah		194.951	1.171	242	27	63	63	74

Sumber : BPS Kota Banjar dalam angka (diolah), 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merujuk pada faktor-faktor atau bagian-bagian yang berpengaruh terhadap mutu kehidupan dan kondisi umum sekelompok individu dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ini melibatkan sejumlah dimensi yang memengaruhi kesejahteraan secara sosial, ekonomi, fisik, mental, dan lingkungan masyarakat. Dimensi-dimensi ini saling terkait dan membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya guna mendorong kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merujuk pada kondisi umum keberlanjutan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi suatu individu, keluarga, atau masyarakat. Ini mencakup berbagai indikator, seperti tingkat penghasilan, lapangan pekerjaan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kestabilan harga barang dan jasa. Kesejahteraan ekonomi juga dapat diukur dengan melihat distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Secara umum, kesejahteraan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya dan meningkatkan mutu hidup secara berkelanjutan.

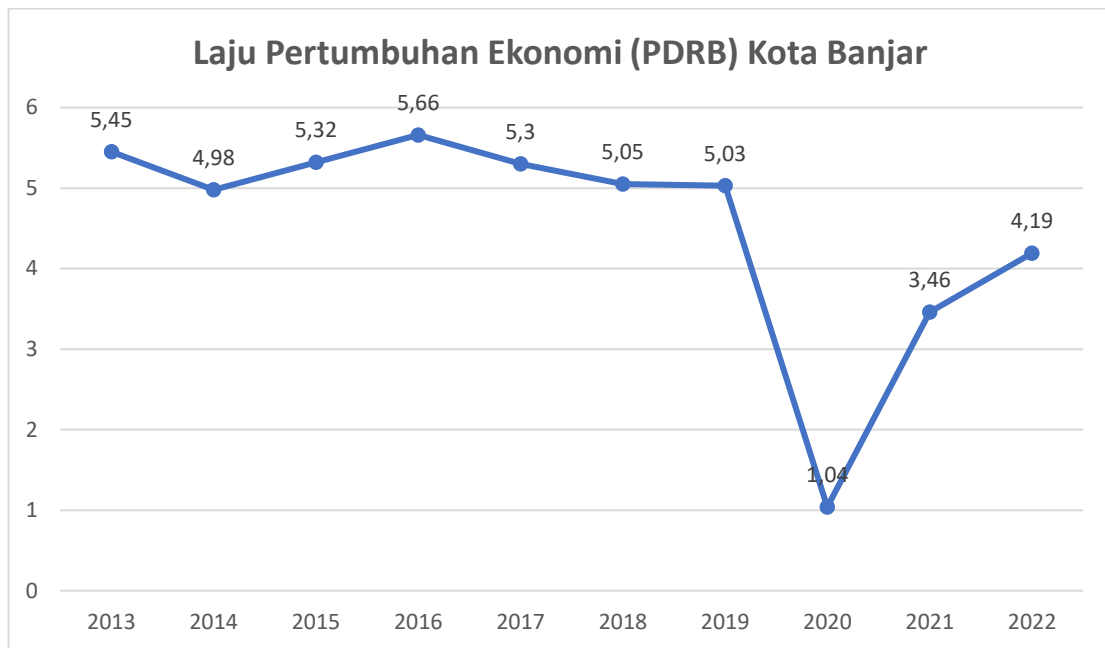
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan kemajuan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, selama suatu periode tertentu. PDRB dapat dihitung baik dengan dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. Secara esensial, PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh bisnis dan unit ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur menggunakan harga saat itu, sedangkan PDRB dengan dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga patokan pada tahun tertentu, yang di Indonesia adalah tahun 2000.

Pentingnya PDRB terletak pada kemampuannya memberikan wawasan mendalam tentang kinerja ekonomi suatu wilayah. Ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi. Melalui analisis PDRB, dapat diamati perubahan dalam nilai tambah ekonomi seiring waktu,



memberikan indikator yang signifikan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pembangunan dan upaya ekonomi lainnya.



Gambar 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Dilihat dari diagram di atas, perubahan PDRB Kota Banjar selama periode 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang mencolok. Pada awal periode, tahun 2013, PDRB mencapai puncaknya dengan angka 5,45. Kemudian, pada tahun 2014, terjadi penurunan yang relatif kecil. Namun, situasinya berubah secara drastis pada tahun 2015 ketika PDRB mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 5,66 pada tahun 2016. Peningkatan tersebut tidak berlangsung lama karena mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020. Setelah itu, PDRB Kota Banjar kembali mencatat angka positif sebesar 3,46 pada tahun 2021, yang diikuti oleh tren positif pada tahun berikutnya dengan pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 4,19. Pencapaian ini mungkin didukung oleh kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan di Kota Banjar.

Analisis data tersebut mencerminkan perjalanan PDRB Kota Banjar selama periode sepuluh tahun, menyoroti bagaimana fluktuasi

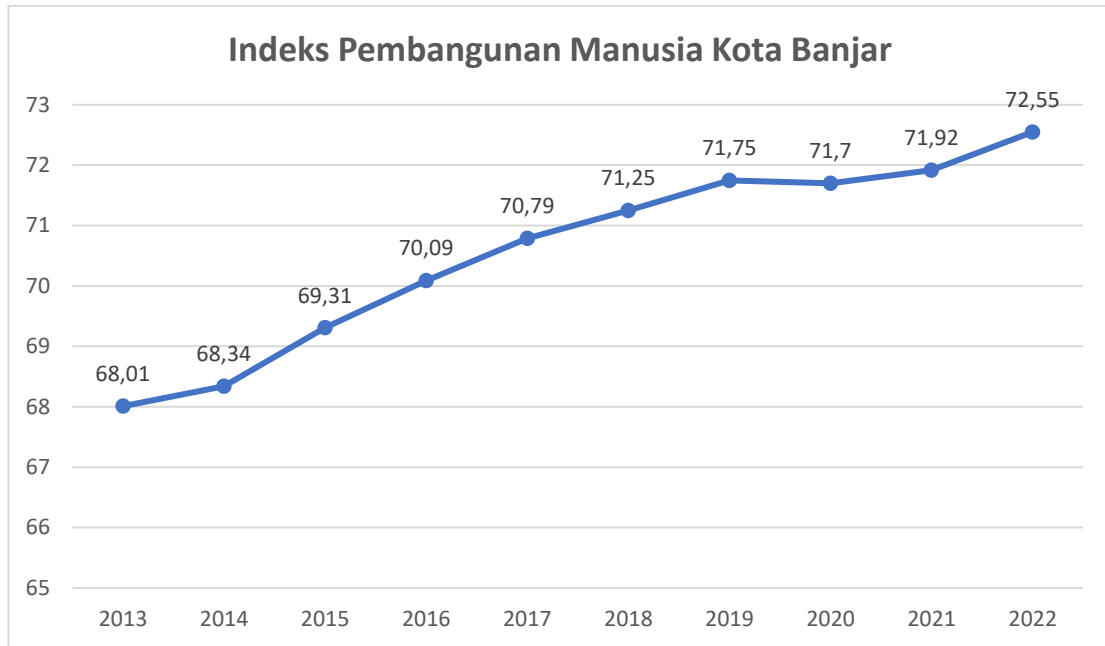


ekonomi yang signifikan dapat dipengaruhi oleh peristiwa luar seperti pandemi, serta kemampuan daerah untuk pulih dan tumbuh dalam situasi yang sulit. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang holistik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi PDRB suatu wilayah dan bagaimana pengelolaan ekonomi yang cerdas dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk membandingkan tingkat kualitas hidup dan kemajuan manusia di berbagai tingkatan, baik skala nasional maupun lokal. IPM melibatkan beberapa elemen utama seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, aspek pendidikan, dan standar hidup. Fungsi IPM tidak hanya terbatas pada evaluasi kemajuan tingkat nasional, melainkan juga memiliki peran yang signifikan dalam menilai perkembangan di tingkat daerah. IPM mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana suatu wilayah berkembang, dan dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat di suatu area.

Penggunaan IPM pada tingkat regional memungkinkan pemantauan perkembangan dan perbandingan antar berbagai wilayah di dalam suatu negara. Ini membantu pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih terkait pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IPM memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup penduduk dapat memengaruhi kemajuan daerah tersebut. Dengan demikian, IPM menjadi alat yang sangat berharga dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai wilayah.



Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Dalam periode pengamatan, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjar mengalami perkembangan yang menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Walaupun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan kecil, dengan IPM turun dari 71,75 menjadi 71,7. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, atau kesehatan di Kota Banjar pada periode tersebut. Meskipun begitu, kota ini berhasil pulih dan melanjutkan upayanya untuk meningkatkan IPM dengan konsistensi. Pada tahun 2022, IPM mencapai puncaknya dengan nilai 72,55, menandakan kemajuan dalam kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat Kota Banjar.

Peningkatan yang berkesinambungan dalam IPM Kota Banjar selama periode ini mencerminkan komitmen dan usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, Kota Banjar berhasil mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan

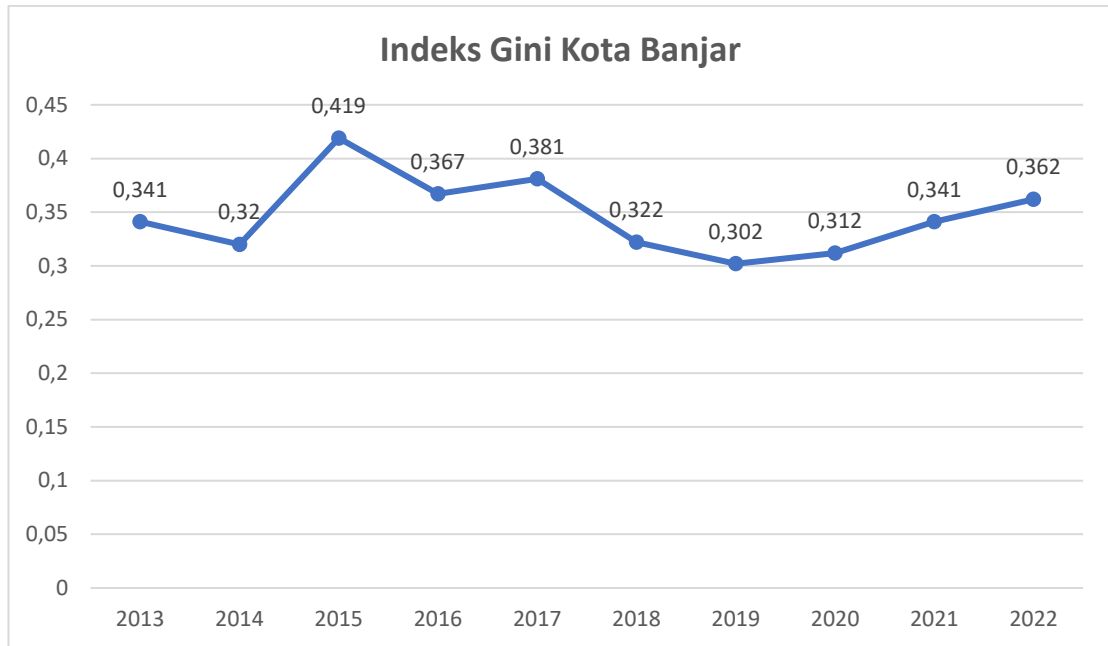


manusia secara menyeluruh. Hal ini memberikan indikasi positif tentang potensi pembangunan berkelanjutan dan upaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik bagi penduduk Kota Banjar di masa depan.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini, atau dikenal sebagai Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai disparitas pendapatan dalam suatu populasi. Indeks Gini memberikan gambaran sejauh mana pendapatan didistribusikan secara merata atau tidak merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang sangat merata, sementara 1 menandakan ketidaksetaraan pendapatan yang maksimum. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketidaksetaraan pendapatan.

Pentingnya Indeks Gini terletak pada kemampuannya memberikan wawasan tentang sejauh mana suatu negara atau daerah, termasuk tingkat kabupaten atau kota, dapat mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Dengan memahami Indeks Gini, pemerintah dapat merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih akurat untuk mengurangi disparitas pendapatan dan memajukan kesejahteraan sosial.



Gambar 2. 19 Indeks Gini Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

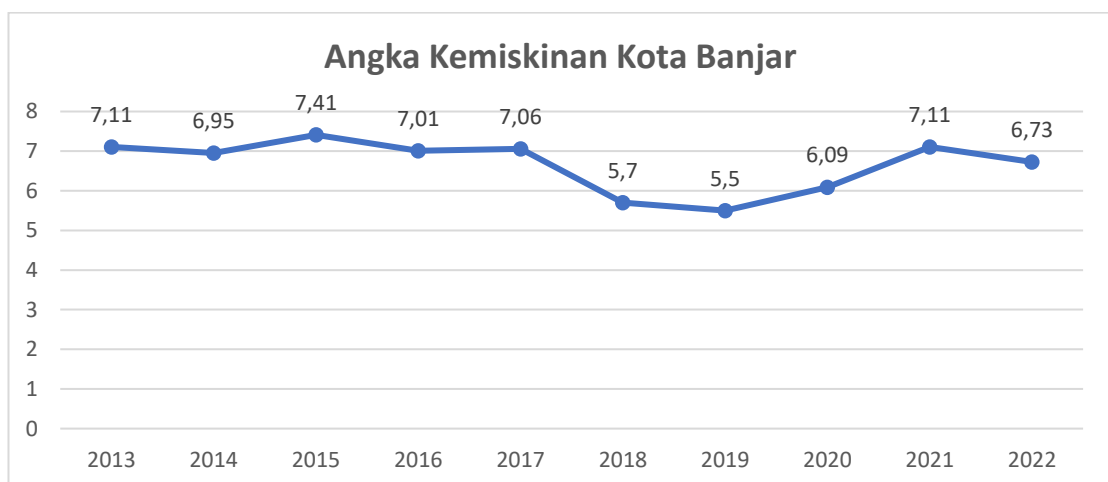
Berdasarkan data mengenai Indeks Gini Kota Banjar dari tahun 2013 hingga 2022, terlihat bahwa tingkat ketidaksetaraan pendapatan di daerah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun, terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2015, 2017, 2020, 2021, dan 2022, yang dapat disebabkan oleh dinamika kondisi sosial dan upaya mitigasi bencana alam yang belum optimal. Sebaliknya, pada tahun 2019, terjadi penurunan yang signifikan dalam angka Indeks Gini, mencerminkan kemajuan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di Kota Banjar selama periode yang diamati. Penanganan Indeks Gini memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Perubahan kebijakan yang tepat dan implementasi program yang efektif dapat membantu mencapai tujuan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dalam suatu masyarakat.



2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan mencakup tiga indikator makro yang umum digunakan, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Meskipun ketiganya digunakan, Persentase Penduduk Miskin (P0) menjadi indikator yang paling umum dan sering diterapkan. P0 adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dibandingkan dengan total penduduk suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan, langkah awal melibatkan perhitungan jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan indikator lain seperti Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah kemiskinan. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan rata-rata, sementara Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) mencerminkan tingkat ketidaksetaraan dalam tingkat pendapatan di antara kelompok penduduk miskin. Dengan mempertimbangkan berbagai indikator ini, analisis kemiskinan dapat menjadi lebih komprehensif, membuka potensi untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.



Gambar 2. 20 Angka Kemiskinan Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022



Berdasarkan data yang terlihat pada grafik di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Banjar mengalami penurunan yang signifikan selama periode tertentu. Namun, pada tahun 2015, 2017, 2020, dan 2021, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perlambatan ekonomi yang ditandai dengan inflasi, yang berdampak negatif terhadap indikator kesejahteraan di sektor riil. Pada tahun-tahun berikutnya, angka kemiskinan mengalami penurunan yang konsisten karena inflasi umum yang relatif rendah dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok pada periode yang sama.

Meskipun demikian, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi dampak besar dari pandemi COVID-19 yang melibatkan *lockdown* dan pembatasan aktivitas ekonomi. Situasi ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak orang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka kemiskinan. Namun, Kota Banjar berhasil mengatasi situasi tersebut dan berhasil mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan ini dalam menangani dampak Covid-19 dapat dijelaskan oleh adanya kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan pasca Covid-19.

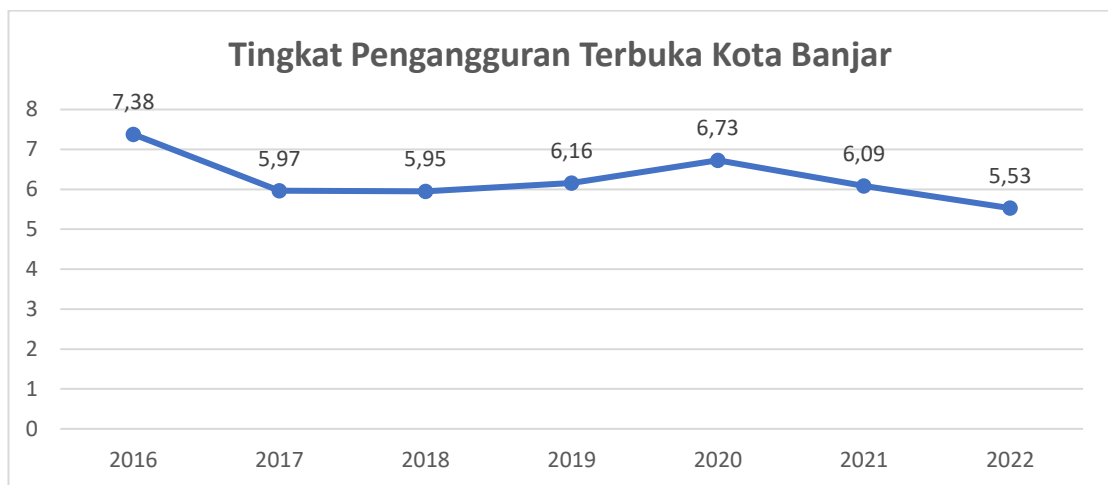
Data ini mencerminkan tekad pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat Kota Banjar dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti pandemi, Kota ini berhasil mengembangkan strategi dan program-program yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Penurunan signifikan dalam angka kemiskinan menjadi indikator positif dalam upaya menuju peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kota Banjar.



2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur persentase dari total angkatan kerja yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Angkatan kerja mencakup individu usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, individu yang tengah mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha baru, mereka yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi mereka, dan individu yang tidak mencari pekerjaan karena mereka sudah bekerja tetapi belum memulai aktivitas.

Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan langkah kritis dalam menganalisis situasi ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Hal ini membantu pemerintah, peneliti, dan organisasi lainnya untuk memahami ketersediaan lapangan kerja, tingkat ketidaksetaraan dalam akses ke pekerjaan, dan dampak kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, data mengenai tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan kebijakan dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam masyarakat.



Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022



Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Kota Banjar mengalami penurunan yang signifikan. Perkembangan ini terlihat melalui angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjar yang menunjukkan tren penurunan pada tahun 2021 dan 2022, meskipun terdapat beberapa tahun dengan peningkatan, hal ini dapat disebabkan oleh inflasi, kualitas SDM yang belum kompeten, dan jumlah pencari kerja yang melebihi lapangan pekerjaan yang tersedia, menunjukkan minimnya industri di Kota Banjar.

Namun, setelah periode peningkatan tersebut, terjadi penurunan TPT pada tahun-tahun berikutnya. Upaya penurunan TPT ini diikuti dengan prioritas penanganan isu kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan dasar, dan pembangunan ekonomi di Kota Banjar. Pada tahun 2022, TPT mencapai 5,53%, menunjukkan hasil positif dari upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Penurunan yang signifikan dalam TPT mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan peningkatan peluang kerja bagi penduduk setempat. Meskipun terdapat variasi tahunan dalam data, tren keseluruhan menunjukkan efektivitas kebijakan dan program-program yang ditujukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Banjar. Hal ini memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

2.2.1.6 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani merujuk pada perbandingan antara harga hasil pertanian yang diterima oleh petani dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh mereka untuk menghasilkan komoditas tersebut. Secara esensial, nilai tukar petani mencerminkan seberapa efisien dan menguntungkan kegiatan pertanian bagi para petani. Jika nilai tukar petani tinggi, berarti pendapatan dari hasil pertanian lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi, memberikan insentif positif bagi



petani untuk terus mengembangkan usahanya. Sebaliknya, jika nilai tukar petani rendah, petani mungkin menghadapi tantangan ekonomi dan perlu mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi atau mencari alternatif penghasilan. Faktor-faktor seperti kebijakan harga, teknologi pertanian, kondisi pasar, dan iklim dapat memengaruhi nilai tukar petani. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman yang cermat terhadap nilai tukar petani merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan dari sektor pertanian meliputi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan menjadi potensi dan peluang dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 18
Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Banjar

Indikator	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	n/a	n/a	895,38	887,22	459,75
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	n/a	n/a	-22,68	-20	12,5

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Berdasarkan data diatas, produktivitas pertanian mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2021. Perubahan iklim cuaca yang tidak menentu dapat memengaruhi kegiatan sektor pertanian. Kondisi ini memengaruhi musim tanam dan panen yang menyebabkan petani harus dapat memprediksi dan menyesuaikan cuaca yang terjadi untuk melakukan kegiatan pertanian.



2.2.1.7 Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai tukar pembudidaya ikan merujuk pada perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh para pembudidaya ikan dari penjualan hasil budidaya mereka dengan biaya produksi dan usaha yang dikeluarkan dalam proses budidaya ikan. Secara esensial, nilai tukar pembudidaya ikan mencerminkan seberapa efisien dan menguntungkannya kegiatan budidaya ikan bagi para pembudidaya. Jika nilai tukar pembudidaya ikan tinggi, artinya pendapatan dari hasil budidaya ikan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi, memberikan dorongan positif bagi pembudidaya untuk terus mengembangkan usaha budidaya ikan. Sebaliknya, jika nilai tukar pembudidaya ikan rendah, pembudidaya ikan mungkin menghadapi tantangan ekonomi dan perlu mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi atau mencari alternatif penghasilan.

Faktor-faktor seperti teknologi budidaya, manajemen tambak, kebijakan sektor perikanan, dan kondisi pasar dapat memengaruhi nilai tukar pembudidaya ikan. Oleh karena itu, pemantauan dan pemahaman yang cermat terhadap nilai tukar pembudidaya ikan merupakan aspek penting dalam mendukung keberlanjutan sektor budidaya ikan dan kesejahteraan para pembudidaya.

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termasuk produksi yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Kota Banjar memiliki Sungai Citanduy yang dapat digunakan sebagai potensi sektor perikanan di Kota Banjar. Berikut merupakan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Banjar.



Tabel 2. 19
Produksi Perikanan Kota Banjar

Indikator	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	n/a	n/a	2.206	2.182,72	2.267,22

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Berdasarkan data diatas, jumlah produksi ikan tidak menentu atau fluktuatif di setiap tahunnya. Tahun 2020 jumlah produksi ikan mencapai 2.206, mengalami penurunan di tahun 2021 mencapai 2.182,72. Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2022 sebanyak 2.267,22. Jumlah produksi ikan yang tidak menentu disebabkan iklim cuaca yang tidak menentu saat ini.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat, yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya. Ini mencakup berbagai dimensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi kehidupan sosial, perkembangan budaya, dan keadilan sosial di dalam suatu masyarakat. Aspek-aspek kesejahteraan sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, keadilan, hak asasi manusia, keberagaman budaya, pemberdayaan masyarakat, dan interaksi sosial yang positif.

Kesejahteraan sosial budaya melibatkan penilaian terhadap tingkat kepuasan hidup masyarakat, kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang, serta dukungan terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial budaya seringkali melibatkan kebijakan dan program-program yang mendukung pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan yang merata, promosi keberagaman budaya, perlindungan



hak asasi manusia, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja bidang Sosial di Kota Banjar

Indikator	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	n/a	n/a	98,55	28,32	98,787
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Dengan memerhatikan aspek sosial dan budaya secara bersamaan, kesejahteraan sosial budaya mengakui bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi tetapi juga terkait erat dengan nilai-nilai, norma, dan interaksi sosial yang membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

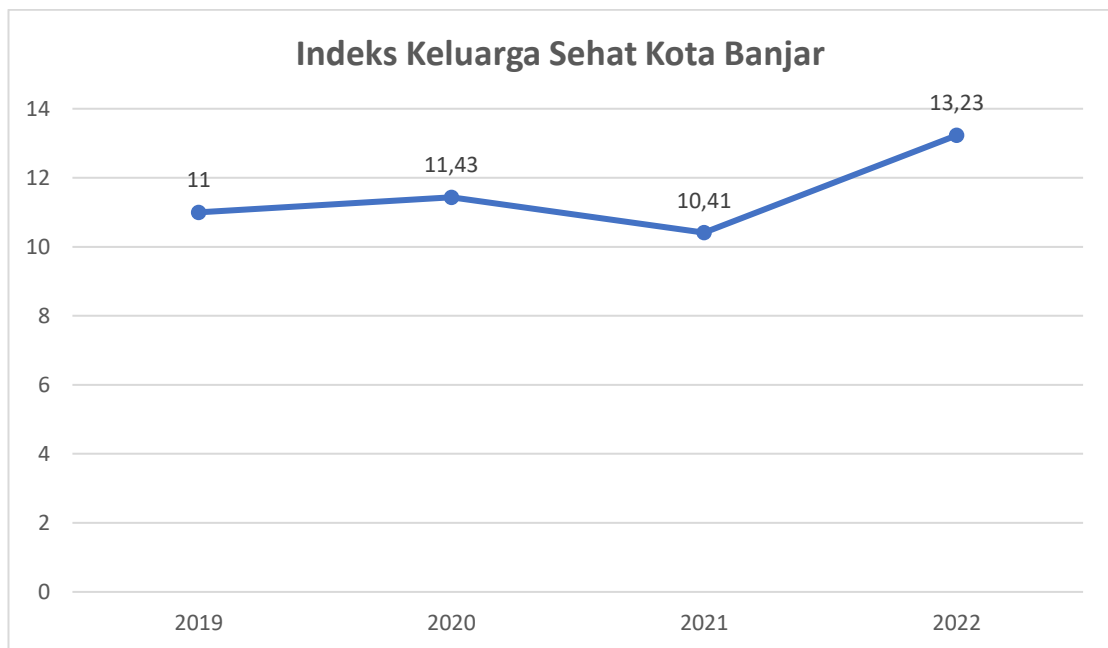
2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan kondisi fisik, mental, dan sosial anggota keluarga, serta kualitas lingkungan tempat tinggal. Komponen-komponen dalam Indeks Keluarga Sehat mungkin mencakup ketersediaan akses pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, pola makan, akses sanitasi, serta hubungan interpersonal di dalam keluarga.

Pengukuran Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang kesejahteraan keluarga, menggambarkan sejauh mana kebutuhan dasar seperti kesehatan



dan pendidikan terpenuhi. Melalui Indeks Keluarga Sehat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan memerhatikan berbagai aspek ini, Indeks Keluarga Sehat dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.



Gambar 2. 22 Indeks Keluarga Sehat Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Berdasarkan data yang terlihat pada grafik, terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada Indeks Keluarga Sehat di Kota Banjar selama beberapa periode tertentu. Namun, pada tahun 2021, terdapat penurunan yang cukup mencolok. Faktor yang menyebabkan penurunan ini melibatkan kesulitan ekonomi dalam keluarga, masalah kesehatan anggota keluarga, dan ketidaksetaraan gender, yang semuanya dapat berdampak negatif pada dinamika dan keharmonisan keluarga, termasuk meningkatkan konflik internal.



Pada tahun berikutnya, tahun 2022, terlihat bahwa terjadi peningkatan pada Indeks Keluarga Sehat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga yang relatif lebih baik. Langkah-langkah konkret seperti perbaikan kondisi ekonomi keluarga, upaya pencegahan dan perawatan kesehatan yang lebih baik, serta usaha untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dapat menjadi faktor penentu dalam perbaikan ini.

Dalam konteks ini, perencanaan dan pelaksanaan program-program yang mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh menjadi sangat penting. Strategi yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat membantu meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan keluarga.

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga adalah suatu metrik atau pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hubungan dalam suatu keluarga. Indeks ini mencakup sejumlah dimensi dan faktor yang mencerminkan dinamika internal keluarga, termasuk komunikasi, interaksi antaranggota keluarga, kesehatan emosional, dukungan sosial, dan pola hubungan keluarga. Melalui penilaian berbagai aspek ini, Indeks Kualitas Keluarga bertujuan memberikan gambaran holistik tentang keadaan kesejahteraan dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Pengukuran Indeks Kualitas Keluarga dapat mencakup pertanyaan atau parameter-parameter tertentu yang memberikan *insight* tentang tingkat kepuasan dan kebahagiaan anggota keluarga, tingkat dukungan yang mereka rasakan, serta sejauh mana kebutuhan emosional dan psikologis terpenuhi dalam lingkungan



keluarga tersebut. Hasil dari Indeks Kualitas Keluarga dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga sosial, atau peneliti untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
TFR (Angka Kelahiran Total)	n/a	n/a	1,93	2,02	1,97
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	n/a	n/a	76,59	77,42	79,428
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	n/a	n/a	11,21	12,02	8,278

Dengan memahami kualitas keluarga secara komprehensif, Indeks Kualitas Keluarga dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang program-program dukungan keluarga dan kebijakan-kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari dan hubungan dalam keluarga.

2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan kondisi kehidupan dan perlindungan hak anak, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta partisipasi anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Komponen-komponen ini memberikan gambaran holistik tentang upaya sebuah negara atau wilayah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak.



Tabel 2.22
Capaian Bidang Perlindungan Anak

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a	n/a	32,77	21,81	15,894
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	n/a	n/a	0,03	0,02	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	n/a	n/a	3,92	3,91	5,81

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

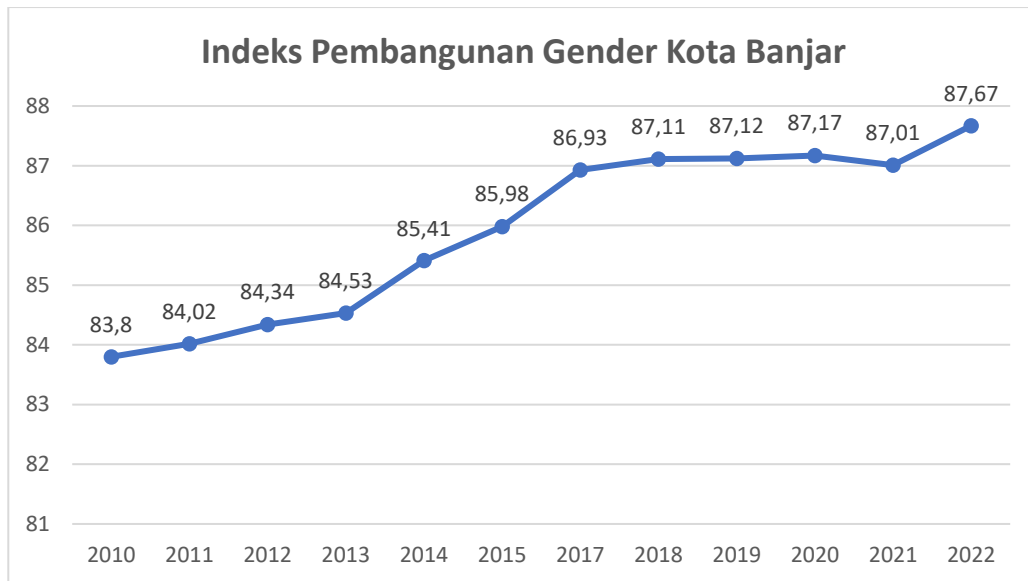
Pengukuran Indeks Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tingkat perlindungan dan kesejahteraan anak, memungkinkan pemantauan terhadap perkembangan kondisi anak-anak dari waktu ke waktu. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perlindungan anak, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kondisi anak-anak. Indeks Perlindungan Anak juga menjadi alat penting dalam advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendesak perlunya perlindungan hak anak sebagai prioritas utama.

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan dalam suatu masyarakat atau negara, utamanya dalam hal ini adalah mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. IPG terdiri dari beberapa dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi dalam kegiatan politik. IPG memberikan informasi tentang kesenjangan gender yang terdapat dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam



rangka meningkatkan kesetaraan gender. Perkembangan capaian IPM dan IPG dalam hal ini sering kali berbeda dengan melihat dari rasio keduanya. IPG memberikan informasi mengenai kesenjangan gender yang ada di masyarakat dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kesetaraan gender.



Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Gender Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Berdasarkan analisis data grafik, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Gender di Kota Banjar mengalami peningkatan yang konsisten selama beberapa periode tertentu. Meskipun demikian, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan dimana Indeks Pembangunan Gender turun sebesar 0,16 selama kurun waktu tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kondisi pembangunan manusia di Kota Banjar pada periode tersebut.

Namun, pada tahun 2022, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara berkelanjutan hingga mencapai angka 87,67. Hal ini mengindikasikan bahwa status capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Banjar termasuk dalam kategori Kesetaraan Tinggi ($|IPG-100| \leq 2,5$). Peningkatan ini



mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di Kota Banjar.

Peran aktif masyarakat serta berbagai elemen, seperti partisipasi masyarakat dalam program pendampingan yang diadakan oleh pemerintah daerah Kota Banjar, komunitas religi, dan komunitas orang tua, turut berkontribusi dalam mendukung pengarusutamaan gender yang telah terlaksana di Kota Banjar. Meskipun telah banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, masih diperlukan upaya lebih lanjut melalui kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga atau komunitas masyarakat.

2.2.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender

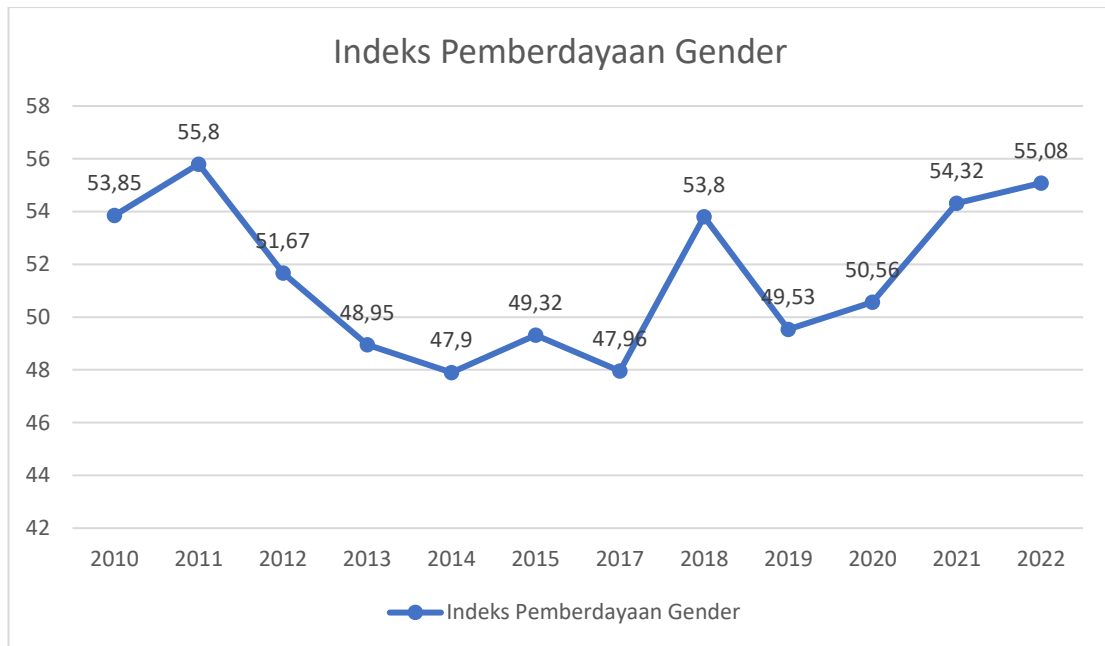
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. IPG mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan tingkat partisipasi, kontrol, dan akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Indeks ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman holistik tentang sejauh mana perempuan memiliki kemampuan untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam pengukuran IPG, dimensi pemberdayaan perempuan dapat mencakup partisipasi politik, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi. Setiap dimensi diberi bobot sesuai dengan tingkat pentingnya dalam konteks pemberdayaan gender. Indeks ini memberikan nilai numerik untuk setiap dimensi dan menciptakan gambaran keseluruhan tentang tingkat pemberdayaan perempuan.

Penggunaan IPG membantu dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan dan hambatan-hambatan yang menghambat pemberdayaan perempuan. Hasil dari IPG dapat digunakan sebagai



dasar untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih efektif, serta untuk memonitor kemajuan dalam mencapai tujuan kesetaraan gender. IPG merupakan alat penting dalam upaya global untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sebanding dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.



Gambar 2. 24 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2010 hingga tahun 2022. Pada tahun 2010, capaian indeks pemberdayaan gender mencapai 53,85, menunjukkan tingkat pemberdayaan yang relatif sedang. Tahun 2011 mencatat peningkatan menjadi 55,8, mencerminkan perbaikan dalam aspek-aspek pemberdayaan gender. Namun, pada tahun 2012, terjadi penurunan menjadi 51,67, menandakan adanya tantangan atau dinamika yang memengaruhi tingkat pemberdayaan gender pada periode tersebut. Pada tahun 2013 dan 2014, terus terjadi penurunan dengan capaian masing-masing sebesar 48,95 dan 47,9. Tren positif terlihat pada tahun 2015 dengan capaian 49,32, namun tahun 2017 mencatat kembali penurunan menjadi 47,96. Pada tahun 2018, terjadi



peningkatan signifikan menjadi 53,8, menunjukkan adanya perbaikan substansial dalam pemberdayaan gender. Tahun 2019 mencatat penurunan kembali menjadi 49,53, tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2020 dengan capaian 50,56. Pada tahun 2021, capaian indeks meningkat menjadi 54,32, menandakan adanya kesinambungan upaya peningkatan pemberdayaan gender. Pada tahun 2022, indeks pemberdayaan gender mencapai 55,08, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dan kemajuan dalam mencapai tujuan pemberdayaan gender di periode terkini. Analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pemberdayaan gender di masa depan.

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

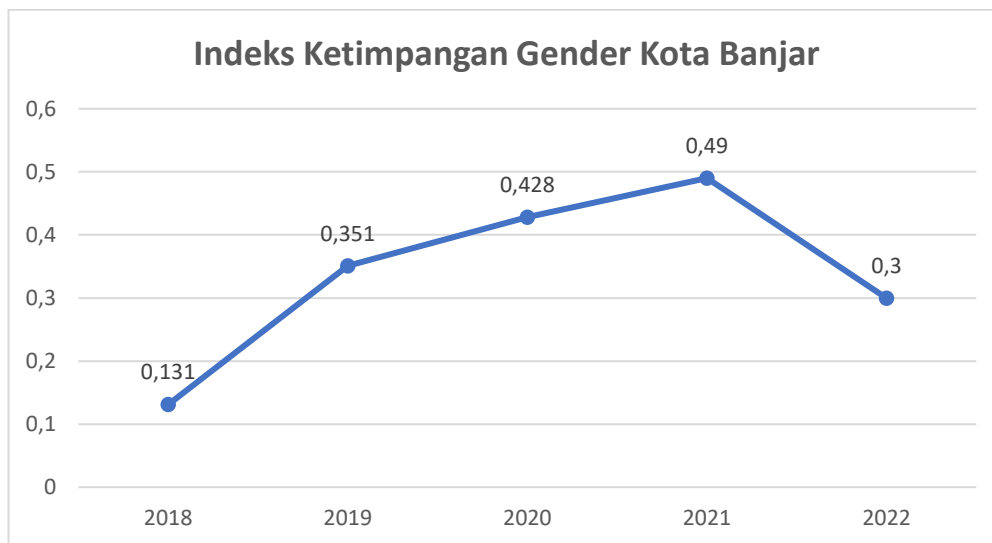
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. IKG mencakup sejumlah dimensi kunci seperti pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Tujuan utama dari IKG adalah memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana terdapat ketidaksetaraan gender di suatu negara atau wilayah.

Dalam pengukuran IKG, setiap dimensi diberi bobot berdasarkan signifikansinya terhadap ketidaksetaraan gender secara keseluruhan. Nilai IKG dihitung dengan membandingkan indikator-indikator kesejahteraan perempuan dan laki-laki dalam setiap dimensi, dan hasilnya mencerminkan tingkat ketidaksetaraan gender. Indeks ini memberikan wawasan yang mendalam tentang perbedaan yang mungkin ada dalam akses, kesempatan, dan hasil antara perempuan dan laki-laki.

Penggunaan IKG membantu pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi area-area



yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka mengurangi ketidaksetaraan gender. Dengan memahami dimensi-dimensi ketidaksetaraan tersebut, langkah-langkah kebijakan dan program dapat dirancang untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. IKG berperan sebagai alat yang penting dalam mendukung upaya global untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.



Gambar 2. 25 Indeks Ketimpangan Gender Kota Banjar

Sumber: LPPD Kota Banjar, 2013-2022

Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan variasi yang signifikan selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, capaian indeks ketimpangan gender relatif rendah, yaitu 0,131, menandakan tingkat ketimpangan gender yang lebih terkendali. Namun, terjadi lonjakan yang cukup besar pada tahun 2019 dengan capaian mencapai 0,351, mencerminkan adanya peningkatan ketidaksetaraan gender pada tahun tersebut. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2020, dimana indeks ketimpangan gender mencapai 0,428, menandakan adanya ketidaksetaraan yang lebih tinggi di berbagai aspek kehidupan. Tahun 2021 mencatat IKG tertinggi dalam periode 2018-2022 dengan indeks mencapai 0,49, mencerminkan semakin buruknya ketidaksetaraan gender yang



terjadi di Kota Banjar. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 0,3, menunjukkan adanya perbaikan yang tajam dalam mengurangi tingkat ketimpangan gender. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini dapat memberikan wawasan penting untuk merancang kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan mencapai kesetaraan yang lebih baik di masa depan.

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kondisi, partisipasi, serta kontribusi pemuda dalam pembangunan suatu negara atau wilayah. IPP mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan aspek-aspek penting dari kesejahteraan dan perkembangan pemuda, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan politik.

Tabel 2.23
Capaian Bidang Kepemudaan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	0,37	0,4	0,89	n/a
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	n/a	n/a	15,72	16,05	n/a

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Dalam pengukuran IPP, setiap dimensi diberi bobot sesuai dengan tingkat pentingnya dalam kontribusi pemuda terhadap pembangunan. Indeks ini membantu memberikan gambaran holistik tentang sejauh mana pemuda dapat mengakses kesempatan dan sumber daya yang mendukung pertumbuhan dan kontribusi mereka dalam masyarakat. IPP memainkan peran kunci dalam memahami tantangan dan potensi pemuda, serta dalam merancang kebijakan dan



program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kontribusi positif pemuda dalam pembangunan berkelanjutan.

Penggunaan IPP membantu pemerintah, lembaga pembangunan, dan organisasi lainnya untuk merancang strategi dan program yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan pemuda. Selain itu, IPP dapat digunakan sebagai alat pemantauan untuk mengukur dampak kebijakan dan intervensi tertentu terhadap pembangunan pemuda dari waktu ke waktu. Dengan memahami dinamika dan kebutuhan pemuda, IPP berperan sebagai panduan untuk merancang langkah-langkah konkret yang mendukung perkembangan positif dan kontribusi pemuda dalam masyarakat.

2.2.2.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan dan pelestarian kebudayaan suatu negara atau wilayah. IPK mencakup berbagai dimensi yang mencerminkan aspek-aspek kultural yang penting, seperti pelestarian warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta investasi dalam pendidikan dan promosi seni dan budaya.

Dalam pengukuran IPK, setiap dimensi diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam mendukung perkembangan dan pelestarian kebudayaan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana kebudayaan suatu komunitas atau negara dapat berkembang dan dijaga. IPK memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan kebudayaan, melibatkan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai bentuk ekspresi dan warisan budaya.



Tabel 2.24
Capaian Bidang Kebudayaan

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Terlestarikannya Cagar Budaya	n/a	100	100	n/a	n/a

Sumber: LPPD Kota Banjar Tahun 2019-2022

Penggunaan IPK membantu pemerintah, lembaga kebudayaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh kebudayaan, IPK memberikan dasar untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan kebudayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. IPK juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur dampak inisiatif dan kebijakan kebudayaan terhadap perkembangan dan pelestarian kekayaan budaya suatu wilayah.

2.3 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan indikator kinerja pembangunan. Aspek daya saing daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dalam berbagai aspek seperti ekonomi, SDM, infrastruktur wilayah, dan iklim lingkungan. Aspek daya saing daerah ini penting untuk menentukan sejauh mana wilayah tersebut dapat bertahan dan berkembang dalam konteks global atau nasional. Berikut penjelasan aspek daya saing daerah beserta indikator di masing-masing aspek.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

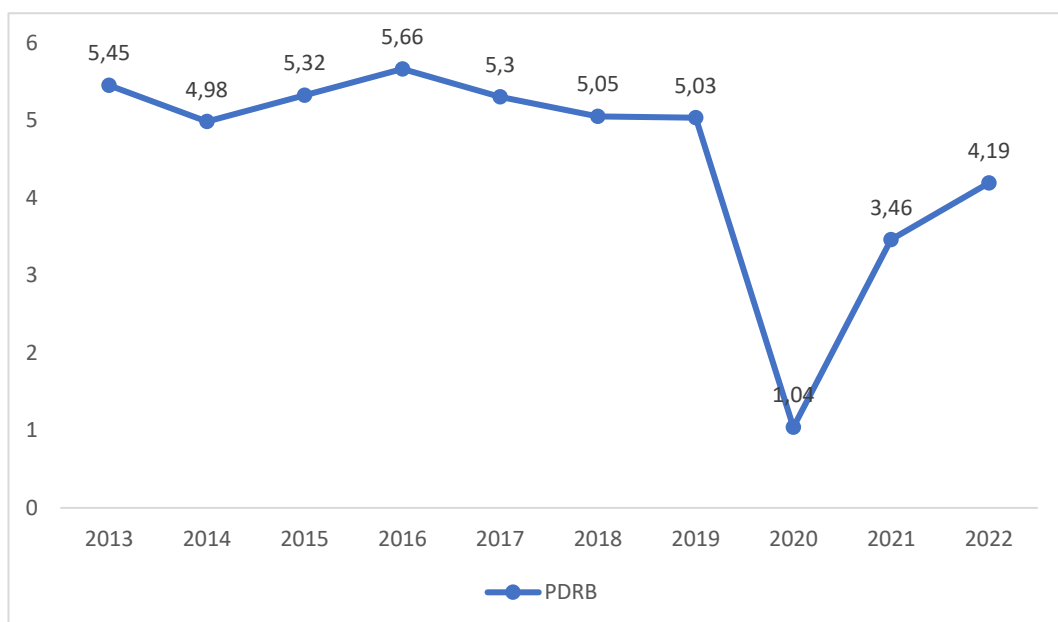
Aspek daya saing ekonomi daerah merupakan aspek kinerja daerah untuk melihat tingkat kemampuan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki



daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Adapun indikator yang mendukung aspek daya saing ekonomi daerah di antaranya:

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dan dengan periode waktu tertentu. Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung pada satu tahun tertentu dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. Berikut capaian PDRB Kota Banjar Tahun 2013-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 26 PDRB Kota Banjar Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kota Banjar; Kota Banjar dalam Angka 2022, 2023



Capaian PDRB Kota Banjar selama 10 tahun menunjukkan tren fluktuatif. tahun 2014 PDRB Kota Banjar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sebesar 4,98 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2016 yang menunjukkan angka 5,66. Selanjutnya mengalami penurunan kembali di tahun 2017 yakni di angka 5,3 dan terus mengalami penurunan di tahun 2019 yang menunjukkan angka 5,03. Penurunan PDRB Kota Banjar terjadi sangat signifikan di tahun 2020 hingga ke angka 1,04. Mulai tahun 2021-2022 PDRB Kota Banjar mengalami kenaikan kembali berturut-turut menunjukkan angka 3,46 dan 4,19.

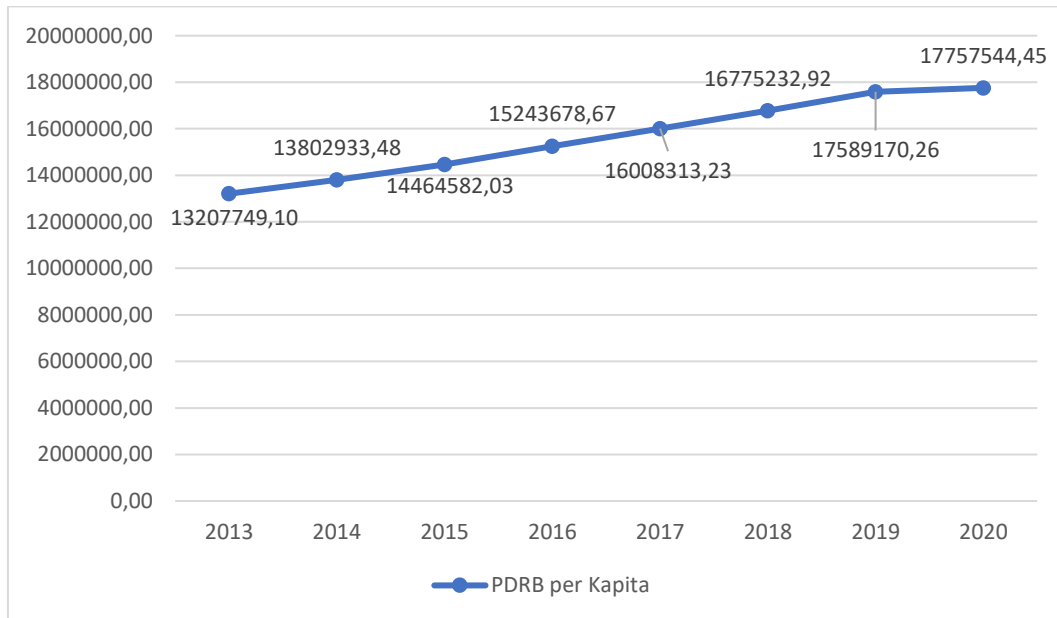
Penurunan signifikan PDRB Kota Banjar di tahun 2020 terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda wilayah seluruh Indonesia hingga global. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi juga menurun. PRDB mulai kembali mengalami peningkatan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Selain itu pemerintah juga melakukan upaya untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi sehingga dua tahun selanjutnya PDRB dapat mengalami peningkatan signifikan dengan cara meningkatkan akses perekonomian melalui penyediaan modal koperasi/UMKM, sarana prasarana teknologi dan pemasaran, promosi investasi dan peningkatan serapan tenaga kerja.

2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur. Pendapatan perkapita digunakan sebagai



tolak ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu wilayah. Pendapatan perkapita dihitung dari total penghasilan suatu wilayah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui rata-rata pendapatan penduduk di wilayah tersebut.



Gambar 2. 27 PDRB Per Kapita Kota Banjar Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Kota Banjar; Kota Banjar dalam Angka 2022, 2023

PDRB per kapita Kota Banjar selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya mulai tahun 2013-2020. Meskipun terjadi pandemic Covid-19 di tahun 2020, PDRB per kapita Kota Banjar tidak mengalami penurunan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan cukup signifikan, PDRB per kapita tahun 2020 hanya mengalami sedikit peningkatan dimana tahun 2019 mencapai Rp 17.589.170,26 dan tahun 2020 meningkat 0,95% mencapai Rp 17.757.544,45. Kenaikan PRDB per kapita menandakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kota Banjar mengalami peningkatan.



2.3.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

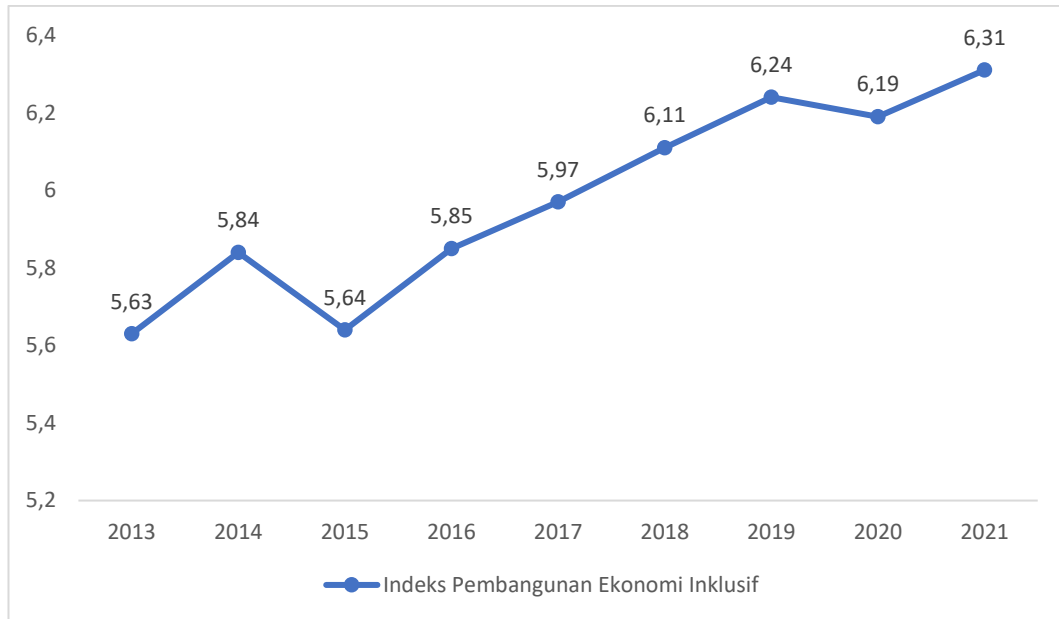
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks ini mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Untuk mengukur indeks pembangunan ekonomi inklusif terdiri dari 3 pilar dan 8 sub pilar yang disertai 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Adapun penjabaran 3 pilar indeks pembangunan ekonomi inklusif adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1: Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pada pilar 1 kemudian diturunkan ke dalam 3 sub pilar di antaranya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi. Pada masing-masing sub pilar tersebut juga disertai indikator pembentuknya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sub-pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi, disertai indikator pertumbuhan PRDB riil per kapita, *share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB Nominal.
 - b. Sub-pilar 1.2: Kesempatan kerja, disertai indikator tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas
 - c. Sub-pilar 1.3: Infrastruktur ekonomi, disertai indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, dan persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang
2. Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya



pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, maka ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Pada pilar 2 kemudian diturunkan ke dalam 2 sub-pilar yakni ketimpangan dan kemiskinan. Pada masing-masing sub-pilar disertai indikator dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sub-pilar 2.1: Ketimpangan, disertai indikator rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota
 - b. Sub-pilar 2.2: Kemiskinan, disertai indikator persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari
3. Pilar 3: Perluasan akses dan kesempatan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Pada pilar 3 kemudian diturunkan ke dalam 3 sub-pilar di antaranya kapabilitas manusia, infrastruktur dasar, dan keuangan inklusif. Pada masing-masing sub-pilar disertai indikator pembentuk, dengan rincian sebagai berikut:
- ii. Sub-pilar 3.1: Kapabilitas Manusia, disertai indikator angka harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.
 - iii. Sub-pilar 3.2: Infrastruktur Dasar, disertai indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak dan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri
 - iv. Sub-pilar 3.3: Keuangan Inklusif, disertai indikator rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif dan rasio kredit perbankan UMKM.



Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Banjar Tahun 2013-2021

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023

Berdasarkan data diatas, indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Banjar selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2015 – 2019 hingga mencapai angka 6,24 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 6,19 tetapi meningkat kembali di tahun 2021 hingga mencapai 6,31.

2.3.1.4 Indeks Ekonomi Hijau

Pengukuran indeks ekonomi hijau merupakan salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan menuju pembangunan berkelanjutan. Program pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth program*) mendukung dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah dalam hal berkelanjutan dan lingkungan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar, di antaranya ekonomi, sosial, dan lingkungan yang



mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Adapun rincian indikator dari masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

- a. Pilar sosial, terdiri dari 4 indikator di antaranya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah.
- b. Pilar ekonomi, terdiri dari 6 indikator di antaranya intensitas emisi, intensitas energi, dan PDRB per kapita.
- c. Pilar lingkungan, terdiri dari 5 indikator di antaranya tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

2.3.1.5 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan istilah yang mengacu pada perbandingan atau rasio antara jumlah wirausaha atau usaha baru yang muncul atau dibentuk dalam suatu wilayah atau sektor tertentu dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada di wilayah atau sektor tersebut.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

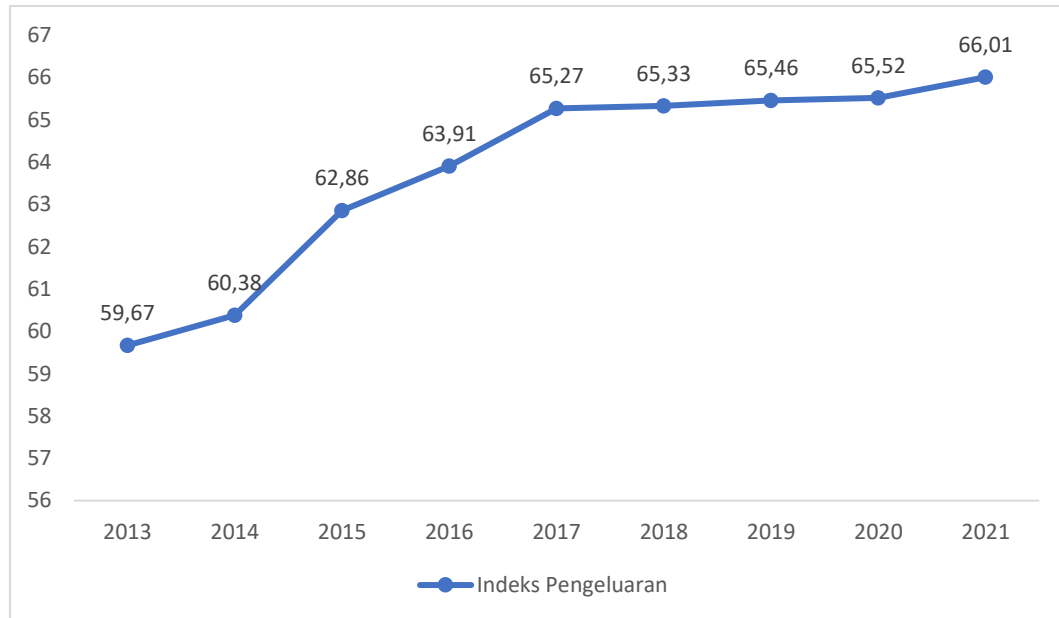
Fokus sumber daya manusia merupakan aspek yang membahas mengenai kondisi sumber daya manusia pada suatu daerah tersebut. Fokus sumber daya manusia ini sangat penting dalam mendukung daya daerah karena dengan potensi SDM yang dimiliki diharapkan dapat mendukung ketercapaian pembangunan di daerah. Adapun indikator yang mendukung aspek daya saing SDM di antaranya:

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia, dengan menggunakan metode terbaru yang dikeluarkan oleh BPS, berupa rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*). Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di



bidang pendidikan dimana kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin di dalamnya dapat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa.



Gambar 2. 29 Indeks Pendidikan Kota Banjar Tahun 2013-2021

Sumber: BPS Kota Banjar, 2023

Capaian Indeks Pendidikan Kota Banjar dari tahun 2013-2021 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi mulai tahun 2013 – 2017 yakni mencapai 65,27 pada tahun 2017. Peningkatan di tahun berikutnya hingga tahun 2021 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2021 mencapai 66,01. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi peningkatan Indeks Pendidikan di antaranya alokasi belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah SMA, fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar, untuk

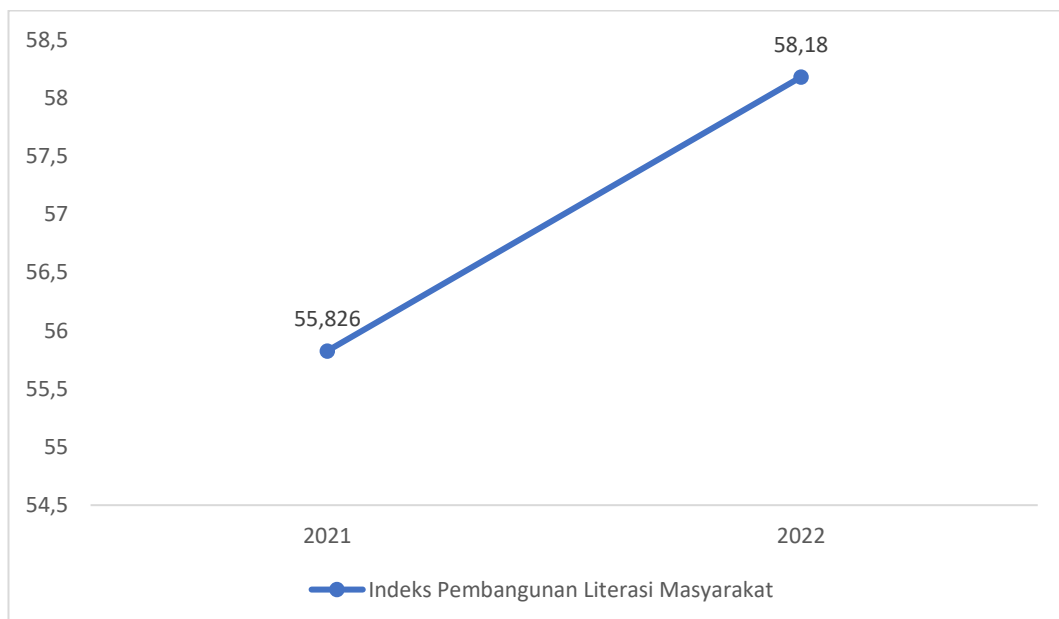


mencapai budaya literasi masyarakat. Adapun unsur-unsur pembangunan Literasi masyarakat (UPLM) di antaranya adalah pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Rumus pengukuran IPLM adalah:

$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari UPLM
AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan



Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Banjar Tahun 2013-2021

Sumber: RKPD Kota Banjar Tahun 2024

Perhitungan terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat baru Kota Banjar dimulai pada tahun 2021 yang



menunjukkan capaian sebesar 55, 826 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 58,18.

2.3.2.3 Indeks Literasi Digital

Perkembangan digitalisasi beberapa tahun terakhir sangat signifikan sehingga ikut mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin baik. Indeks Literasi Digital menggambarkan kondisi kompetensi digital di masyarakat. Melalui survei mengenai status literasi digital yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota akan digunakan untuk memperoleh indeks literasi digital.

Pengukuran Indeks Literasi Digital dibagi ke dalam 4 pilar yang menjadi pengembangan kurikulum literasi digital, di antaranya kecakapan digital (*digital skill*) yang dapat menggambarkan kemampuan terhadap penggunaan aplikasi digital, seperti melakukan pengunduhan suatu dokumen dari internet, etika digital (*digital ethics*) dapat menggambarkan perilaku dan respon masyarakat saat menerima dan juga menyebarkan informasi yang diterima melalui media sosial maupun perangkat digital lainnya, keamanan digital (*digital safety*) menggambarkan perilaku terkait keamanan data pribadi saat berinteraksi dan menggunakan media sosial serta perangkat digital lainnya, dan budaya digital (*digital culture*) yang menggambarkan penerapan budaya, kultur, serta lingkungan tempat tinggal saat berinteraksi melalui media sosial dan perangkat digital lainnya. Dari keempat pilar tersebut kemudian akan dikembangkan ke dalam beberapa indikator dimasing-masing pilar.

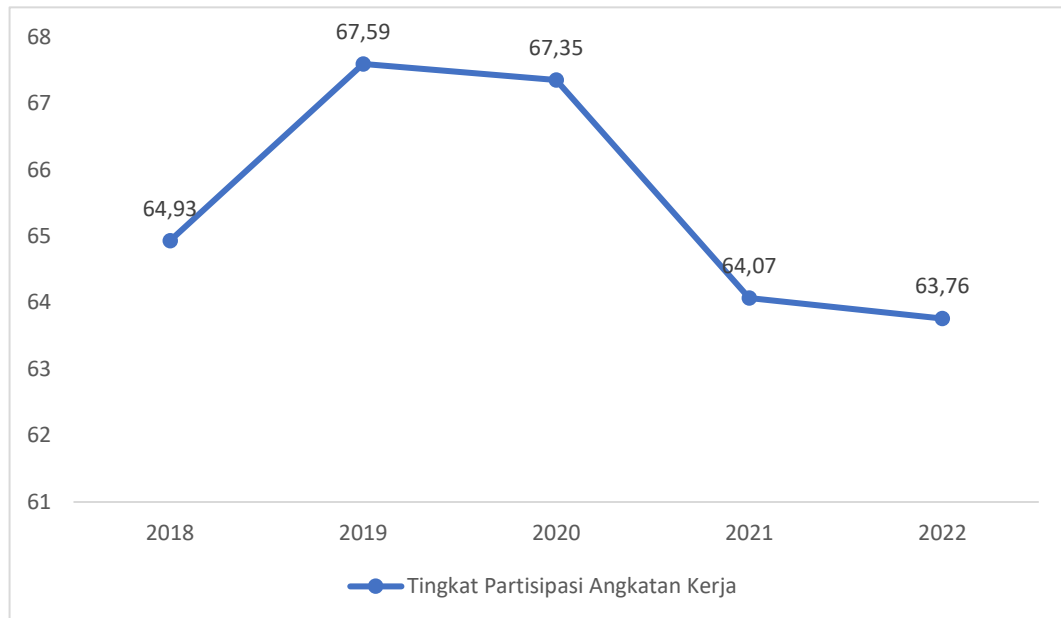
2.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15-64 tahun. Nilai TPAK yang tinggi menggambarkan tingginya kontribusi penduduk usia kerja yang bekerja atau tidak menganggur. Saat nilai TPAK mengalami penurunan, menunjukkan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif



dalam kegiatan ekonomi semakin menurun. Adapun rumus hitung TPAK sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$



Gambar 2. 31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banjar Tahun 2013-2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

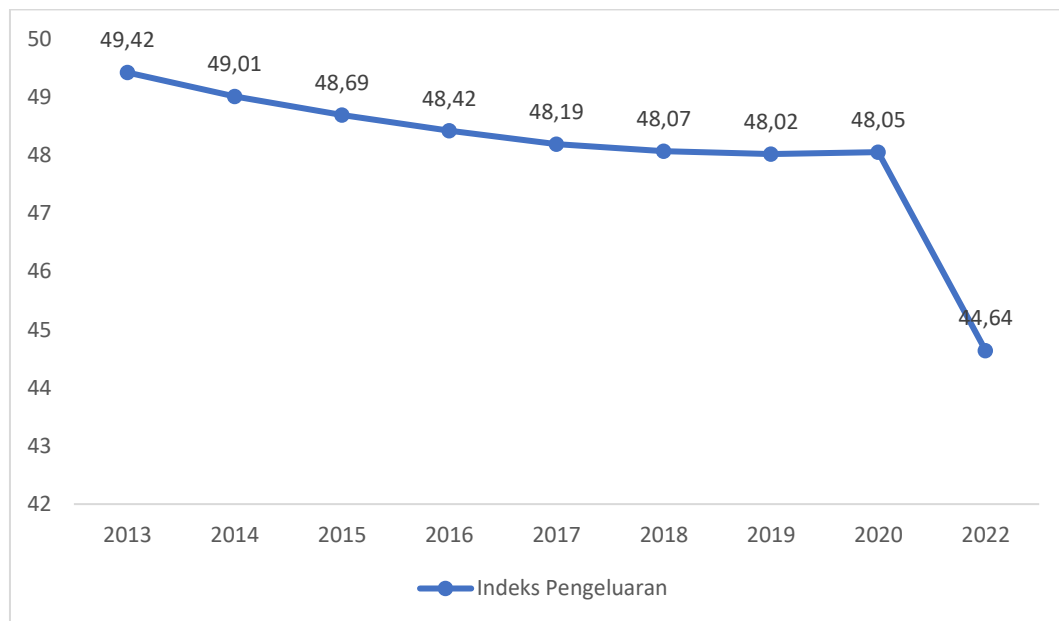
Capaian TPAK Kota Banjar pada tahun 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif. Akan tetapi selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yakni tahun 2021 dan 2022, TPAK Kota Banjar menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2021 mencapai 64,07 dan tahun 2022 menunjukkan 63,76. Penurunan TPAK ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya jumlah angkatan kerja di Kota Banjar.

2.3.2.5 Angka Ketergantungan

Dependency ratio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi



golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Perhitungan rasio ketergantungan digunakan untuk mengetahui tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila rasio ketergantungan tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif semakin tinggi. Kenaikan rasio ketergantungan sebesar 1 persen akan memengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen.



Gambar 2. 32 Rasio Ketergantungan Kota Banjar

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Rasio ketergantungan Kota Banjar tahun 2013 – 2022 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan utamanya di tahun 2022. Rasio ketergantungan Kota Banjar tahun 2022 mencapai 44,64 yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan penduduk Kota Banjar usia belum dan tidak produktif semakin kecil terhadap penduduk usia produktif.

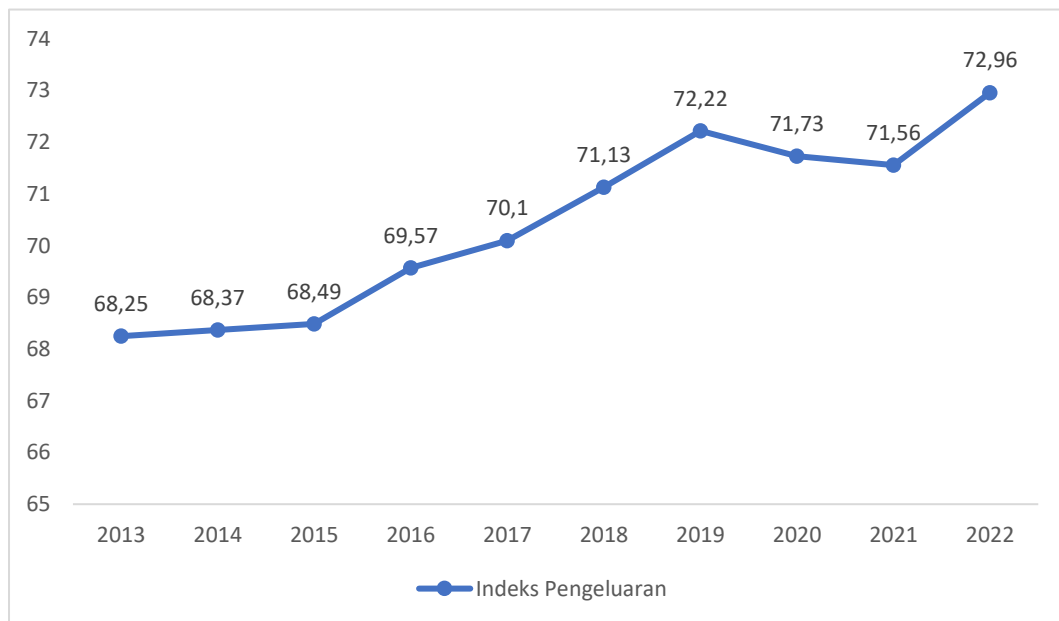
2.3.2.6 Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan



yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks Pengeluaran disusun berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Berikut merupakan rumus hitung indeks pengeluaran menurut BPS:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{[\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})]}{[\ln(\text{pengeluaran}_{\text{max}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})]}$$



Gambar 2. 33 Indeks Pengeluaran Kota Banjar Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan data di atas, Indeks Pengeluaran Kota Banjar selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2014 – 2019 hingga mencapai 72,22. Indeks Pengeluaran tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan berturut-turut yaitu mencapai 71,73 dan 71,56. Selanjutnya pada tahun 2022 Indeks Pengeluaran kembali meningkat signifikan mencapai 72,96. Peningkatan indeks pengeluaran di akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik diikuti dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kota Banjar.



2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pemenuhan fasilitas infrastruktur akan berpengaruh pada daya saing daerah. Meningkatnya infrastruktur yang memadai akan mendorong tingkat perekonomian daerah karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka proses distribusi barang/jasa akan semakin mudah. Adapun indikator yang mendukung aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di antaranya.

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) merupakan sarana evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di daerah selama 1 tahun. IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran indeks tersebut dapat memberikan informasi perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Adapun unsur utama yang digunakan untuk mengukur IKLI di antaranya ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi pada perekonomian.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi merupakan penggambaran kondisi investasi di daerah tersebut. Fokus pada iklim berinvestasi mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi pengusaha, investor, dan pelaku pasar. Iklim berinvestasi yang baik memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan bisnis. Adapun indikator yang mendukung aspek daya saing iklim investasi di antaranya:



2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Indeks ini menilai tiga aspek dalam demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi yang diharapkan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik-praktik demokrasi selama ini.

2.3.4.2 Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Indeks rasa aman merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan, baik dari luar maupun dalam. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap rasa aman bagi masyarakat. Indeks rasa aman dapat menggambarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah. Peroleh nilai dari indeks rasa aman didapatkan melalui hasil survei kuisisioner penduduk suatu wilayah terkait keamanan dan kenyamanan yang dirasakan. Adapun kuisisioner ini mengukur dari beberapa aspek di antaranya keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial dan lainnya.

2.3.4.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengkarakterisasi tingkat ketentraman dan ketertiban dalam suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana wilayah tersebut aman, damai, dan



teratur, serta sejauh mana terdapat gangguan, kerusakan, atau pelanggaran hukum yang memengaruhi ketertiban sosial.

2.3.4.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni, kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam suatu wilayah atau masyarakat tertentu. Indeks ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana berbagai kelompok agama dapat hidup bersama secara damai tanpa konflik agama atau ketidaksetujuan yang signifikan. Pada dasarnya, indeks kerukunan umat beragama adalah alat yang digunakan untuk mengukur situasi kerukunan antar umat beragama dalam suatu konteks tertentu.

2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah yang selanjutnya disingkat IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperoleh ukuran daya saing daerah secara komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pada tahun 2022, pengukuran IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari 4 komponen di antaranya lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Komponen tersebut dielaborasi kedalam 12 pilar daya saing, di antaranya adalah institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar dinamisme bisnis serta kapabilitas inovasi. Setiap pilar daya saing tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks, sehingga diberikan bobot penilaian yang sama.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merujuk pada berbagai aspek atau elemen yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik kepada



masyarakat. Aspek-aspek ini melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas layanan publik. Pada bagian ini akan menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum khususnya pada indikator yang paling menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Pada layanan wajib dan fokus layanan pilihan di Kota Banjar dan terdapat penjelasan gambaran kondisi tata kelola pemerintahan yang didukung dengan beberapa indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.4.1 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

2.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Tabel 2. 25 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banjar

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	55,93	57,07	58,76

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banjar, 2020-2022

Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Banjar berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka sebesar 55,93, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 57,07, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 58,76. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mengindikasikan bahwa ada peningkatan dalam berbagai aspek reformasi administrasi pemerintahan. Ini bisa meliputi



peningkatan efisiensi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam birokrasi. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja birokrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta memperbaiki sistem administrasi secara keseluruhan.

2.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Tabel 2. 26 Indeks Pelayanan Publik Kota Banjar

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	n/a	n/a	n/a	3,48	3,98

Sumber: Pemerintah Kota Banjar, 2021-2022

Indeks Pelayanan Publik mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah kepada masyarakat. Ini mencakup aspek kecepatan, responsivitas, kemudahan akses, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam memperoleh layanan publik. Peningkatan dalam indeks ini menunjukkan perbaikan dalam kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Indeks Pelayanan Publik di Kota Banjar menunjukkan angka yang meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Tahun 2021 Indeks Pelayanan Publik di Kota Banjar sebesar 3,48 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,98. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kota Banjar menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjar kepada



masyarakat membaik dari tahun ke tahun. Hal ini mencakup adanya peningkatan dalam kecepatan layanan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, efisiensi dalam proses layanan, serta peningkatan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan.

2.4.1.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah diperoleh berdasarkan penilaian dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta dapat diterapkan pada daerah lain. Dari hasil Indeks Inovasi Daerah, didapatkan peringkat inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Peringkat inovasi daerah ini memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah dapat digunakan untuk mendorong kreativitas dan inovasi yang dilakukan Pemerintahan Daerah. Selain itu, adanya Indeks Inovasi Daerah dapat memotivasi setiap Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kebijakannya di seluruh aspek.

2.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional



juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

2.5 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan Kota Banjar mulai tahun 2005 terbagi menjadi empat (4) periode yang menunjukkan kemajuan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Pemerintah Kota Banjar. Visi Kota Banjar pada tahun 2005-2025 adalah **BANJAR AGROPOLITAN**. Penetapan visi tersebut didukung fakta dan data bahwa mayoritas kegiatan perekonomian di Kota Banjar pada saat itu adalah kegiatan ekonomi berbasis pertanian seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat dikembangkan lebih luas di masa depan dan menjadi basis ekonomi kota yang kuat. Sebagai agropolitas, kegiatan perekonomian Kota Banjar juga berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis) seperti agroindustri, jasa-jasa pertanian, agrowisata, serta koleksi dan distribusi produk-produk pertanian.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan Kota Banjar pada tahun 2005-2025 yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, maka misi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat dan Produktif;



2. Mewujudkan Perekonomian Kota Berbasis Agribisnis yang Berdaya Saing dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Budaya Masyarakat yang Produktif, Efisien, Gigih, Kerja Keras, Kompetitif, Rasional dan Profesional (Budaya Industrial), dengan tetap Mempertahankan serta Memanfaatkan Pengetahuan dan Kearifan Lokal (*Local Knowledge and Wisdom*);
4. Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Lingkungan Hidup Kota; dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Secara Profesional untuk Menjamin Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Pembangunan di Kota Banjar melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun dari non pemerintah. Sinergi dan kolaborasi dari berbagai pelaku pembangunan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan. Pembangunan dari tahun 2005 telah menunjukkan hasil yang nyata untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu “Banjar Agropolitan”. Capaian pelaksanaan kinerja Kota Banjar selama empat (4) periode diringkas pada penjelasan di bawah ini.

2.5.1 Capaian Pembangunan Periode I (2005-2008)

Arah kebijakan pembangunan periode I mengharapkan adanya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Banjar;
2. Peningkatan kesadaran hukum dan penegakkan supremasi hukum;
3. Pertumbuhan kekuatan ekonomi masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional untuk memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota.



Capaian terhadap arah kebijakan di atas diterjemahkan sebagai berikut:

1. Capaian untuk arah kebijakan Pertumbuhan Kekuatan Ekonomi Masyarakat selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase LPE yang realisasinya melebihi target, yaitu 5,75% dari target yang ditetapkan yaitu 5,70%.
2. Capaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pun mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan masyarakat Kota Banjar sesuai dengan agama dan kepercayaan;
3. Peningkatan Kesadaran dan Supremasi Hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama periode 2005-2008 pun turut meningkat didukung dengan Pemerintah Kota Banjar telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, meskipun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan beberapa perbaikan di antaranya:
 - a. Penguatan sistem manajemen SDM yang belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disebabkan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;
 - b. Sistem kompensasi kepada penerima layanan belum membudaya dan terimplementasikan secara merata dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian dalam upaya perbaikan berkala dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan integritas. Hal tersebut



ditunjukkan dari hasil penilaian tingkat kepatuhan pelayanan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI untuk Kota Banjar yang masih berada di zona kuning pada pembangunan periode I.

2.5.2 Capaian Pembangunan Periode II (2009-2013)

Arah kebijakan pembangunan periode II mengharapkan adanya:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21; Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
2. Penggunaan anggaran belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan pembangunan; dan penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja;
3. Pembentukan Dana Cadangan Daerah (DCD);
4. Peningkatan investasi di Kota Banjar.

Capaian terhadap arah kebijakan di atas diterjemahkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjar melakukan kerjasama dengan *stakeholder* lain terkait dengan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif;
2. Penggunaan anggaran belanja langsung dengan kebijakan pembangunan untuk periode capaian 2009-2014 cukup baik, yang ditunjukkan melalui upaya *refocusing program* pada kegiatan yang telah dilakukan. Akan tetapi perlu dimaksimalkan dengan berfokus pada penghapusan program/kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah;
3. Penyertaan modal dan kerjasama pada peningkatan iklim investasi dalam meningkatkan akurasi data sumber daya alam



(SDA) perkembangannya cukup signifikan ke arah yang lebih baik;

4. Pemerintah Kota Banjar telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan (8) kali yaitu pada tahun 2007 dan secara berturut-turut dari tahun 2014 pada periode RPJMD Kota Banjar Tahun 2009-2014.

2.5.3 Capaian Pembangunan Periode III (2014-2018)

Arah kebijakan pembangunan periode III mengharapkan adanya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan serta kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan program KB;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing UMKM/Koperasi, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
4. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
5. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menuju Banjar Agropolitan;
6. Persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
7. Peningkatan kemandirian keluarga pra sejahtera dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pengembangan ekonomi padat karya;
8. Penataan ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan RTH kota;
9. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
10. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat di bidang hukum;



11. Peningkatan kualitas produk penataan ruang dan perencanaan dengan dukungan data dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Capaian terhadap arah kebijakan di atas diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota Banjar melakukan penyelenggaraan *event* Citanduy Festival Kota Banjar yang diselenggarakan di Linggarjati Kabupaten Kuningan pada tahun 2015, Tasikmalaya pada tahun 2016, Taman Mini Indonesia Indah dalam kegiatan Pameran Citra Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan Desa Wisata Ciburial Kabupaten Garut pada tahun 2018 dalam hal peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, meningkatkan IPTEK sistem produksi dan meningkatkan pangsa pasar produk-produk.
2. Capaian terhadap sepuluh (10) area antara hasil perubahan Pemerintah Kota Banjar yaitu sistem merit, kualitas kebijakan, ASN yang profesional, implementasi SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, maturitas SPIP, kapabilitas APIP, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip dan reformasi hukum dimana masih adanya capaian yang perlu ditingkatkan terutama pada kualitas hasil antara implementasi SPBE, kualitas pengelolaan barang dan jasa, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Namun juga ada beberapa yang mengalami peningkatan kualitas hasil antara yaitu penilaian ASN yang profesional, kualitas pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Penilaian sistem merit dan penilaian terhadap reformasi hukum masih menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Begitu pula capaian tindak lanjut dari hasil pelayanan survei kepuasan masyarakat kepada seluruh layanan perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pengguna layanan.



3. Capaian dalam bidang pendidikan gratis, Pemerintah Kota Banjar menunjukkan angka lama (waktu) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,24 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 13,22 tahun menjadi 13,24 di tahun 2018 dan Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,77 tahun di tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 8,62 tahun. Capaian terhadap jumlah penduduk yang terlayani program kesetaraan pada periode RPJMD tersebut sebanyak 1.020 warga belajar. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk pencapaian Angka Melek Huruf mencapai 99,31% atau penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah melek aksara sebanyak 157.656 orang dari 158.756 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, persentase capaian kinerja 101% atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 99,29%.

2.5.4 Capaian Pembangunan Periode IV (2019-2023)

Arah kebijakan pembangunan periode IV mengharapkan adanya:

1. Pemantapan dasar kebijakan dan strategi Kota Banjar BERSERI;
2. Pemantapan reformasi birokrasi untuk peningkatan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan;
3. Peningkatan realisasi potensi daerah.

Capaian terhadap arah kebijakan di atas diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota Banjar meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2020 sebesar 55,93, tahun 2021 sebesar 57,07 dan 2022 sebesar 58,76. Capaian dalam mengoptimalkan program reformasi birokrasi untuk periode RPJMD ini di antaranya



belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai, rencana aksi kinerja yang disusun oleh pemerintah kota dan perangkat daerah belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi, sehingga ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal khususnya dalam pelaksanaan *quick wins*.

2. Kota Banjar juga belum melakukan evaluasi kelembagaan sehingga belum diketahui gambaran kelembagaan pemerintah kota yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dan beberapa upaya dalam penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan *assessment* kepada pegawai belum seluruhnya dilaksanakan;
3. Penyusunan HCDP dan melakukan pemetaan talenta pegawai serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) belum maksimal.

Pemerintah Kota Banjar memetakan arah kebijakan untuk pencapaian pembangunan pada periode V yaitu tahun 2024-2025, dimana pemerintah mengharapkan adanya:

1. Penurunan angka *stunting* dan kemiskinan ekstrem dengan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memerhatikan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Kota Banjar telah memasuki periode keempat dari lima periode dengan menghasilkan berbagai pencapaian guna mewujudkan visi Kota Banjar. Pelaksanaan pencapaian pembangunan pun memiliki tantangan dan kendala yang dihadapi. Dalam mencapai target sampai dengan akhir periode RPJPD Kota Banjar pada tahun 2025, perlu memerhatikan tindakan sebagai berikut:



1. Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.
2. Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu memerhatikan capaian kinerja pembangunan dalam beberapa tahun terakhir serta identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi riil.

2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk adalah hal yang krusial dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Proyeksi penduduk menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan penduduk, seperti prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dengan adanya proyeksi tersebut, maka pemerintah daerah dapat menyiapkan kebutuhan penduduk.

Aspek demografi Kota Banjar telah diproyeksikan sebagian oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Proyeksi tersebut terdiri dari komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2035. Dengan demikian, proyeksi penduduk hingga tahun 2045 akan dilanjutkan berdasarkan data yang telah ada.

Dalam memproyeksikan penduduk Kota Banjar hingga tahun 2045, angka pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah proyeksi penduduk 2031-2035, yaitu 0,73 %. Dengan menggunakan penduduk tahun awal adalah penduduk tahun 2035 yang telah diproyeksikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat, proyeksi akan dilanjutkan dengan metode eksponensial. Berikut ini adalah rumus pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial:

$$P_n = P_0 \times e^{rn}$$

P₀ : Penduduk pada tahun awal



n : Waktu dalam tahun (periode proyeksi)

r : Angka pertumbuhan penduduk (%)

P_n : Penduduk pada tahun n

e : Bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818

Pada tabel 3.1 tersebut, diketahui bahwa penduduk Kota Banjar pada tahun 2045 diproyeksikan berada di angka 254.233 jiwa. Penduduk Kota Banjar diprediksi akan meningkat sekitar 47.776 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut ini adalah hasil proyeksi penduduk Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 2.27

Proyeksi Penduduk Kota Banjar Tahun 2025-2045

Jumlah Penduduk 2022 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Adanya kenaikan penduduk pada luas wilayah yang sama, maka akan ada peningkatan kepadatan penduduk. Dengan luas wilayah 131,97 km^2 atau 13.197 hektare, kepadatan penduduk di tahun 2045 diproyeksikan sekitar 1.926 jiwa/ km^2 atau 19,26 jiwa/ha. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, ada peningkatan kepadatan penduduk sebanyak 362 jiwa/ km^2 atau 3,62 jiwa/ha. Meskipun demikian, kepadatan penduduk di Kota Banjar hingga tahun 2045 akan tetap masuk ke kategori rendah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yakni masih di bawah 150 jiwa/ha. Berikut ini merupakan prediksi kepadatan penduduk Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 2. 28

Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Banjar Tahun 2025-2045

Luas Wilayah Kota Banjar	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kepadatan Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
131,97 km^2	1.564	1606	1682	1744	1825	1926
13197 ha	15,64	16,06	16,82	17,44	18,25	19,26



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Adanya pergeseran jumlah penduduk juga menandakan akan ada pergeseran komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di tahun 2022 menggambarkan bahwa saat ini jumlah penduduk laki-laki lebih banyak, hal ini dibuktikan dengan rasio jenis kelamin di angka 1,008. Namun, rasio jenis kelamin diprediksi akan bergeser ke angka 0,989. Artinya, penduduk perempuan akan lebih banyak di tahun 2045. Berikut ini merupakan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Banjar dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Tabel 2. 29

Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	103.753	106.360	111.240	115.230	120.288	126.437
Perempuan	102.884	105.600	110.700	114.980	120.614	127.796
Rasio Jenis Kelamin	1,008	1,007	1,005	1,002	0,997	0,989

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selain pergeseran komposisi penduduk pada jenis kelamin, kelompok umur penduduk juga akan mengalami pergeseran hingga tahun 2045. Meskipun jumlah penduduk bertambah, proporsi penduduk usia muda akan berkurang dan penduduk usia tua akan bertambah seiring waktu. Hal ini dikarenakan Indonesia menghadapi tantangan kecenderungan penurunan fertilitas hingga melewati *replacement level* dan juga *population aging*.

Di tahun 2045, populasi penduduk Kota Banjar yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun berada di angka 49.244 jiwa atau 19,37% dari total keseluruhan penduduk. Komposisi penduduk usia muda akan mengalami penurunan sekitar 3% jika dibandingkan dengan data tahun 2022. Sementara itu, jumlah penduduk usia tua



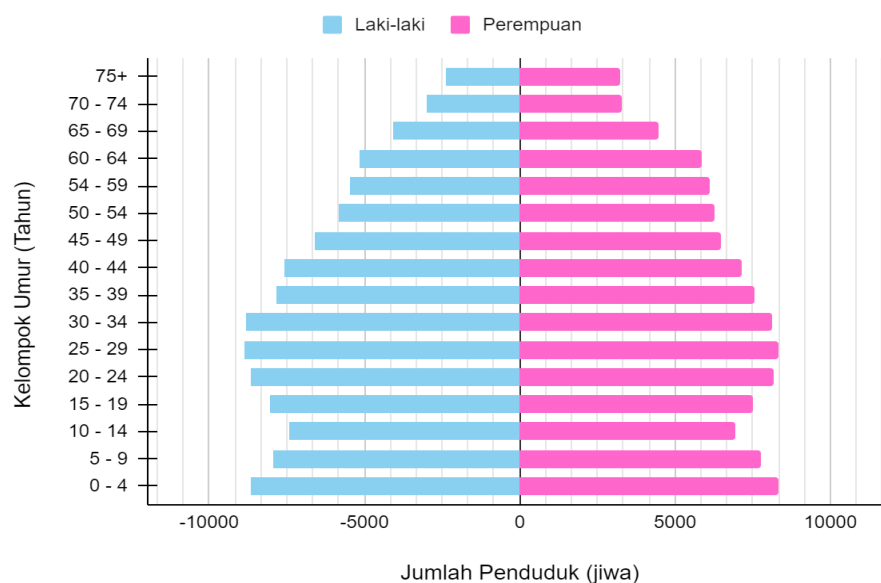
akan mengalami lonjakan hingga mencapai angka 41.990 jiwa atau 16,52% dari total keseluruhan penduduk di Kota Banjar tahun 2045. Komposisi penduduk lansia akan mengalami kenaikan sebanyak 8% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, penduduk usia produktif atau 15-64 tahun akan mengalami kenaikan hingga ke angka 162.299 jiwa atau 64,11%. Penduduk usia produktif akan naik sekitar ±20.000, namun komposisinya akan mengalami penurunan sebanyak 5%. Berikut ini merupakan proyeksi penduduk berdasarkan umur di Kota Banjar tahun 2025 hingga tahun 2045 beserta piramida penduduknya setiap 5 tahun.

Tabel 2. 30
Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Banjar Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	45.522	47.070	49.090	48.950	49.007	49.244
15-64 tahun	142.738	144.470	147.230	151.570	156.831	162.999
> 65 tahun	18.197	20.430	25.620	29.700	35.064	41.990
Angka Ketergantungan	44,64%	46,72%	50,74%	51,89%	53,61%	55,97%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Piramida Penduduk Kota Banjar Proyeksi Tahun 2025





Gambar 2.34 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2025
Sumber: Hasil Analisis, 2023



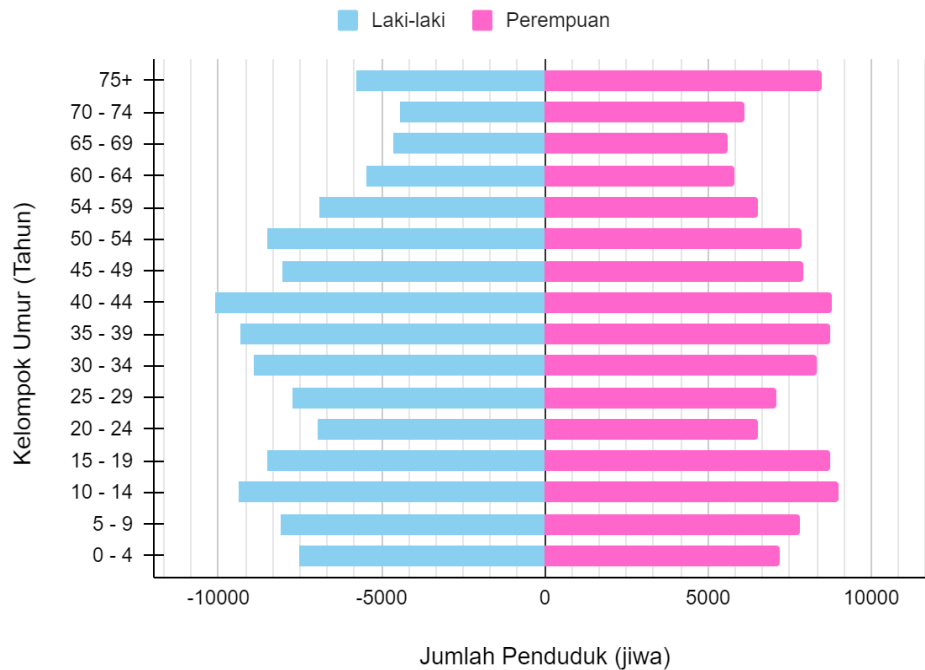
Gambar 2. 35 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2030
Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 2. 36 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2035
Sumber: Hasil Analisis, 2023



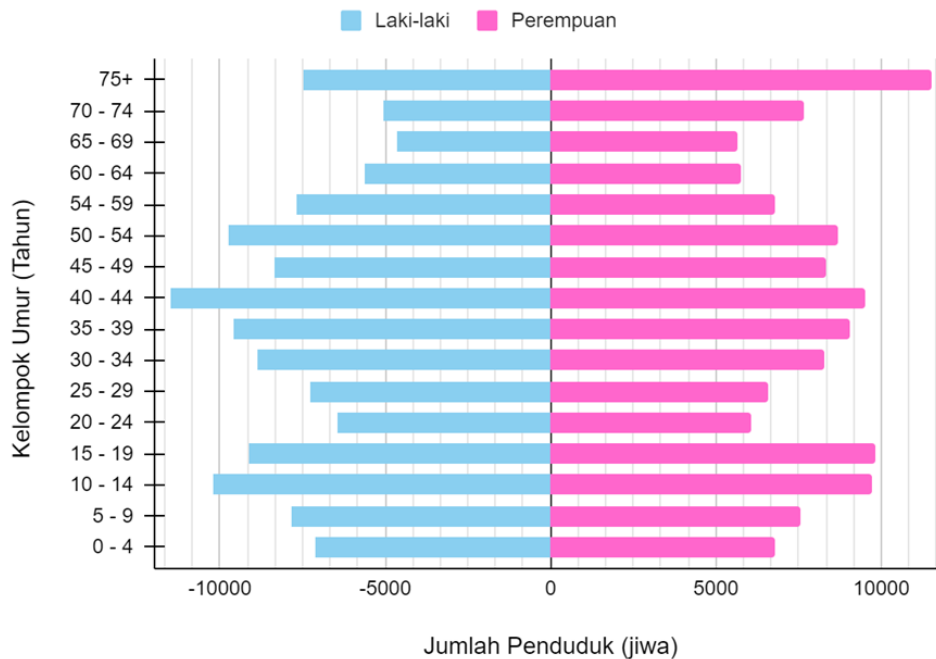
Piramida Penduduk Kota Banjar Proyeksi Tahun 2040



Gambar 2. 37 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2040

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Piramida Penduduk Kota Banjar Proyeksi Tahun 2045



Gambar 2. 38 Piramida Penduduk Kota Banjar Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis, 2023



2.6.2 Proyeksi Sarana Prasarana

2.6.2.1 Rumah

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan permukiman, sedangkan luas wilayah kota yang dapat digunakan sebagai permukiman cukup terbatas. Untuk mengetahui kebutuhan permukiman hingga tahun 2045, diperlukan proyeksi penduduk di tahun 2045 agar dapat mengetahui jumlah unit dan luas lahan minimum yang dibutuhkan.

Proyeksi kebutuhan rumah didasarkan pada jumlah rata-rata jumlah anggota keluarga per KK, dimana setiap KK menempati 1 unit rumah. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat, terdapat 57.095 rumah tangga, artinya rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 jiwa. Sementara itu, untuk perhitungan kebutuhan luas permukiman menggunakan asumsi dari SNI 03-1733-2004 yaitu luas minimum kavling per unit adalah $100 m^2$. Berikut ini adalah hasil proyeksi kebutuhan permukiman Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 2. 31
Proyeksi Kebutuhan Unit Rumah Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	51.614	52.990	55.485	57.553	60.226	63.558

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Tabel 2. 32
Proyeksi Kebutuhan Lahan Permukiman
Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman (m^2)	5.161.425	5.299.000	5.548.500	5.755.250	6.022.552	6.355.828
Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman (ha)	516,14	529,90	554,85	575,53	602,26	635,58
Proyeksi Kebutuhan Ruang Minimum untuk Permukiman (km^2)	5,1614	5,2990	5,5485	5,7553	6,0226	6,3558

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.2 Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Air bersih tidak hanya menjadi sumber air minum, namun juga digunakan dalam MCK (mandi, cuci, kakus). Selain untuk kebutuhan rumah tangga (domestik), sektor-sektor lain juga membutuhkan air bersih dalam menunjang aktivitasnya. Dengan keterbatasan sumber air, maka diperlukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan kebutuhan air bersih bagi setiap wilayah. Perhitungan kebutuhan air bersih didasarkan kepada tiga aspek utama, yaitu kebutuhan domestik, kebutuhan non-domestik, dan kehilangan/kebocoran air.

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan untuk rumah tangga. Proyeksi kebutuhan domestik didasarkan pada kebutuhan air per kapita dengan satuan liter/orang/hari. Menurut UNESCO,



kebutuhan air manusia minimal adalah 60 liter/hari. Sementara itu Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menjabarkan kebutuhan air per penduduk yang disesuaikan dengan jenis wilayah, yakni sebagai berikut:

- Wilayah Pedesaan, yaitu kebutuhan air bersihnya adalah 60 liter/orang/hari
- Kota Kecil, yaitu kebutuhan air bersihnya adalah 90 liter/orang/hari
- Kota Sedang, yaitu kebutuhan air bersihnya adalah 110 liter/orang/hari
- Kota Besar, yaitu kebutuhan air bersihnya adalah 130 liter/orang/hari
- Kota Metropolitan, yaitu kebutuhan air bersihnya adalah 150 liter/orang/hari

Kota Banjar merupakan kota berukuran sedang, karena jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Maka kebutuhan air per kapita di Kota Banjar adalah 110 liter/orang/hari.

Secara umum, proyeksi kebutuhan air minum didasarkan pada Standar Kebutuhan Air minum oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003), yaitu:

- Kebutuhan Air Domestik = Jumlah Penduduk x Kebutuhan Air per penduduk
- Kebutuhan Non Domestik
 - Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
 - Kantor = 15% x kebutuhan domestik
 - Komersial = 20% x kebutuhan domestik
 - Industri = 10% x kebutuhan domestik
- Hidran air = 20% x (kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik)
- Kehilangan Air = 10% x (kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik)



- $\text{Kebutuhan Total} = \text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik} + \text{hidran}$
- $\text{Kebutuhan Rata-rata Harian} = \text{kebutuhan domestik} + \text{kebutuhan non domestik} + \text{hidran} + \text{kehilangan air}$
- $\text{Kebutuhan Harian Maksimum} = 1,15 \times \text{kebutuhan rata-rata harian}$

Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Banjar hingga tahun 2045

Tabel 2. 33
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Kebutuhan Air						
Domestik	22.710.270	23.315.600	24.413.400	25.323.100	26.499.228	27.965.644
Non Domestik	13.626.162	13.989.360	14.648.040	15.193.860	15.899.537	16.779.386
Hidran Air	7.267.286	7.460.992	7.812.288	8.103.392	4.239.876	8.949.006
Kebutuhan Total	43.603.718	44.765.952	46.873.728	48.620.352	50.878.518	53.694.036

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui saat ini kebutuhan air total di Kota Banjar adalah 43 juta liter per hari, dan kebutuhan tersebut diprediksi akan meningkat menjadi 53 juta liter per hari di tahun 2045. Artinya, akan ada peningkatan sebanyak 10 juta liter per hari dalam 20 tahun.

2.6.2.3 Energi/listrik

Kebutuhan listrik merujuk pada jumlah energi listrik yang diperlukan oleh individu, rumah tangga, industri, atau suatu daerah untuk memenuhi aktivitas sehari-hari atau operasional. Kebutuhan listrik bisa sangat bervariasi tergantung pada penggunaannya, seperti



penerangan, pemanasan, pendinginan, penggunaan perangkat elektronik, keperluan industri, transportasi, dan masih banyak lagi.

Kebutuhan energi listrik akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Tidak hanya kebutuhan domestik saja yang membutuhkan listrik, namun hampir semua bangunan membutuhkan listrik sebagai sumber energinya. Berdasarkan standar pelayanan PLN, berikut merupakan standar menghitung kebutuhan listrik:

1. Rumah tangga: 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga
2. Industri & Perdagangan: 70% kebutuhan rumah tangga
3. Fasilitas Sosial & Ekonomi: 15% kebutuhan rumah tangga
4. Fasilitas Perkantoran: 10% kebutuhan rumah tangga
5. Penerangan jalan: 1% kebutuhan rumah tangga
6. Cadangan: 5% kebutuhan rumah tangga

Berdasarkan standar tersebut, berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan listrik Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 3. 34
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Jumlah Rumah	51.614	52.990	55.485	57.553	60.226	63.558
Kebutuhan Listrik						
Rumah Tangga	38710,69	39742,50	41613,75	43164,38	45169,14	47668,71
Non Domestik	37162,26	38152,80	39949,20	41437,80	43362,37	45761,96
Cadangan	1935,53	1987,13	2080,69	2158,22	2258,46	2383,44
Jumlah Kebutuhan Listrik	77808,48	79882,43	83643,64	86760,39	90789,97	95814,11

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa proyeksi jumlah kebutuhan listrik di tahun 2045 mencapai 95.814,11 Kva,



dimana diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 20.000 Kva dibandingkan dengan kondisi tahun 2022.

2.6.2.4 Persampahan

Sampah adalah istilah yang merujuk kepada material atau bahan yang dianggap tidak terpakai atau tidak diinginkan. Sampah dapat berupa sisa-sisa dari aktivitas manusia, baik itu bahan organik maupun non-organik, yang umumnya tidak memiliki nilai atau kegunaan langsung bagi individu atau masyarakat pada umumnya. Sampah bisa beragam jenisnya, mulai dari sisa makanan, kemasan plastik, kertas, logam, kaca, hingga barang-barang elektronik yang tidak lagi digunakan.

Berdasarkan SNI 3242 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah di Permukiman, proyeksi timbulan sampah untuk kota kecil adalah 2,5 L/Hari bagi setiap orang. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 2. 35
Spesifikasi Fasilitas Persampahan

Jenis peralatan	Kapasitas (m3)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)
Wadah komunal	0,5-1,0	100-200
Komposter komunal	0,5-1,0	50-100
Alat pengumpul: gerobak sampah bersekat/sejenisnya	1	640
Container armroll truk	6 10	3.200 5.330
TPS		
Tipe I	100	2.500
Tipe II	300	30.000
Tipe III	1000	120.000



Jenis peralatan	Kapasitas (m3)	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)
Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	150	3.000

Sumber: Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 2008

Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah serta proyeksi fasilitas persampahan berdasarkan jumlah penduduk pendukung di Kota Banjar hingga tahun 2045.

Tabel 2. 36
Proyeksi Timbulan Sampah Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbulan Sampah (L/Hari)					
		2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah Penduduk	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233	
Proyeksi Timbulan Sampah	516143	529900	554850	575525	602255	635583	
Kebutuhan Fasilitas Sampah berdasarkan jumlah penduduk pendukung							
Gerobak sampah	27	331	347	360	376	397	
Container armroll truk	Kecil	52	66	69	72	75	79
	Besar		40	42	43	45	48
TPS	Tipe I	12	85	89	92	96	102
	Tipe II		7	7	8	8	8
	Tipe III		2	2	2	2	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa proyeksi timbulan sampah dalam satu hari di tahun 2045 diprediksi akan mencapai 635.583 L/Hari. Maka dari itu diperlukan fasilitas pengolahan persampahan untuk dapat mengakomodasi jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kota Banjar. Pada tahun 2045, Kota Banjar membutuhkan 397 gerobak sampah, 127 kontainer amroll truk, 102 TPS tipe 1, 8 TPS tipe 2, dan 2 TPS tipe 3.



2.6.2.5 Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan berperan untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan kepada masyarakat, dimana hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, penyediaan sarana kesehatan bergantung kepada jumlah penduduk pendukung atau jumlah penduduk yang terlayani serta radius pelayanan. Beberapa jenis sarana yang diperlukan meliputi:

Tabel 2. 37
Standar Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pelayanan
1.	Posyandu	1.250	500 m
2.	Balai Pengobatan Warga	3.000	1.000 m
3.	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	4.000 m
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	1.500 m
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	3.000 m
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	1.500 m
7.	Apotik atau Rumah Obat	120.000	1.500 m

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2004

Sementara itu, rumah sakit melayani 240.000 penduduk berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Banjar hingga tahun 2045 berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya.



Tabel 2. 38
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan
Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Kebutuhan Sarana Kesehatan						
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	2	2	2	2	2	2
Puskesmas Pembantu	7	7	7	8	8	8
Apotik	7	7	7	8	8	8

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa proyeksi kebutuhan tidak bertambah secara signifikan, dimana hanya terjadi peningkatan kebutuhan puskesmas pembantu dan apotek masing-masing sebanyak 1 unit di tahun 2035.

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjar (2023), Kota Banjar memiliki 3 rumah sakit, 10 puskesmas, 9 puskesmas pembantu, dan 10 apotek di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sarana kesehatan akan tetap terpenuhi hingga tahun 2045.

2.6.2.6 Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan yang cerah bagi sebuah kota karena menjadi alat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Fasilitas pendidikan untuk anak-anak sendiri dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudlatul Afal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsawaniyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA). Berdasarkan SNI 03-1733-2004, penyediaan sarana pendidikan bergantung kepada jumlah penduduk



pendukung atau jumlah penduduk yang terlayani serta radius pelayanan.

Tabel 2. 39
Standar Fasilitas Pendidikan

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pelayanan
1.	TK	1.250	500 m
2.	SD	1.600	1.000 m
3.	SMP	4.800	1.000 m
4.	SMU	4.800	3.500 m

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2004

Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Banjar hingga tahun 2045 berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya.

Tabel 2. 40
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan
Kota Banjar Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	206.457	211.960	221.940	230.210	240.902	254.233
Kebutuhan Sarana Pendidikan						
TK/RA	71	170	178	184	193	203
SD/MI Negeri & Swasta	110	132	139	144	151	159
SMP/MTs Negeri & Swasta	40	44	46	48	50	53
SMA/SMK/MA Negeri & Swasta	31	44	46	48	50	53

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang tersedia di tahun 2022 masih belum dapat memenuhi proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dari tahun 2025-



2045. Pada tahun 2025 sendiri diprediksi akan ada sekitar 254.233 penduduk yang artinya membutuhkan 203 Taman Kanak-Kanak/, 159 Sekolah Dasar, 53 Sekolah Menengah Pertama, dan 53 Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/MA

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan dan Pengembangan Kewilayahan merupakan strategi dan rencana yang dibuat dalam rangka mengatur pertumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya di setiap wilayah. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah yaitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM serta peningkatan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan dalam setiap wilayah.

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan kewilayahan

Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Provinsi Jawa Barat Khususnya Kota Banjar termasuk ke dalam wilayah Pulau Jawa. Secara garis besar, Pulau Jawa diarahkan sebagai “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan” dengan lima prioritas.

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (*talent global*); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.

Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.

Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular serta penguatan kawasan konservasi strategis pada



kawasan lindung dan *geopark*; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Kelima, penuntasan RDTR Kabupaten/Kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Dari berbagai arah kebijakan yang telah dirumuskan, terdapat beberapa kebijakan Pulau Jawa yang dapat diterapkan secara langsung ke Kota Banjar dan bersifat tidak langsung ke Kota Banjar. Dimana arah kebijakan yang berdampak langsung artinya akan dilaksanakan dalam lingkup wilayah administrasi Kota Banjar. Sementara itu, kebijakan tidak langsung adalah kebijakan yang dilaksanakan di luar Kota Banjar, namun Kota Banjar dapat memanfaatkannya dengan memerhatikan keterkaitan antar-wilayah. Berikut ini adalah arah kebijakan Pulau Jawa yang relevan dengan kondisi di Kota Banjar, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Tabel 2. 41
Keterkaitan Kebijakan Kewilayahan Nasional dengan Kota Banjar

Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	✓		Pembudayaan perilaku hidup sehat perlu terus dilakukan untuk menjaga kesehatan penduduk dan mencegah penularan penyakit di Kota Banjar
	Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan kusta, dan percepatan penurunan <i>stunting</i> pada wilayah dengan beban tinggi	✓		Dengan masih adanya penduduk yang menderita atau terduga penyakit menular serta masih adanya balita yang mengalami <i>stunting</i> , arah kebijakan ini relevan untuk Kota Banjar
	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	✓		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas sarana kesehatan, sehingga rujukan pasien dari Kota Banjar dapat diminimalisasi
	Pendekatan layanan kesehatan lansia	✓		Kota Banjar diprediksi akan mengalami <i>population aging</i> , dimana akan ada banyak penduduk usia tua. Maka dari itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan bagi penduduk lansia yang lebih rentan dibandingkan dengan penduduk lain
	Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi di wilayah Jawa		✓	Pada umumnya, pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi dilakukan pada kota besar. Kota Banjar dapat mengambil manfaat dari hal tersebut, dimana pasien yang menderita penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani pada sarana kesehatan lokal akan dirujuk sesuai sistem tersebut
	Perbaiki kualitas lingkungan sehat di permukiman kumuh kota	✓		Kualitas lingkungan sehat pada permukiman kumuh perlu diperbaiki, sehingga dapat mencegah munculnya penyakit yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat secara luas



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Pemenuhan sarana pasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi serta sarana prasarana penanganan limbah medis	✓		Arah kebijakan ini secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang
	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	✓		Adanya arahan kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjar serta meningkatkan rata-rata lama sekolah
	Penerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi	✓		Kualitas sarana pendidikan di Kota Banjar perlu disamakan dengan kualitas sarana pendidikan di kota besar Pulau Jawa, sehingga penduduk Kota Banjar yang hendak melanjutkan pendidikan tidak perlu memilih sarana pendidikan di luar Kota Banjar. Dalam jangka panjang, arah kebijakan ini dapat mempersempit kesenjangan kualitas SDM antara Kota Banjar dengan kota besar lainnya
	Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	✓		Pengembangan kurikulum berbasis inovasi dan teknologi informasi harus terus dilanjutkan dengan mengikuti perkembangan zaman
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3	✓		Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik sebagai pengajar dapat menguatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang
	Pengembangan <i>hub</i> pendidikan tinggi global (<i>global higher education</i>)	✓		Pemerataan kualitas antara Pendidikan Tinggi di Kota Banjar dengan Pendidikan Tinggi di kota besar



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	<i>hub</i>); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, Metropolitan Semarang, dan Yogyakarta			di Pulau Jawa, dapat meningkatkan kualitas SDM di Kota Banjar. Selain itu, adanya program studi keilmuan yang sesuai dengan potensi pengembangan wilayah/ sektor unggulan wilayah, seperti mendukung agropolitan, akan menyiapkan tenaga kerja yang lebih terampil untuk menggerakkan perekonomian di Kota Banjar. Meskipun demikian, hal ini juga akan mendorong urbanisasi ke Kota Banjar dengan adanya peningkatan jumlah mahasiswa rantau dari wilayah sekitarnya. Hal ini juga akan mengurangi calon mahasiswa terampil di Kota Banjar untuk pindah dan menetap di kota lain
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja	✓		
	Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	✓		Pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan di Kota Banjar terutama memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu maupun kelompok marginal
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia,	✓		



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas			
Transformasi Ekonomi	Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (<i>green chemistry</i>) dan <i>teknologi nano hijau (green nanotechnology)</i> didukung dengan pengembangan energi terbarukan (<i>renewable energi</i>). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara, Kawasan Rebana-Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya	✓		Kawasan industri direncanakan akan dibangun pada wilayah pinggiran kota yaitu di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Pataruman. Kawasan industri ini dapat diarahkan untuk menjadi industri hijau yang ramah lingkungan.
	Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri <i>consumer goods</i> dan <i>general manufacture</i>), dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik - Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal,			Kota Banjar tidak termasuk ke dalam kawasan strategis industri



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan)			
	Pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika	✓		Kota Banjar sebagai kawasan agropolitan mendorong pengembangan industri pertanian yang berinovasi berdasarkan riset untuk meningkatkan nilai tambahnya
	Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep <i>Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industri (CCI))</i> juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan <i>Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE)</i> di wilayah-wilayah perkotaan	✓		Saat ini Kota Banjar memiliki potensi wisata alam seperti Wisata Air di sungai Citanduy, Situ Mustika, dan Situ Leutik dan Wisata Agri di Desa Batulawang dan Desa Binangun. Destinasi wisata tersebut maupun destinasi wisata yang serupa dapat dikembangkan lebih baik lagi. Pengembangan MICE juga dapat menjadi opsi bagi Kota Banjar
	Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas dan <i>anvillary</i> yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (<i>Integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism</i> , dan industri/ekonomi kreatif) serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi <i>urban & health/medical</i>			Kota Banjar tidak termasuk dalam kawasan strategis pariwisata tersebut



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	<i>tourism</i> seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang			
	Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung, Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih	✓		Kota Banjar merupakan salah satu kawasan strategis pertanian yang perlu dikembangkan melalui inovasi untuk peningkatan nilai komoditas pangan serta peningkatan efisiensi produksi bahan pangan melalui pemanfaatan teknologi
	Pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah, peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi pertanian yang ramah lingkungan	✓		
	Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan	✓		Pengembangan perikanan budidaya pada Kota Banjar diperlukan terutama menggunakan teknologi perikanan dan menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan ketahanan pangan secara tidak langsung



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	pemanfaatan potensi <i>blue energy</i> pada perairan-perairan tersebut			
	Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital	✓		Peningkatan kapasitas SDM yang adaptif serta kompeten melalui berbagai upaya tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Banjar
	Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital	✓		
	Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan <i>urban farming</i> , penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT), pengembangan <i>Transit Oriented Development (TOD)</i> dan transportasi hijau, penerapan <i>smart city</i> dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan <i>creative financing</i>	✓		Kota Banjar sebagai kota baru merupakan wilayah perkotaan yang harus berkembang dengan prinsip inklusif dan berwawasan lingkungan serta terintegrasi dengan wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi harus terus terjaga bersamaan dengan menjaga lingkungan untuk menjaga keberlanjutan wilayah
	Pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>) dan lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (<i>cross prominent stakeholder</i>) dimulai dengan Kota Metropolitan Jakarta dan Surabaya		✓	



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung	✓		
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (<i>global city</i>), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember	✓		
Transformasi Ekonomi: Pembangunan ketenagalistrikan	Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa		✓	Apabila kapasitas penghasil listrik hijau di luar Kota Banjar akan bertambah dan memberikan suplai listrik ke Kota Banjar, maka ketergantungan listrik Kota Banjar terhadap energi tidak terbarukan akan berkurang. Maka dari itu, diperlukan penyediaan prasarana listrik yang memadai agar dapat memasok listrik secara merata
	Mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (<i>smart grid</i>) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di wilayah Jawa serta	✓		



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan			
	Meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (<i>variable renewable energi/VRE</i>) lebih banyak		✓	
	Mengembangkan sistem penyimpanan energi (<i>energy storage system/ESS</i>) untuk mengatasi intermitensi		✓	
	Mengembangkan interkoneksi antar wilayah	✓		
	Mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik (<i>electric vehicles</i>) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil	✓		
Transformasi Ekonomi: digital	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok	✓		Pengembangan digitalisasi dan perbaikan infrastruktur komunikasi akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi, yang akan mendukung berbagai kegiatan seperti ekonomi, proses pendidikan, dan interaksi sosial. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik juga akan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi dan penemuan inovasi di sektor-sektor unggulan, yang nantinya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.
	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis	✓		



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)	✓		
Transformasi Tata Kelola	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	✓		Kota Banjar memerlukan upaya untuk meningkatkan keselarasan di setiap implementasi kebijakan di tingkat lokal dengan dukungan tenaga ahli yang mampu merancang kebijakan yang berkualitas, serta perlunya bukti dukungan berupa naskah akademis untuk memperkuat regulasi tersebut.
	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat	✓		Partisipasi masyarakat akan memaksimalkan potensi daerah serta meminimalisasi terjadinya konflik ke depannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	✓		Adanya respons yang cepat terhadap aduan masyarakat akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM AS, dan pengelolaan aset daerah	✓		Keamanan data masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah menjadi hal krusial, sehingga diperlukan adanya penguatan kapasitas pemerintah dalam hal <i>cyber-security</i> untuk mencegah kebocoran data yang akan berujung pada hal yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan aset



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
				daerah secara optimal dapat mendukung keuangan daerah
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	✓		Pengembangan layanan publik secara digital tanpa prosedur yang kompleks dapat memudahkan urusan masyarakat dan berpotensi meningkatkan kepuasan mereka. Selain itu, hal ini juga mendukung penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	✓		Minimnya tindakan korupsi di wilayah pemerintahan daerah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga akan memudahkan urusan pemerintah untuk melayani masyarakat
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi	✓		SDM aparatur yang berkualitas dalam bidangnya dapat mendukung penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah dapat berjalan dengan baik
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal	✓		Adanya peningkatan keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, sehingga dapat meningkatkan rasa aman masyarakat
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung	✓		Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang layak, menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik, dsb.



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional			
	Penguatan pengendalian inflasi daerah	✓		Pengendalian inflasi di daerah bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang yang beredar di masyarakat, menjadikan perekonomian Kota Banjar tetap stabil.
Ketahanan Sosial Budaya	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	✓		Menjaga kerukunan antar etnis atau antar agama diperlukan melalui pendidikan sejak dini, sehingga dapat meminimalisasi konflik SARA yang dapat terjadi di masa depan
	Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa	✓		Pelestarian budaya lokal serta nilai-nilai luhur kebudayaan akan terus dilaksanakan, hal ini juga dapat diintegrasikan dengan pariwisata yang ada di Kota Banjar
	Pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan dukungan bagi pelaku seni dan budaya lokal untuk mendorong inklusivitas	✓		
	Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui <i>hub</i> kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan	✓		



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	perekonomian lokal di Wilayah Jawa			
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	✓		Kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai wisata berbasis sosial budaya. Pengelolaan kearifan lokal sebagai wisata dapat berkelanjutan dengan ketahanan keluarga yang tinggi melalui dimensi ekonomi, sosial budaya, dan sosial psikologi
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	✓		Kota Banjar sendiri masih belum mampu menyelenggarakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara optimal, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang rendah dan pengaruh media sosial. Selain itu, masih terdapat tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Banjar. Maka dari itu diperlukan kebijakan terkait untuk memberdayakan perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	✓		
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa	✓		
Ketahanan Ekologi	Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi	✓		Kualitas lingkungan hidup harus terus diperhatikan, terutama kualitas air di Kota Banjar. Hal ini dikarenakan Kota Banjar memiliki Bendungan Leuwekeris dan dilewati Sungai



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta			Citanduy, dimana buruknya kualitas air di Sungai Citanduy akan memengaruhi wilayah hilir
	Diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan	✓		Kota Banjar sebagai wilayah agropolitan akan terlibat dalam diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang juga bertujuan untuk mencegah <i>stunting</i> . Pemenuhan gizi yang seimbang dan variasi dalam konsumsi makanan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam jangka panjang. Proses diversifikasi pangan juga harus mempertimbangkan ketersediaan lahan dan sumber daya yang ada.
	Peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien	✓		Bendungan Leuwekeris dibangun untuk meningkatkan ketersediaan air baku dan menjaga ketersediaan air untuk irigasi dimana secara tidak langsung mengelola sumber daya air secara efisien
	Penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian	✓		Alih fungsi lahan pertanian perlu dibatasi untuk mempertahankan ketahanan pangan, meskipun terdapat peningkatan kebutuhan lahan terbangun karena adanya peningkatan jumlah penduduk
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa	✓		Modernisasi irigasi menjadi langkah strategis untuk menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, dimana secara tidak langsung dapat meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan air
	Mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi <i>clean energy</i> untuk meningkatkan efisiensi keandalan sistem energi terbarukan melalui	✓		Penggunaan energi terbarukan, baik secara individu maupun secara masif, harus terus didorong dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Tindakan ini menjadi upaya untuk mengurangi gas rumah kaca



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan			
	Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif	✓		
	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi	✓		
	Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi <i>clean energy</i> dan memperluas akses ke pasar global	✓		
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis pemanfaatan hutan, kesatuan lansekap yang ramah kaum rentan	✓		Pengembangan tata ruang harus mempertahankan kawasan lindung, termasuk ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat menjadi wadah interaksi sosial bagi kaum rentan
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung			Kota Banjar tidak memiliki hutan lindung
	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya badak dan owa jawa			Hutan di Kota Banjar adalah hutan produksi. Kota Banjar tidak memiliki mangrove
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup,	✓		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rencana tata ruang menjadi instrumen yang menjamin perencanaan tata ruang telah menyesuaikan daya



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona <i>megathrust</i> di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan			dukung dan daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, risiko bencana, serta lintasan satwa. Adanya KLHS rencana tata ruang menjadi syarat pengesahan rencana tata ruang tersebut
	Penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kadung Sepur, Gerbang Kertosusila dari banjir 100 tahunan			Kota Banjar bukan wilayah pesisir
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	✓		Peningkatan resiliensi daerah melalui mitigasi bencana struktural (sinkronisasi rencana pembangunan dengan penanggulangan bencana) serta mitigasi non-struktural (peningkatan kapasitas ketahanan bencana melalui sistem peringatan dini maupun kesadaran masyarakat) harus selalu diupayakan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya ini juga harus diterapkan pada wilayah Kota Banjar. Dengan menerapkan hal tersebut, maka dapat mengurangi korban serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan bencana
	Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa	✓		Apabila kapasitas penghasil listrik hijau di luar Kota Banjar akan bertambah dan memberikan suplai listrik ke Kota Banjar, maka ketergantungan listrik Kota Banjar terhadap energi tidak terbarukan akan berkurang.



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
Ketahanan sumber daya air terpadu	Menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara wilayah Jawa			Kota Banjar bukan wilayah pesisir
	Pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni	✓		Kota Banjar memiliki Bendungan Leuwikeris yang bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.
	Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai	✓		Kota Banjar sebagai wilayah yang memiliki banyak kawasan pertanian memerlukan infrastruktur irigasi yang baik untuk menjadikannya sebagai wilayah agropolitan
	Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbang kertokusila dari banjir kala ulang 100 tahun			Kota Banjar bukan wilayah pesisir
	Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan		✓	Normalisasi Sungai Citanduy yang berada di Kota Banjar dapat dilakukan dengan memperlebar, meningkatkan kedalaman aliran atau memperhalus permukaan sungai. Hal ini dilakukan meminimalisasi banjir, baik di Kota Banjar sendiri maupun menahan kiriman air ke daerah hilir
	Penerapan kebijakan <i>Zero Delta Q</i>	✓		Bencana banjir mulai sering terjadi di Kota Banjar, sehingga dibutuhkan aksi untuk mengurangi risiko banjir, di antaranya dengan kebijakan <i>Zero Delta Q</i> (sebelum dan sesudah pembangunan tidak boleh menimbulkan luapan pada sungai), pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem
	Pemanfaatan prasarana publik sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir	✓		



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Penerapan <i>Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS)</i> berbasis teknologi digital	✓		pengendali banjir, serta <i>early warning system</i> banjir untuk mengingatkan masyarakat
	Pengelolaan wilayah pesisir terpadu terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan			Kota Banjar bukan wilayah pesisir
Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana: percepatan pembangunan wilayah	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa	✓		Dibutuhkan kerjasama antara berbagai sektor dalam rangka melestarikan kawasan lindung Kota Banjar. Di Kota Banjar, perlu dilakukan upaya untuk mencegah perluasan perkotaan yang melibatkan kawasan lindung pertanian, agar ketahanan pangan dapat terjaga dan terus meningkat. Selain itu, Kota Banjar perlu mempertimbangkan setiap kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (misalnya, dampak buruk bagi wilayah lain) agar tidak menjadi masalah lingkungan di daerah lain.
	Penuntasan RDTR Kab/Kota serta kewenangan tata ruang laut	✓		RDTR sebagai kebijakan spasial yang lebih rinci menjadi panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang/wilayah sesuai pemanfaatan yang seharusnya (dimana sudah mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup). RDTR juga menjadi kepastian hukum yang lebih detail bagi pelaku usaha, sehingga penyelesaiannya diperlukan secepatnya
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria			
	Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di			✓



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	antaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (<i>global port</i>), serta penguatan pelabuhan lainnya sebagai <i>major port</i> atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah)			perdagangan di Kota Banjar. Adanya peningkatan kapasitas dan pembaruan jalur transportasi dapat memperlancar perdagangan yang ada di Kota Banjar, baik arus barang masuk maupun keluar Kota Banjar.
	Pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu		✓	
	Peningkatan konektivitas Sumatra-Jawa-Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk-Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatra (Merak-Bakauheni) untuk menurunkan biaya logistik		✓	
	Optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta		✓	



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk <i>aerocity</i> serta pengembangan bandara kargo			
	Pengembangan jalan tol wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah	✓	✓	Tol Getaci yang menjadi tol di wilayah Selatan Jawa dan juga pengembangan kereta angkutan barang akan menjadi infrastruktur yang mempermudah arus perdagangan, dimana salah satu exit tolnya akan berdekatan dengan Kota Banjar dan salah satu stasiun kereta apinya berada di Kota Banjar
	Pembangunan kereta antar kota termasuk pengembangan kereta cepat (Jakarta - Surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta - Bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antar moda	✓		
	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang	✓		Transportasi umum perlu dikembangkan untuk mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitasnya. Di sisi lain, kehadiran transportasi umum dapat meminimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan serta kegiatan bisnis nasional dan global pasca pemindahan ibu kota negara			Kota Banjar tidak termasuk dalam wilayah Metropolitan Jakarta
	Penurunan ketimpangan antara desa-kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antar wilayah		✓	Peningkatan konektivitas antar wilayah di bagian selatan Jawa dilakukan saat ini dilakukan dengan pembangunan Tol Getaci. Tol ini akan bermanfaat bagi perekonomian daerah sekitarnya, sehingga kesenjangan wilayah Jawa bagian utara dan selatan dapat dipersempit
	Percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan <i>access to market</i> dan <i>access to information</i> pada kawasan-kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar	✓		Kota Banjar termasuk dalam Jawa Barat bagian selatan dimana memerlukan percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi desa-kota untuk menghilangkan kesenjangan dengan wilayah non-afirmasi
	Pengembangan sistem <i>smart grid</i> ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi	✓		Apabila kapasitas penghasil listrik hijau di luar Kota Banjar akan bertambah dan memberikan suplai listrik ke Kota Banjar, maka ketergantungan listrik Kota Banjar terhadap energi tidak terbarukan akan berkurang.



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	interkoneksi dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan			
Penyediaan sarana dan prasarana dasar	Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan karakteristik daerah dan kepadatan	✓		Peningkatan jumlah atau persentase rumah layak huni harus terus ditingkatkan
	Optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal	✓		Untuk mempertahankan kondisi lingkungan hidup yaitu mengurangi degradasi lahan dan pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pembangunan hunian vertikal akan diutamakan dibandingkan dengan rumah tapak
	Peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan	✓		Peremajaan kota di berbagai aspek dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini diperlukan bagi Kota Banjar. Dalam konteks perumahan dan kawasan permukiman, tindakan yang dilakukan dapat berupa perbaikan kualitas kawasan hunian menjadi sesuai standar
	Pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian	✓		Skema sewa-beli hunian adalah salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi <i>backlog</i> hunian, terutama pada generasi muda
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah	✓		Peningkatan penyediaan akan infrastruktur air minum serta sanitasi yang memadai merupakan elemen kunci dalam standar untuk hunian yang layak. Upaya ini harus terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
	Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	✓		
	Eliminasi praktik Buang Air Besar (BABS) di seluruh rumah tangga	✓		Kebijakan ini diperlukan di Kota Banjar guna meminimalisasi wilayah kumuh dan meningkatkan kesehatan masyarakat



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
	Peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis	✓		Diperlukan manajemen sampah yang berkelanjutan dengan memaksimalkan upaya pengurangan sampah dan menangani sampah tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik, seperti mengurangi sampah sejak awal juga harus ditingkatkan. Penyediaan sarana prasarana yang memadai akan memaksimalkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan
Kesinambungan Pembangunan	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	✓		Harmonisasi dokumen perencanaan daerah dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah di tingkat atasnya harus dilakukan
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi	✓		Harmonisasi dokumen perencanaan ruang dan wilayah juga perlu dilakukan dengan teliti, karena ini akan menjadi pedoman bagi pengusaha dan masyarakat secara luas, mencegah terjadinya masalah di masa mendatang.
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional	✓		Adanya akuntabilitas kinerja pemerintah terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja secara Akuntabel dapat menjadi alat pengendali pencapaian kinerja daerah
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	✓		Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang terjadi dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah
	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	✓		Adanya sinkronisasi data pembangunan melalui Sistem Aplikasi yang terintegrasi dapat mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah. Seperti



Agenda	Arah Kebijakan RPJPN Pulau Jawa	Relasi dengan Kota Banjar		Penjelasan Relevansi
		Langsung	Tidak langsung	
				digitalisasi sistem pengaduan, pengelolaan administrasi, dan perizinan akan mempermudah pelayanan masyarakat
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>	✓		Investasi selain dari APBN sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian di Kota Banjar. Tidak hanya di Kota Banjar saja, investasi KPBU pada proyek strategis nasional yang melibatkan Kota Banjar juga dapat menguntungkan Kota Banjar dalam jangka panjang



2.7.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat

Pertumbuhan kewilayahan Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap perekonomian wilayah Jawa Barat sebesar 12,65 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2045 wilayah Jawa Barat diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 17,79 persen penduduk Indonesia, sebesar 89,3 persen diperkirakan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2035, dan akan makin meningkat pada tahun 2045.

Arahan RPJPN Tahun 2025-2045, Wilayah Jawa akan menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan” melalui 5 (lima) prioritas. Untuk mendukung terwujudnya “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”, arah kebijakan Provinsi Jawa Barat dengan menyusun Wilayah Pengembangan (WP) yaitu :

- a. Wilayah Pengembangan Badebekpunjur
- b. Wilayah Pengembangan Purwasuka
- c. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning
- d. Wilayah Pengembangan Priangan Timur – Pangandaran
- e. Wilayah Pengembangan Sukabumi dan sekitarnya
- f. Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung

Dari berbagai pengembangan WP Provinsi Jawa Barat yang mempunyai dan berkaitan langsung dengan Kota Banjar pada Wilayah Pengembangan (WP) Wilayah Pengembangan Priangan Timur – Pangandaran.

Pengembangan WP Priangan Timur – Pangandaran merupakan pengembangan dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran Kalipucang – Segara Anakan serta sebagai antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus untuk mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan serta pengembangan kegiatan budidaya



yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah ini. WP ini meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; serta mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.

Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.

Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.



2.7.3 Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW Kota Banjar Tahun 2024-2044

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, dengan Kebijakan Wilayah Pengembangan (WP) arahan Wilayah Pengembangan Priatim – Pangandaran yaitu :

- a. Tema pengembangan yaitu mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan daerah bagian Selatan
- b. Arah pengembangan yaitu melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL
- c. Fokus pengembangan pada wilayah Kota Banjar yaitu diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sektor unggulan dan potensial wilayah adalah kehutanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata

WP Priangan Timur-Pangandaran sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

Berdasarkan rencana pengembangan sistem perkotaan, Kota Banjar ditetapkan sebagai PKL, yang mempunyai fungsi tertentu dengan skala pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dimana sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral.

Fokus pengembangan Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan perdagangan,



jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Sistem pusat permukiman di Kota Banjar adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu wilayah berperan untuk melayani kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. PKL berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi, dengan skala kegiatan pelayanan untuk seluruh wilayah kota.

Sementara itu, dalam lingkup yang lebih kecil menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2024-2044, wilayah-wilayah di Kota Banjar terbagi menjadi pusat pelayanan kota (PPK), sub pusat pelayanan kota (SPPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

Dalam RTRW Kota Banjar Tahun 2023-2043, terdapat tiga kawasan strategis yaitu Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Sosial Budaya, dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan.

1. Perwujudan Ruang

Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terkait pada Kota Banjar, adalah :

- a. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan:
 - 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi
 - 2) Pembangunan Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi
- b. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan:
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit Tipe C



- 2) Pembangunan Puskesmas Poned
- c. Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya:
 - 1) Terminal agribisnis
 - 2) Pasar
 - 3) Jasa keuangan
 - 4) IPAL industri komunal
 - 6) Lapangan olahraga/ruang publik
 - 7) Tempat atraksi budaya
- d. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman:
 - 1) Drainase
 - 2) Jalan Lingkungan
 - 3) TPA Lokal
 - 4) Fasilitas TPST
 - 5) SPAM IKK
 - 6) SPALD komunal
- e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi:
 - 1) Peningkatan akses jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya
 - 2) Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum

2. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Provinsi Jawa Barat pada wilayah Kota Banjar, meliputi :

- a. Rencana jalan arteri primer :
 - Jalan Raya Banjar;
 - Bts. Kota Banjar - Bts. Prov. Jateng
 - Jalan Raya Majenang;
 - Bts. Kota Banjar - Kali Pucang.
 - Jalan Parangsari
 - Jalan Letjen. Suwanto;
 - Jalan Raya Batulawang;



- Raya Banjarsari (Banjarsari – Kota Banjar);
- b. Rencana Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) :
 - Jalan Raya Cimaragas/Batas Kota Banjar
 - Jalan Perintis Kemerdekaan
- c. Rencana Jalan TOL Banjar - Pangandaran
- d. rencana reaktivasi jalur kereta api Cijulang–Pangandaran–Banjar;
- e. Jaringan irigasi
 - kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Provinsi : D.I Bantarheulang
 - Kewenangan Pemerintah Pusat lintas Daerah Kabupaten/Kota : D.I lakbok
 - kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota :
 1. DI Cikembang di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
 2. DI Gunung Putri di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;
 3. DI Wangundireja di Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis;

3. Pola Ruang

Rencana pola ruang Provinsi Jawa Barat pada wilayah Kota Banjar, terdiri dari :

Kawasan Lindung meliputi :

- a. Badan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar waduk dan danau/situ

Kawasan Budidaya, meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi
- b. Kawasan Pertanian meliputi Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan, dan Kawasan perternakan
- c. Kawasan perikanan budi daya di darat
- d. Kawasan peruntukan industri dengan luasan kurang dari 150 Ha
- e. Kawasan pariwisata yaitu Kawasan Budaya dan Alam di Priangan dan sekitarnya



- f. Kawasan permukiman yang mencakup dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan

4. Kawasan Khusus dan Ketentuan Kawasan Khusus

Rencana Kawasan khusus Provinsi Jawa Barat ruang pada wilayah Kota Banjar, meliputi

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- b. Kawasan rawan bencana, meliputi :
 - Kawasan rawan tanah longsor kategori tingkat sedang dan kategori tingkat tinggi
 - Kawasan rawan banjir kategori tinggi
 - Kawasan rawan banjir bandang kategori tinggi,
 - Kawasan rawan cuaca ekstrim kategori tinggi
 - Kawasan rawan kekeringan kategori tingkat tinggi
 - Kawasan rawan kebakaran hutan
- c. Cagar budaya yaitu bangunan, struktur, situs dan kawasan yang diduga cagar budaya dengan melihat kriteria cagar budaya
- d. Kawasan resapan air
- e. Kawasan sempadan, meliputi Kawasan sempadan sungai danau/situ, sempadan mata air
- f. alur pipa migas,
- g. alur kabel telekomunikasi
- h. kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan Ekonomi akan menjadi poros perekonomian Kota Banjar dimana akan banyak terjadi kegiatan jual-beli barang maupun jasa dan menjadi tempat mata pencaharian masyarakat Kota Banjar. Lokasi kawasan strategis ini berada di empat lokasi utama, yaitu:



1. Kawasan Pusat Perkotaan di Kelurahan Banjar, Mekarsari, Hegarsari sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa
2. Kelurahan Hegarsari sebagai kawasan wisata alam
3. Kecamatan Langensari dan Pataruman sebagai pusat agropolitan dengan fungsi kawasan agro bisnis dan agro wisata
4. Kawasan peruntukan industri skala regional di Kelurahan Situbatu Untuk mendukung Kawasan Strategis Pusat Pertumbuhan Ekonomi, maka akan disediakan sarana prasarana yang memadai yang berlokasi pada:

1. Jaringan Jalan perkotaan
2. Jaringan Jalan Wisata
3. Jaringan Jalan Industri
4. Kawasan perdagangan dan superblok di Kelurahan Banjar dan kelurahan Mekarsari
5. Daerah Tujuan Wisata
6. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
7. Kawasan perkebunan rakyat dan hortikultura
8. Kawasan dan Sentra Industri
9. Instalasi Limbah

Kawasan strategis yang kedua yaitu Kawasan Strategis Sosial Budaya yang akan memberdayakan warisan budaya serta memanfaatkan bentang alam yang ada menjadi kawasan pariwisata untuk memberdayakan ekonomi lokal. Lokasi kawasan strategis ini terletak pada tiga lokasi, yaitu:

1. Kawasan bangunan lama di Kelurahan Hegarsari
2. Kawasan wisata alam, desa wisata dan atraksi budaya di Kelurahan Cibeureum
3. Kawasan wisata alam, kuliner dan peristirahatan ciri khas budaya lokal di Kelurahan Hergarsari

Untuk kawasan tersebut terdapat program untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan sosial budaya seperti jaringan



jalan kawasan, jaringan jalan wisata, dan sarana dan prasarana penunjang kawasan.

Kemudian kawasan strategis yang ketiga yaitu Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan dengan program utama Pengendalian dan Penataan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan. Kawasan ini berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan perkotaan yang pada umumnya menyebabkan degradasi lingkungan. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah bencana banjir dengan mengendalikan air tanah serta menjaga kualitas lingkungan secara keseluruhan. Lokasi kawasan strategis ini berada pada kawasan rimba kota di Kelurahan Sukamukti dan kawasan perlindungan setempat di sepanjang sempadan sungai.

2.7.4 Proyek/Kegiatan Strategis

Terdapat beberapa kebijakan pengembangan Proyek/Kegiatan strategis nasional diantaranya :

- a. Perpes No. 72 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Jawa Bali
Arahan struktur ruang pada Kota Banjar dalam RTR Jawa Bali adalah :
 - Jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa;
 - Jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Banjar-Kalipucang;
 - Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa;
 - Pemantapan jaringan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa yaitu Cijulang-Pangandaran-Banjar yang melayani PKW Pangandaran;
 - Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah pada CAT;
 - Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada DI untuk memperetahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;



- program Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pelayanan Terminal Tipe A di Terminal Indihiang dan Terminal Banjar.

Arahan pola ruang pada Kota Banjar dalam RTR Jawa Bali adalah :

- Pertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT;
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
- Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, serta jaringan prasarana dan sarana.

Kawasan Strategis Nasional Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan–Nusakambangan atau disingkat (KSN Pacangsanak).

Arahan kebijakan rencana Kawasan Strategis pada wilayah Kota Banjar yaitu : Kawasan Strategis Nasional Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan–Nusakambangan atau disingkat (KSN Pacangsanak), meliputi :

1. Kota Banjar ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Primer
2. Rencana jalan meliputi Jalan Arteri Primer :

- Batas Kota Ciamis – Batas Kota Banjar
- Jalan Karangkamulyan (Ciamis – Banjar);
- Jalan Letjen. Suwanto (Banjar);
- Jalan Raya Banjar (Banjar);
- Batas Kota Banjar - Batas Provinsi Jateng;
- Batas Kota Banjar – Kalipucang
- Jalan Raya Majenang (Banjar);
- Jalan Parangsari (Banjar);
- Jalan Raya Banjarsari (Banjarsari)
- Jalan Raya Batulawang (Banjar);



3. Terminal tipe A kota Banjar di Kecamatan Banjar di Kota Banjar;
4. Jaringan jalur kereta api antarkota : Banjar – Cijulang.
5. Rencana pengembangan Pelabuhan Langensari di Kecamatan Langensari, Pelabuhan Pataruman di Kecamatan Pataruman pada Kota Banjar;
6. Saluran Udara Tegangan Tinggi :
 - SUTT 70 kV Banjar - Pangandaran (1); dan SUTT 70 kV Banjar - Pangandaran (2);
 - SUTT 150 kV Ciamis - Banjar (1); SUTT 150 kV Ciamis - Banjar (2);
 - SUTT 150 kV Banjar - Majenang (1); SUTT 150 kV Banjar - Majenang (2).
7. GI 70 kV Banjar di Kecamatan Banjar pada Kota Banjar;
8. Sumber air permukaan pada situ, yaitu : Situ Bentang dan Situ Leutik di Kecamatan Banjar, Situ Karangpanimbal, Situ Buaya Putih, dan Situ Mustika di Kecamatan Purwahaerja pada Kota Banjar;
9. Sumber air permukaan pada embung, yaitu : Embung Gunung Sangkur di Kecamatan Banjar pada Kota Banjar
10. penetapan Sumber air permukaan pada bendung yaitu : Bendung Pataruman di Kecamatan Pataruman pada Kota Banjar
11. Cadangan Air Tanah (CAT) yaitu:
 - CAT Ciamis yaitu: di Kecamatan Purwahaerja, Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Pataruman pada Kota Banjar
 - CAT Sidareja : Kecamatan Purwahaerja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langensari pada Kota Banjar;
12. Sistem jaringan irigasi :
 - D.I. Bantarheulang : di Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Purwahaerja pada Kota Banjar.
 - D.I. Lakbok Utara : di Kecamatan Langensari dan Kecamatan Pataruman pada Kota Banjar
13. Sistem pengendalian banjir :



- Tanggul Cijolang di Kecamatan Purwaharja pada Kota Banjar.
 - Tanggul Ciseel Kiri dan Rawapitik di Kecamatan Pataruman Kota Banjar
 - Tanggul Kanan Citanduy di Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langensari pada Kota Banjar
14. IPAL : yaitu IPAL Banjar di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar
 15. Lokasi TPA regional : yaitu TPA Banjar di Kecamatan Banjar pada Kota Banjar
 16. sempadan sungai : di Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja pada Kota Banjar;
 17. pola ruang Zona B3 terdiri atas :
 - kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang; dan.
 - kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah :
yaitu di : sebagian Kecamatan Banjar, sebagian Kecamatan Langensari, sebagian Kecamatan Pataruman, dan sebagian Kecamatan Purwaharja pada Kota Banjar;
 18. Arahan Zona B4 : terdiri atas:
 - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - kawasan peruntukan hortikultura;
 - kawasan peruntukan perkebunan;
 - kawasan peruntukan peternakan; dan
 - kawasan peruntukan perikanan.
yaitu di : sebagian Kecamatan Banjar, sebagian Kecamatan Langensari, sebagian Kecamatan Pataruman, dan sebagian Kecamatan Purwaharja pada Kota Banjar;



Berikut ini merupakan program utama dan lokasi pengembangan sistem pusat permukiman berdasarkan RTRW Kota Banjar Tahun 2023-2043 :

Tabel 2. 42
Program Utama Sistem Pusat Permukiman Kota Banjar

Jenis Sistem Pusat Permukiman / Pelayanan	Program Utama atau Proyek Strategis	Lokasi
Pusat Pelayanan Kota	Pengembangan kawasan pusat kota	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Karangpanimban
	Penetapan dan pengembangan Kawasan Pemerintahan Kota Banjar	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Purwaharja
	pengembangan kawasan Perdagangan dan Jasa serta perkantoran	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Purwaharja
	Pengembangan fungsi kesehatan	Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman
	Pengembangan fungsi pendidikan	Kelurahan Mekarsari dan Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman
	Pengaturan kawasan perumahan di seluruh bagian pusat kota	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Purwaharja
	penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh) persen	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Purwaharja
	Penetapan dan pengembangan kawasan	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari,



Jenis Sistem Pusat Permukiman / Pelayanan	Program Utama atau Proyek Strategis	Lokasi
	fasilitas umum dan fasilitas sosial	Kelurahan Pataruman, Kelurahan Purwaharja
	Penetapan dan pengembangan kawasan transportasi	Kelurahan Banjar dan Kelurahan Hegarsari
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	1) Pusat Pelayanan Kota: Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman 2) Sub Pusat Pelayanan Kota Banjar: Wilayah Kecamatan Banjar 3) Sub Pusat Pelayanan Kota Banjar: Wilayah Kecamatan Pataruman 4) Sub Pusat Pelayanan Kota Banjar: Wilayah Kecamatan Purwaharja 5) Sub Pusat Pelayanan Kota Banjar: Wilayah Kecamatan Langensari
	Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Banjar	Pusat Pelayanan Kota: Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari
	Penyusunan Masterplan Kawasan di Kota Banjar	Pusat Pelayanan Kota: Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari
Sub Pusat Pelayanan Kota	Penetapan dan pengembangan kawasan perumahan di seluruh bagian kota	Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari
	Penetapan dan pengembangan sub pusat kota	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Karangpanimban



Jenis Sistem Pusat Permukiman / Pelayanan	Program Utama atau Proyek Strategis	Lokasi
	Penetapan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1) Kelurahan Balokang, Kelurahan Situbatu 2) Kelurahan Purwaharja, Kelurahan Karangpanimbal 3) Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Sukamukti 4) Kelurahan Langensari, kelurahan Muktisari
	Penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata	1) Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Jajawar, kelurahan Balokang 2) Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman
	Penetapan dan pengembangan kawasan pertanian	Kecamatan Langensari, Kecamatan Pataruman
	Penetapan dan pengembangan kawasan industri	Kelurahan Situbatu, Kelurahan Binangun, Kelurahan Sarimukti, Kelurahan Batulawang
	Penyusunan Rancang Kawasan	
	Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Kota	Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari
	Penyusunan Masterplan Kawasan	Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari
Pusat Pelayanan Lingkungan	Penetapan dan pengembangan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada kawasan permukiman	Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari
	Penetapan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Balokang, Kelurahan Situbatu Kelurahan Purwaharja, Kelurahan Karangpanimbal Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman,



Jenis Sistem Pusat Permukiman / Pelayanan	Program Utama atau Proyek Strategis	Lokasi
		Sukamukti Kelurahan Langensari, kelurahan Muktisari
	Penetapan dan pengembangan kawasan fasilitas umum dan sosial	Kelurahan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Hegarsari, Kelurahan Pataruman, Kelurahan Karangpanimban

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat *mandatory*.

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1.1.1 Geografi

Permasalahan aspek geografi meliputi alih fungsi lahan dan lingkungan hidup, kebencanaan dan ekosistem, sebagai berikut :

- **Penggunaan Lahan dan penurunan ruang terbuka hijau**

Perubahan fungsi sebagian atau seluruh Kawasan lahan dari fungsi semula (sesuai yang direncanakan) menjadi fungsi lain seiring dengan kebutuhan untuk mengakomodasi peningkatan populasi. Untuk kawasan perkotaan di Kota Banjar memiliki nilai yang menurun di tahun 2022. Sedangkan menurut proyeksi BAU



(Business as Usual) jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang di Kota Banjar akan terus mengalami penurunan dan belum memenuhi target meningkat sehingga diperlukan suatu upaya tambahan agar dapat mencapai target

- **Memiliki risiko bencana dengan kelas risiko tinggi**

Kota Banjar tergolong indeks kerentanan perubahan iklim ke dalam kelas Tinggi, dengan Indeks resiko bencana di angka 145,04 tahun 2022. Penurunan kualitas udara, Penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya air Pencemaran limbah peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan segala keterbatasan yang ada melalui program-program pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Pelaksanaan proklamasi oleh masyarakat dalam upaya pengendalian kekeringan dan banjir, serta peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim. Kegiatan lain yang dilakukan masyarakat adalah pengelolaan sampah dan limbah padat, penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, budidaya pertanian dan peningkatan tutupan vegetasi.

- **Degradasi dan kurangnya perlindungan ekosistem darat**

Jasa Ekosistem Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Kota Banjar di dominasi pada kelas sangat rendah, dengan luas 4.035,13 Ha (31% dari total luas wilayah).

3.1.1.2 Demografi

Identifikasi permasalahan demografi di Kota Banjar mencakup pertumbuhan penduduk, pemerataan dan kepadatan penduduk, serta tingkat urbanisasi.

- **Laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif,**

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banjar yang fluktuatif selama periode tersebut mencerminkan dedikasi dan usaha yang



dilakukan oleh pemerintah daerah serta pihak terkait untuk mengendalikan jumlah penduduk di Kota Banjar untuk dapat terus dipertahankan. Faktor-faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk meliputi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Hal ini akan berpengaruh dengan luas wilayah Perkotaan Kota Banjar yang kecil sehingga berpengaruh pada kepadatan penduduk.

- **Kepadatan penduduk yang tinggi,**

kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tahun 2022 mencapai 1.563,76. Hal ini sering kali mengindikasikan tingkat urbanisasi yang tinggi, infrastruktur yang padat, dan permukiman yang padat. Kepadatan penduduk yang tinggi.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan kesejahteraan Ekonomi tidak terlepas pada sector ekonomi secara makro, hal ini terletak pada bagaimana daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan peningkatan PDRb per Kapita masyarakat Kota Banjar.

- **Laju pertumbuhan ekonomi belum optimal,**

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi Jawa Barat, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Banjar untuk tahun 2023 sebesar 4,63% masih di bawah pertumbuhan provinsi Jawa barat yang sebesar 5,00%. Hal yang perlu dicermati adalah



walaupun tahun 2023 Kota Banjar mengalami peningkatan ekonomi namun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar yang terendah se-Provinsi Jawa Barat.

- **PDRb Per Kapita masih rendah,**

Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur. Pendapatan perkapita digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu wilayah, di Kota Banjar tahun 2023 dengan nilai 17,73 juta/orang/Tahun, lebih rendah dari PDRB Per Kapita provinsi Jawa Barat di angka 33,48 juta rupiah.

- **Optimalisasi Laju inflasi,**

Besaran inflasi Kota Banjar secara umum mengikuti tingkat inflasi Kota Tasikmalaya, dalam hal ini BPS tidak menghitung inflasi secara khusus untuk Kota Banjar karena bukan termasuk Kota penghitung IHK (Indeks Harga Konsumen) sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan angka inflasi sendiri, sehingga harus merujuk pada Kota terdekat yang mengeluarkan IHK yaitu Kota Tasikmalaya. capaian inflasi yang baik di tahun 2023 merupakan bentuk dari koordinasi dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak melalui TPIP dan TPID dalam mengendalikan gejolak harga komoditas di tengah ketidakpastian yang masih tinggi dan adanya kenaikan nilai Indeks Harga Konsumen yang cukup tinggi yang merupakan imbas dari adanya penyesuaian harga BBM yang memicu kenaikan harga komoditas

- **Angka kemiskinan,**

tingkat kemiskinan di Kota Banjar mengalami penurunan, namun hal tersebut di ikuti oleh menurunnya indeks kedalaman kemiskinan, hal ini mengidentifikasi bahwa penurunan kemiskinan di Kota Banjar tahun 2023 masih belum diimbangi dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat secara signifikan



3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

- **Indeks Pembangunan Manusia masih rendah,**

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2023, IPM Kota Banjar yang sebesar 73,08 lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat sebesar 73,74 dan nasional sebesar 74,39.

- **Fokus Seni Budaya dan olahraga,**

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga, pentingnya pembinaan dan peningkatan sarana prasarana.

3.1.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

- **PDRB Pengeluaran**

merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB pengeluaran dapat



diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja).

3.1.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan.

- **Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah,**

hal ini diindikasikan dengan tingkat rata-rata lama sekolah setara jenjang kelas II SMP. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sector Pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan SDM, akses dan kualitas pelayanan.

3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Kondisi tingkat persentase jalan dalam kondisi baik di Kota Banjar pada tahun 2022 memang tidak mencapai target dengan deviasi antara capaian dan target sebesar 4,59%. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya :

- **Pemerataan infrastruktur dasar**

Kondisi peningkatan kemantapan jalan akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

- **Konektivitas antar wilayah**

Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu



sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kota Banjar

3.1.3.4 Daya Saing Investasi

- **Optimalisasi kepastian ruang dalam perijinan**

Kondisi iklim usaha Kota Banjar pada tahun 2024 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya. Dengan ditetapkannya Perda RTRW Kota Banjar akan memberikan kepastian investor serta Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan.

- **Perbaiki Iklim investasi**

Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

3.1.4.1 Tata Kelola Pemerintahan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Banjar. Upaya tersebut perlu didorong dengan system digitalisasi pemeritah daerah dan digitalisasi pelayanan publik, hal ini untuk terus didorong dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.



- **Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak Tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat dipertahankan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik ini telah mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan tujuan berotonomi daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengukuran sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan sehingga diperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan pada unit yang bersangkutan.

- **Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Materi muatan SPM mencakup: (1) jenis pelayanan dasar; (2) mutu pelayanan dasar; serta (3) penerima pelayanan dasar.

3.1.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah menurut Peraturan



Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah dimana dalam pemecahan masalah pokok melalui perumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah merupakan hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, pemecahan masalah dilakukan melalui rumusan strategi. Sedangkan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan atau melalui arah kebijakan/kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah.

Identifikasi pembangunan dapat diuraikan sesuai dengan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan.



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan di Kota Banjar

Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Sumber Daya Manusia: Pendidikan	Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan	Belum terpenuhinya bantuan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah Masih sedikit pendidikan non formal atau PKBM di Kota Banjar Manajemen pendidikan non formal belum dikelola dengan baik Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Belum tersedianya sarana TIK yang menunjang pelaksanaan Asesmen Nasional Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal Belum tersedianya TK Negeri di setiap kecamatan, perlu penegerian atau pembangunan Unit Sekolah Baru TK Negeri di setiap kecamatan
	Rendahnya budaya baca dan literasi masyarakat di Kota Banjar	Masih minimnya bahan bacaan untuk masyarakat Belum terpenuhinya keberagaman koleksi bahan pustaka baik cetak maupun digital Kurangnya pemahaman masyarakat dengan adanya perpustakaan digital
Sumber Daya Manusia: Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penanganan ODGJ serta tingginya <i>stunting</i>	Masih tingginya kasus TB dan HIV di masyarakat
		Masih tingginya penyakit hipertensi dan diabetes melitus di masyarakat
		Masih adanya masyarakat yang menerapkan pola makan salah
		Belum optimalnya perilaku dan budaya hidup sehat masyarakat



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>Banyaknya ODGJ terlantar yang belum tertangani secara optimal</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan sanitasi</p> <p>Masih tingginya angka prevalensi <i>stunting</i></p> <p>Belum optimalnya skrining layak hamil bagi pasangan usia subur dan calon pengantin</p> <p>Belum optimalnya sosialisasi mengenai penanganan <i>stunting</i> kepada masyarakat</p> <p>Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi</p> <p>Belum optimalnya kualitas penangan kasus kesehatan ibu dan anak</p> <p>Masih adanya ibu hamil yang belum mau memeriksakan kehamilannya sesuai standar</p>
	Belum optimalnya akses sarana, prasarana dan alat kesehatan serta peningkatan SDM Kesehatan	<p>Belum adanya Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Khusus di Kota Banjar</p> <p>Masih adanya beberapa gedung fasilitas kesehatan dan puskesmas yang belum memenuhi standar Puskesmas</p> <p>Belum terpenuhinya alat kesehatan sesuai standar</p> <p>Belum terpenuhinya kualitas alat kesehatan sesuai standar</p> <p>Masih terbatasnya SDM Kesehatan terutama dokter spesialis dan psikolog</p> <p>Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai kompetensi dan keahlian</p> <p>Belum tersedianya tenaga pendukung administrasi sehingga tenaga kesehatan merangkap sebagai tenaga adminisrasi</p>
Sumber Daya Manusia: Ketenagakerjaan	Maish rendahnya kualitas tenaga kerja	<p>Masih sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia</p> <p>Adanya ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia</p>



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		<p>Masih rendahnya SDM Tenaga Kerja yang menguasai IPTEK</p> <p>Belum optimalnya sarana pelatihan kerja</p> <p>Belum tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Mikro dari seluruh perusahaan</p> <p>Kurangnya pembinaan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi</p> <p>Adanya keterbatasan peluang atau lowongan pekerjaan untuk perempuan</p>
Sumber Daya Manusia: Daya Saing	Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum	<p>Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan</p> <p>Belum adanya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi</p> <p>Kurangnya minat perempuan dalam memahami hukum yang berlaku</p>
	Rendahnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri, organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan	<p>Rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha muda</p> <p>Terbatasnya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan (ruang kreatif) yang mendukung aktifitas pemuda</p>
	Rendahnya partisipasi dan prestasi masyarakat di bidang olahraga	<p>Masih terbatasnya tenaga keolahragaan serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai</p> <p>Belum adanya tempat pemusatan pembinaan/pelatihan olahraga</p> <p>Masih rendahnya motivasi masyarakat dalam kegiatan olahraga</p>
	Belum terkelolanya kebudayaan di Kota Banjar dengan baik	Belum adanya penetapan dari OCB (Objek Diduga Cagar Budaya) yang ada di Kota Banjar menjadi OCB (Objek Cagar Budaya)



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah	
		Tidak adanya Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sesuai dengan ketentuan yang telah memiliki sertifikat	
Sumber Daya Manusia: Pengendalian Penduduk	Belum optimalnya sinergitas dalam pengendalian penduduk	Belum akuratnya sistem <i>database</i> keluarga dalam pengendalian penduduk	
		Belum terkendalinya angka kelahiran, kematian dan migrasi	
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi	
		Rendahnya penggunaan alat kontraspesi jangka panjang	
Sumber Daya Manusia: Perlindungan Perempuan dan Anak	Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA)	Masih kurangnya jejaring dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan KtPA	
		Belum adanya ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi	
		Belum optimalnya lembaga pemenuhan hak anak	
Lingkungan Hidup	Belum optimalnya penanganan masalah limbah cair domestik dan industri	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan konservasi di sumber mata air	
		Belum tersedianya SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Kurangnya keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam upaya pengendalian pencemaran air dan belum meratanya pembangunan IPAL domestik komunal skala kawasan	
		Meningkatnya jumlah penduduk serta bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair	
	Menurunnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kepemilikan lahan di Kota Banjar didominasi oleh swasta (<i>non pemerintah</i>)	Tingginya angka alih fungsi lahan setiap tahunnya
			Ketersediaan lahan untuk pembangunan RTH sangat terbatas



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Pembagian tanggungjawab pengelolaan lahan pemakaman yang masih belum jelas, padahal untuk lahan pemakaman dikategorikan sebagai RTH
		Pendataan RTH yang belum optimal
		Kurangnya teknologi yang dapat menunjang pengelolaan sampah dengan optimal
		Kurangnya armada pengangkut sampah
		Manajemen pengelolaan sampah yang masih belum sesuai dengan target
		Belum adanya pelatihan untuk SDM pengelolaan sampah di bidang yang menaungi dan di TPS
		Masih minimnya pengetahuan sosial dan budaya masyarakat terkait dengan sampah
Transportasi	Belum diketahuinya tingkat konektivitas antar wilayah	Belum memiliki terminal Tipe C
		Belum tersedianya data untuk menghitung konektivitas antar wilayah
		Masih minimnya moda transportasi umum
	Masih rendahnya kesadaran keselamatan berkendara pada pengguna kendaraan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya uji KIR untuk meningkatkan kelaikan kendaraan angkutan umum
		Adanya peraturan uji trayek yang menjadi kendala terkait dengan usia kendaraan angkutan umum
		Kendala pendapatan yang didapat oleh pemilik kendaraan angkutan umum
		Pemahaman yang salah (kecemburuan sosial) mengenai konsep uji KIR pada kendaraan umum yang diwajibkan sementara kendaraan umum <i>online</i> (Grab, Gojek) yang tidak diwajibkan
	Peremajaan perlengkapan jalan yang masih rendah	



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan	Keterbatasan SDM untuk pemeliharaan perlengkapan jalan dibandingkan dengan perlengkapan jalan yang ada
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya Tata Ruang Wilayah Kota Banjar	Belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian ruang
		Kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang terbatas
		Terjadinya konflik kepentingan antara persediaan lahan dengan kebutuhan pembangunan dan kepemilikan tanah
		Batas kawasan yang belum jelas
		Belum optimalnya dukungan terhadap sistem informasi penataan ruang
	Belum optimalnya kondisi daerah irigasi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara bangunan jaringan irigasi
		Umur rencana bangunan yang sudah melewati masa pakai
		Kurang optimalnya Pembinaan SDM dalam melakukan pengawasan saat pembangunan
		Belum dilakukan kajian untuk perencanaan bangunan tampungan air
		Belum optimalnya dukungan aktivitas perbaikan jaringan irigasi
		Belum dilakukan kajian untuk perencanaan bangunan tampungan air
	Belum efektifnya jaringan drainase Kota Banjar dalam mengalirkan debit air permukaan	Masih dalam tahap inventarisasi data Daerah Irigasi Baru
		Belum tersedianya data jaringan drainase
Belum dilakukan inventarisasi dan pemetaan jaringan drainase		
Dimensi dan elevasi saluran belum optimal		
		Belum tersusunnya <i>master plan</i> banjir



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum optimalnya konektivitas jaringan drainase
		Belum optimalnya dukungan aktivitas perbaikan jaringan drainase
	Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan sesuai dengan volume kendaraan yang melintas	Belum optimalnya drainase jalan
		Peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya
		Konstruksi jalan belum sesuai dengan kendaraan yang melintas
		Belum optimalnya dukungan aktivitas pembangunan jalan
	Belum optimalnya pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal air minum
		Sulitnya mencari sumber air baku air minum bukan perpipaan, juga jaraknya yang sangat jauh
		Belum optimalnya kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola Instalasi Pengelolaan Air (IPA)
	Belum optimalnya pengelolaan sanitasi	Akses dan kualitas pengelolaan yang rendah
		Kelembagaan pengelolaan yang belum efektif dan efisien
		Belum adanya peraturan perundang-undang yang terkait sanitasi
		Terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan
		Rendahnya peran masyarakat dan swasta akan pentingnya sanitasi lingkungan
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana yang telah dibangun
Perumahan dan Pemukiman	Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni	Belum optimalnya pendataan rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh calon penerima



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	layak huni dan lingkungan pemukiman kumuh	Belum optimalnya partisipasi organisasi non pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan jumlah rumah layak huni sebagai perwujudan dari <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh
		Belum optimalnya kinerja Pokja PKP dan belum terbentuknya forum PKP sehingga menghambat koordinasi dan kolaborasi penanganan kawasan kumuh kewenangan pemerintah kab/kota
	Belum optimalnya pengelolaan emisi dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak	Belum tersedianya SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
		Belum terselenggaranya uji emisi dari kendaraan bermotor yang tidak wajib emisi
		Industri UMKM belum melakukan pengelolaan terhadap emisi yang dihasilkan
Kebencanaan	Masih rendahnya kualitas penanggulangan bencana	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
		Kurangnya teknologi yang dapat menunjang penanggulangan bencana
		Belum adanya dokumen penanggulangan bencana yang legal
		Masih rendahnya kapasitas SDM dalam memberikan sosialisasi dan menangani pencegahan serta penanggulangan bencana
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
	Masih rendahnya kualitas pencegahan, penanganan dan pengendalian serta	Masih rendahnya kapasitas SDM dalam memberikan sosialisasi dan menangani kegiatan pencegahan kebakaran dan non kebakaran



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Belum optimalnya waktu tanggap (<i>respon time</i>) penanganan kebakaran
	Masih banyaknya tebing yang berpotensi longsor	Kondisi topografi yang curam Belum optimalnya dukungan aktivitas pembangunan tembok penahan tanah
Ekonomi: Ketahanan Pangan	Belum memadainya sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang pertanian dan perikanan	Harga alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) tidak terjangkau oleh semua petani
		Terbatasnya sumber air untuk dimanfaatkan pertanian
		Terbatasnya Prasarana pertanian dan perikanan
		Sebagian besar usaha pertanian dan perikanan masih bersifat konvensional
	Belum optimalnya pembenihan dan pembesaran perikanan	Pembudidaya ikan sebagian besar masih konvensional belum seluruhnya menggunakan teknologi
		Sarana dan prasarana budidaya ikan belum memadai
		Tingginya harga pakan ikan
	Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan	Adanya penyesuaian harga beras dari Bulog
		Masih rendahnya produksi daging sapi dalam kota yang belum mencukupi kebutuhan daging masyarakat
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan hijauan
Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	Komoditas yang disediakan terbatas	
	Belum tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	
Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang	Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga	
	Keterbatasan modal petani	



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Lemahnya regulasi yang mengatur harga
		Skala usaha pertanian yang kecil
	Pengawasan produk pangan segar asal hewan dan tumbuhan belum optimal	Belum adanya usaha yang memiliki PSATPDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil) dan HAUS (Halal, Aman, Utuh dan Sehat)
		Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan
		Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran produk pangan asal hewan di Kota Banjar
	Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan belum optimal	Tingkat kesadaran masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masih rendah
		Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan harapan konsumsi belum optimal
	Berkurangnya jumlah petani, peternak dan pembudidaya ikan	Petani, peternak dan pembudidaya ikan memiliki luas lahan yang minim dan penghasilan yang rendah
	rendahnya regenerasi petani, peternak dan pembudidaya ikan	
Adanya Alih Fungsi lahan pertanian		Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		Tingginya laju pertumbuhan penduduk
		Dijualnya lahan pertanian oleh para petani
Ekonomi: Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan dan inovasi destinasi pariwisata	Belum tergalinya potensi wisata unggulan di Kota Banjar
		Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung kepariwisataan
		Rendahnya promosi dan penyebaran informasi wisata
		Belum terbentuknya kelembagaan kepariwisataan
		Kurangnya perhatian pada objek wisata religi



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
		Ketersediaan SDM pengelola pariwisata masih rendah
		Ketersediaan SDM ekonomi kreatif masih sangat rendah
		Kesulitan akses permodalan dalam pengembangan ekonomi kreatif
		Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif masih sangat sedikit
Ekonomi: Kemiskinan	Masih adanya masyarakat miskin serta rendahnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberian jaminan sosial	Belum sinkronnya data masyarakat miskin yang sistematis
		Rendahnya produktivitas dan sumber daya manusia
		Masih kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat
		Rendahnya kesadaran masyarakat dan kepekaan terhadap permasalahan sosial
		Masih adanya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis
Ekonomi: Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa dalam mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD)	Belum optimalnya penggunaan dana desa dalam pengelolaan potensi desa
		Masih minimnya inovasi kebijakan untuk pengelolaan potensi desa dan pemberdayaan
		Masih rendahnya pengelolaan BUMDES untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat
		Belum terlibatnya masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM dan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya peran lembaga ekonomi



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Ekonomi: Perdagangan	Rendahnya Daya saing dan Kelembagaan Koperasi	Lemahnya kapasitas SDM Perkoperasian dalam menjawab peluang dan tantangan era globalisasi dan digitalisasi
		Lemahnya pemahaman pengembangan diversifikasi jenis koperasi dan unit usaha koperasi
		Banyaknya koperasi yang tidak aktif, sehingga menjadi beban pembinaan.
		Tata kelola koperasi yang masih tradisional
		Terbatasnya SDM pembina serta pengurus pengawas dan pengelola koperasi yang belum mengikuti standar Kompetensi.
		Belum terbentuknya koperasi sekunder di Kota Banjar
		Terbatasnya modal kerja sehingga koperasi sulit berkembang
		Rendahnya Daya saing UMKM
	Rendahnya daya saing Produk IKM	Lemahnya Kapasitas SDM pelaku UMKM dalam menjawab tantangan era globalisasi dan digitalisasi
		Rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dalam mengurus perijinan Usaha
		Masih rendahnya jumlah UMKM Naik Kelas di Indonesia
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pada UMKM
		Masih rendahnya kualitas SDM UMKM
		Kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk melengkapi legalitas usaha/produknya
	Masih standarisasi produk UMKM	
Keterbatasan Bahan Baku IKM		
Masih rendahnya kualitas SDM pelaku industri (manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi)		



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Rendahnya digitalisasi produk IKM
		Minimnya penerapan HAKI dalam pelaku IKM
		Keterbatasan Modal Usaha Pelaku IKM
	Masih terbatasnya nilai ekspor di Kota Banjar	Kurangnya promosi produk potensial ekspor
		Belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap perizinan pelaku ekspor
		Lemahnya SDM pelaku usaha potensial ekspor
	Belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar	Belum adanya BUMD yang menangani bahan kebutuhan pokok
		Belum adanya gudang bahan kebutuhan pokok milik pemerintah
		Masih terbatasnya pelaksanaan OPM
Ekonomi: Investasi	Masih rendahnya investasi di berbagai aspek di Kota Banjar	Masih kurangnya promosi IKM
		Belum tersedianya lahan ruang kawasan industri
		Iklim usaha yang kurang kondusif
		Belum adanya investasi dalam kepariwisataan Kota Banjar
	Rendahnya nilai realisasi investasi	Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terkait dengan kewajiban penanaman modal
		Kurangnya minat berinvestasi di Kota Banjar
		Belum tersedianya data potensi investasi hasil kajian <i>feasibility study</i>
Masih kurangnya promosi investasi		
Tata Kelola Pemerintahan: Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik (MPP)	Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Belum adanya komitmen dari Perangkat daerah terkait penerapan Standar Pelayanan (SP)
		Masih lemahnya koordinasi antar lembaga
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM di pemerintahan umum, pemerintahan desa dan kelembagaan
		Belum optimalnya penguatan forkopimcam
		Masih minimnya jumlah SDM aparatur yang memberikan pelayanan
		Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		Belum tersedianya Dipo Arsip pada LKD dan <i>record center</i> pada perangkat daerah
Rendahnya tata kelola arsip di lingkup Pemerintah Kota Banjar		Belum tersedianya SDM kearsipan yang kompeten dalam autentikasi dan reservasi arsip
		Rendahnya kesadaran perangkat daerah maupun masyarakat dalam memberikan dan memanfaatkan arsip bersifat permanen dan mempunyai nilai sejarah
Tata Kelola Pemerintahan: SDM Aparatur	Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan manajemen ASN	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karier
		Belum optimalnya manajemen kinerja dalam evaluasi capaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dalam bentuk <i>coaching clinic</i>
		Belum optimalnya penggajian, penghargaan dan penegakan kedisiplinan
Tata Kelola Pemerintahan: Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih tingginya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Belum optimalnya deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP
		Belum optimalnya penertiban dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Pembagian tanggungjawab penanganan terhadap ODGJ, PDOT, dan anak jalanan yang masih belum jelas
		Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Tata Kelola Pemerintahan: Akuntabilitas	Belum optimalnya tata kelola akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya seluruh perangkat daerah selaku penyelenggara pelayanan publik untuk menerapkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik
		Kurangnya pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah terkait sistem akuntabilitas kinerja
		Pelaksanaan akuntabilitas belum dilaksanakan sampai pada level terendah
Tata Kelola Pemerintahan: Pengawasan	Implementasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal	Pemahaman, kompetensi pegawai dan pimpinan masih rendah
		Belum adanya komitmen pimpinan terkait penerapan SPIP
		Tidak sebandingnya <i>job desc</i> APIP dengan ketersediaan sumber daya APIP
	Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) yang handal dalam mencegah TIPIKOR	Pemahaman manajemen dan auditor terhadap <i>early warning system</i> masih kurang
		Pemahaman manajemen dan auditor terhadap fraud masih kurang
Teknologi dan Informasi	Belum maksimalnya penerapan perkembangan teknologi informasi	Kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait teknologi
		Belum adanya sistem/aplikasi terkait yang mendukung kinerja pemerintah (e-SAKIP, SKM)
		Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Wali Kota dan Perangkat Daerah



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam pengawasan belum optimal
		Penataan dan pemanfaatan <i>database</i> kependudukan yang belum maksimal
		Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan publik belum mencapai tingkat yang diharapkan
		Penerapan prinsip satu data Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal yang diinginkan
		Belum optimalnya penerapan arsip berbasis elektronik (e-arsip) di Kota Banjar
Keuangan	Rendahnya kemampuan fiskal Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung kemampuan fiskal pemerintah daerah	Kurangnya komitmen dan tanggungjawab pimpinan terhadap pengelolaan barang milik daerah
		Ketersediaan SDM dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas
		Terdapat beberapa bidang tanah belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi
		Terdapat bidang tanah yang masih dalam proses tukar guling
		Tanah jalan banyak yang berbatasan dengan instansi lain (PTPN, Perhutani, PT. KAI & Pertamina) sehingga pada saat pengukuran susah menghadirkan secara bersamaan tetangga batas tersebut, hal ini mengakibatkan penundaan proses sertifikat tanah milik daerah



Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum terwujudnya transformasi tata kelola dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kurangnya komitmen pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka menyusun laporan keuangan terhadap pertanggungjawaban anggaran yang sudah dikeluarkan
		Kurangnya pelatihan terkait pelaporan dan penatausahaan keuangan daerah
		Ketidaksesuaian pendidikan pegawai dengan jabatannya
	Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja	Minimnya pembinaan dan pelatihan bagi para penyusun anggaran
		Kurang efektifnya verifikasi RKA yang dilakukan oleh TAPD
		Hasil reviu RKA oleh APIP belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam menyusun RKA SKPD



3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal baik suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Artinya apabila suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan.

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan pembobotan dari setiap permasalahan masing-masing urusan untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi modal pembangunan ke depan.

3.2.1 Isu Strategis Global

Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir terutama dengan kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi telah mengubah wajah dunia menjadi lebih terbuka akan tetapi juga terdapat berbagai permasalahan. Sebagai proses perubahan tatanan dunia, globalisasi memaksa satu peristiwa yang terjadi pada wilayah tertentu

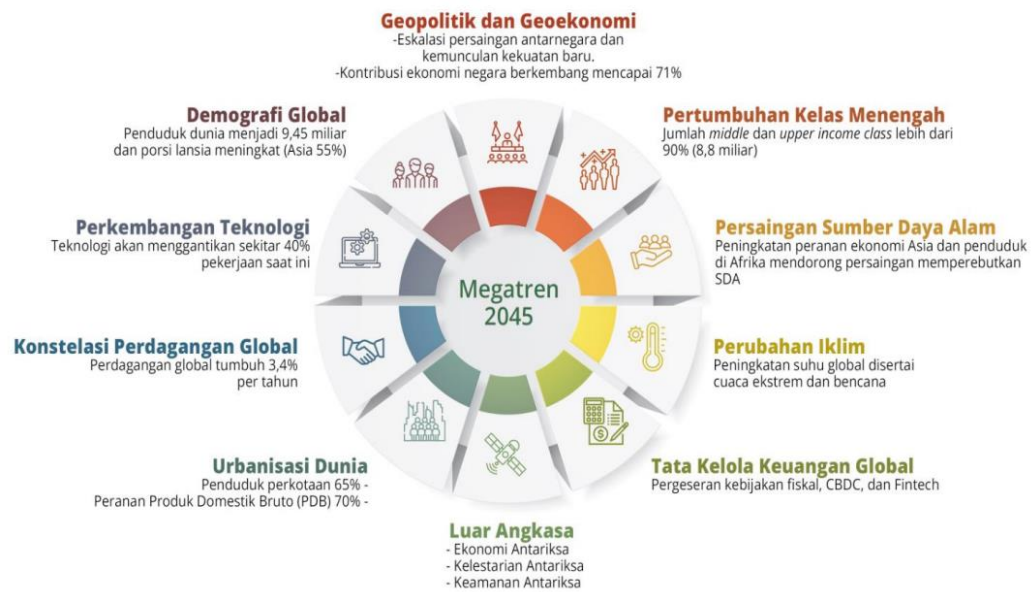


memengaruhi wilayah lainnya dan sebaliknya kebijakan yang ditempuh suatu negara akan memberi dampak terhadap negara lain.

Isu global menjadi satu peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global, bagaimana masyarakat merespon isu tersebut ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatrend global. Perubahan global merupakan perubahan transformative berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat massif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pembangunan menuju 2045, dunia akan menghadapi 10 kecenderungan besar (*megatrend global*). Megatren global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global tetapi di sisi lainnya juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan dalam mencapai pembangunan menuju tahun 2045 sebagai berikut:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*);
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim; dan
10. Pemanfaatan luas angkasa (*space economy*).



Gambar 3.1 Megatren Global 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial media. Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7.0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9.7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang



berbeda. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Di saat yang bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa datang.

Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Indonesia menyikapa kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global.

Dipandang dari segi geoekonomi, nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang



menyumbang 55% dari nilai *output* dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71% dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54% dari total nilai *output* global. Kebijakan makro ekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global sebesar USD 74,0 triliun dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55% dari nilai *output* dunia.

Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong percepatan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life-style*).



Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) seperti energi, air dan pangan di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan dan energi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global – *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berkembang terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor.

Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru



dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya.

Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja dan perlindungan sosial dan pensiun. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Berkembangan berbagai inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa ke keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang akan tetapi tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan sekaligus sebagai pesaing industri. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.



Pemanfaatan Luar Angkasa

Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0% saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga menyebabkan perkembangan kota yang menyeruak ke kawasan sekitarnya. Kondisi



ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Tantangan terhadap pengarustamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis melainkan juga ramah lingkungan.

Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah



mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan.

Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri. Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya dilakukan oleh manusia.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work form anywhere* (WFA). Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola serta dapat dimanfaatkan untuk melakukan



pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia telah mengalami kemajuan dari fase pembangunan sebelumnya. Namun, di masa mendatang, Indonesia akan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat. Begitu banyak perubahan yang terjadi, membuat langkah menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 menjadi lebih sulit. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, tata kelola, kekuasaan hukum, stabilitas, pertahanan, diplomasi, ketahanan sosial budaya, ekologi, kewilayahan, infrastruktur, dan pengelolaan pembangunan. Beberapa isu dan tantangan dalam proses pembangunan di masa mendatang sebagai berikut:

a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;

Rata-rata produktivitas yang dapat dilihat dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 mengalami tren negatif sebesar 0,06. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terutama pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas pun menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial dan bahkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mempercepat penurunan pertumbuhan ekonomi potensial di bawah 5 persen.



b. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN);

Meningkatnya IPTEKIN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Namun dalam mencapai peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi disebabkan masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB. Angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.

c. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai;

Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM peneliti tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7,287) dan Korea Selatan (8.408) pada tahun 2019. Dipandang dari segi kualitas, ekosistem riset dan inovasi masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional.

d. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan,



kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan karena masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenities serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, adanya perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan dan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya berkaitan dengan inovasi dan pengembangan yang masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

f. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;

Pemanfaatan potensi ekonomi laut masih belum dimanfaatkan dengan optimal terbukti Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDF kemaritiman masih berada pada kisaran 7,60%. Rendahnya kontribusi tersebut pun disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yaitu rendahnya



penangan sampah plastik, masih tingginya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

g. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relative rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap pDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi yaitu Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

h. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM dimana 56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah. Adanya ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja.



i. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;

Pembangunan Indonesia dalam jangka 20 tahun ke depan harus mampu menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya adalah penggunaan energi fosil yang masih tinggi, tercermin dari porsi untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi gas rumah kaca 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

j. Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi;

Pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil masih tergolong tinggi. Hal ini terbukti dengan porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen pada tahun 2022. Selain hal tersebut, tingkat elektrifikasi di pedesaan Indonesia pada akhir 2020 mencapai sekitar 98,67 persen. Akan tetapi secara umum kualitas akses listrik tersebut masih harus ditingkatkan. Tantangan lain masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh listrik serta memerlukan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan akses listrik.

k. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;

Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Timbulan limbah B3 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022. Pada limbah domestik, hanya satu persen rumah tangga di Indonesia yang dilayani oleh Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)



terpusat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti penambahan eksploutatif serta meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi dan berkurangnya keanekaragaman hayati serta penegakan hukum dan regulasi termasuk pengaturan sistem insentif dan disinsetif untuk ekonomi hijau yang masih lemah.

l. Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;

Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK, meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas *data center* dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan pada sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah.

m. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas;

Penyebab dari adanya isu di atas disebabkan karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat serta kuantitass dan kualitas SDM yang belum merata terutama di luar Pulau Jawa.

n. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi;

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Di



sisi lain, hal tersebut masih menjadi tantangan yang ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 persen. Sementara itu, tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di Kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

o. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sedangkan dalam perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia mencatat cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.

p. Kualitas pendidikan yang masih rendah;

Capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu 382,00 yang jauh tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara OECD yaitu 488,33. Hal ini disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh



daerah dan satuan pendidikan. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru lima perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi.

q. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah;

Tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Penyebabnya adalah penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam serta perubahan iklim serta daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

r. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah;

Dampak yang ditimbulkan dari regulasi yang berlebih adalah banyaknya pengujian materiil yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut karena masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.



s. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;

Dampaknya adalah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Fragmentasi kelembagaan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan pemerintah pusat-daerah.

t. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;

Kementerian/Lembaga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

u. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D;

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hal ini adalah suksesi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

v. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik;

Hal ini disebabkan posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi dan pemberhentian ASN. Selama periode 2020-2022 terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif terlibat dalam 371



kasus korupsi dari total 1.165 kasus korupsi sepanjang tahun 2003-2022.

w. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;

Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

x. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.

Tantangan yang dialami di antaranya disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital. Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata. Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi serta rendahnya literasi digital.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan signifikan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode tahun 2025-2045 yaitu isu global, nasional, regional Jawa Bali. Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- **Perekonomian Kerakyatan yang Kokoh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**



Perekonomian dan sektor-sektor produksi mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal dengan struktur ekonomi yang kokoh untuk sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dimensi perekonomian kerakyatan merepresentasikan tantangan ke depan bahwa transformasi pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor-sektor perekonomian berbasis kekuatan sumber daya manusia dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi perekonomian yang kokoh menggambarkan wujud transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi khususnya industri yang berbasis potensi bahan baku lokal dengan keterkaitan (*link and match*) yang kuat antar sektor industri besar dan IKM.

UMKM berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal serta resilien terhadap berbagai guncangan faktor internal maupun eksternal. Dimensi perekonomian yang berdaya saing merepresentasikan keunggulan sektor-sektor dan SDM pelaku usaha yang adaptif dengan perkembangan teknologi, memiliki produktivitas tinggi serta produk berkualitas yang dapat mengakses pasar domestik dan mancanegara. Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* serta *blue economy*.

- **Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Inklusif**

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2045 diproyeksikan masih menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Penduduk usia produktif pun juga merupakan yang terbesar. Sementara rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan



masyarakat. Selain itu tantangan ke depan untuk menciptakan sosial budaya inklusif yang memerhatikan karakter budaya dan sosial. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

- **Pemerataan Akses dan Penyediaan Infrastruktur Dasar**

Ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah utara dan selatan Jawa Barat mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan sosial masyarakat di kedua wilayah tersebut. Percepatan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur kesehatan serta fasilitas pendidikan akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

- **Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Pembangunan**

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan dan sumber daya perekonomian sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumberdaya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.



- **Penataan Ruang yang Berkelanjutan**

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

- **Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif serta Penguatan Otonomi Daerah**

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

3.2.4 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Kota Banjar

Dengan dilakukannya pengelompokan permasalahan menjadi kelompok besar dalam mempermudah melakukan identifikasi permasalahan.

3.2.4.1 Hasil Penjaringan Isu

Proses ini melibatkan penemuan isu-isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan, serta penetapan TPB Strategis sebagai panduan dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan. Setelah mendapatkan TPB strategis yang relevan, dilakukan penjelasan rinci



mengenai tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam periode 2025-2045, mempertimbangkan kondisi kontemporer dan aspirasi pembangunan Kota Banjar. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penjaringan isu melalui KLHS RPJPD Kota Banjar tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi tantangan dan mengarahkan Kota Banjar menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

- Daya dukung pangan di Kota Banjar didominasi oleh terlampaui, dengan nilai persentase terlampaui 81% dari luas total luas wilayah Kota Banjar
- Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim pada kelas sangat rendah cukup besar, dengan luas 4.366,12 Ha (33% dari total luas wilayah)
- Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Kota Banjar di dominasi pada kelas sangat rendah, dengan luas 4.018,12 Ha (33% dari total luas wilayah)
- Jasa Ekosistem Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Kota Banjar di dominasi pada kelas sangat rendah, dengan luas 4.035,13 Ha (31% dari total luas wilayah)
- Beban pencemar di Kecamatan Pataruman menjadi dominasi dengan jumlah timbulan sampah (191.171,27 L/tahun) dan timbulan tinja (3.211.677,29 L/tahun) atau setara 37% dari total timbulan
- Bahaya Bencana Banjir di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas bahaya banjir tinggi 3.694,03 Ha (63% dari total wilayah bahaya banjir)
- Bahaya Bencana Tanah Longsor di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas Bahaya tanah longsor tinggi 1.970,21 Ha (58% dari total wilayah bahaya tanah longsor)



- Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas bahaya cuaca ekstrim tinggi 7.060,21 Ha (54% dari total wilayah bahaya cuaca ekstrim)
- Efisiensi Sumber Daya Alam pada penyediaan pangan dalam rata-rata 54% (Kategori Sedang)
- Efisiensi Sumber Daya Alam pada penyediaan air dalam rata-rata 62% (Kategori Sedang)

3.2.4.2. Isu TPB Berdasarkan Capaian TPB

Analisis pencapaian TPB dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara pencapaian indikator TPB di Kota Banjar dengan target nasional. Semakin besar perbedaan atau kesenjangan pencapaian indikator (ketika belum mencapai target nasional), semakin mungkin menjadi isu strategi. Evaluasi ketercapaian indikator TPB menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Banjar.

Tabel 3.2 Crosscutting Isu Capaian TPB

Pilar	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator	Capaian	GAP Minimum	Gap Maksimum	Rentang Gap	Ketersediaan Data (%)	Rentang Gap x Ketersediaan Data (%)	Ranking Capaian TPB
Sosial	TPB 1	8	4	1	9	22	36,36%	0%	27,28%	27,28%	55%	14,88%	1
Sosial	TPB 2	8	0	0	2	10	80,00%	0%	0,00%	0,00%	80%	0,00%	5
Sosial	TPB 3	6	6	1	13	26	19,23%	0%	20,00%	20,00%	46%	9,23%	3
Sosial	TPB 4	4	4	1	4	13	30,77%	0%	20,47%	20,47%	62%	12,60%	2
Sosial	TPB 5	4	1	0	1	6	60,00%	0%	0,00%	0,00%	80%	0,00%	5
Lingkungan	TPB 6	3	0	3	9	15	20,00%	0%	0,00%	0,00%	20%	0,00%	5
Ekonomi	TPB 7	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	5
Ekonomi	TPB 8	4	1	0	9	14	21,43%	0%	0,00%	0,00%	36%	0,00%	5
Ekonomi	TPB 9	1	1	0	4	6	16,67%	0%	4,78%	4,78%	33%	1,59%	4
Ekonomi	TPB 10	2	0	0	2	4	50,00%	0%	0,00%	0,00%	50%	0,00%	5
Lingkungan	TPB 11	4	2	0	8	14	28,57%	0%	0,00%	0,00%	43%	0,00%	5
Lingkungan	TPB 12	1	0	0	3	4	25,00%	0%	0,00%	0,00%	25%	0,00%	5
Lingkungan	TPB 13	1	0	0	1	2	50,00%	0%	0,00%	0,00%	50%	0,00%	5
Lingkungan	TPB 14					0	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	0%	5
Lingkungan	TPB 15	0	0	0	5	5	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	5
Hukum Tata Kelola	TPB 16	5	0	0	5	10	33,33%	0%	0,00%	0,00%	33%	0,00%	5
Ekonomi	TPB 17	0	0	0	3	3	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	5
		51	19	6	78	154					44%		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Sumber : Dok KLHS RPJPD, 2024

Evaluasi tersebut diperoleh dari hasil ranking ketercapaian TPB dengan mengurutkan TPB berdasarkan nilai rentang gap. Rentang gap merupakan persentase selisih antara capaian dan target yang telah ditetapkan. Gap diperoleh melalui selisih antara capaian indikator TPB dengan targetnya. Gap minimum merupakan selisih terkecil indikator



TPB tertentu dengan targetnya, sementara gap maksimum merupakan selisih terbesarnya. TPB yang memiliki rentang gap terbesar berpotensi menjadi menyumbangkan isu PB di Kota Banjar.

3.2.4.3 Isu TPB Berdasarkan Muatan Lingkungan Hidup

Penelahaan kondisi lingkungan hidup di Kota Banjar telah diuraikan berdasarkan hasil kajian 6 muatan lingkungan hidup, berikut merupakan kondisi yang menjadi isu di Kota Banjar berdasarkan ketercapaian TPB. Berdasarkan hasil analisis 6 muatan KLHS, dapat disimpulkan bahwa dari sepuluh isu strategis yang diidentifikasi, semuanya dapat dikategorikan ke dalam pilar lingkungan. Analisis tersebut mendasarkan diri pada enam muatan KLHS yang mencakup parameter-parameter kajian mendalam terkait aspek lingkungan hidup.

- Daya dukung pangan di Kota Banjar didominasi oleh terlampaui, dengan nilai persentase terlampaui 81% dari luas total luas wilayah Kota Banjar
- Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim pada kelas sangat rendah cukup besar, dengan luas 4.366,12 Ha (33% dari total luas wilayah)
- Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah di Kota Banjar di dominasi pada kelas sangat rendah, dengan luas 4.018,12 Ha (33% dari total luas wilayah)
- Jasa Ekosistem Jasa Pendukung Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Kota Banjar di dominasi pada kelas sangat rendah, dengan luas 4.035,13 Ha (31% dari total luas wilayah)
- Beban pencemar di Kecamatan Pataruman menjadi dominasi dengan jumlah timbulan sampah (191.171,27 L/tahun) dan timbulan tinja (3.211.677,29 L/tahun) atau setara 37% dari total timbulan
- Bahaya Bencana Banjir di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas bahaya banjir tinggi 3.694,03 Ha (63% dari total wilayah bahaya banjir)



- Bahaya Bencana Tanah Longsor di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas Bahaya tanah longsor tinggi 1.970,21 Ha (58% dari total wilayah bahaya tanah longsor).
- Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Banjar didominasi pada tingkat tinggi dengan luas bahaya cuaca ekstrim tinggi 7.060,21 Ha (54% dari total wilayah bahaya cuaca ekstrim)
- Efisiensi Sumber Daya Alam pada penyediaan pangan dalam rata-rata 54% (Kategori Sedang).
- Efisiensi Sumber Daya Alam pada penyediaan air dalam rata-rata 62% (Kategori Sedang).

3.2.4.4 Isu TPB Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan lainnya yang digunakan dalam KLHS RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 ini yaitu:

- KLHS RPJMD Perubahan Kota Banjar Tahun 2018-2023;
- Dokumen RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023; dan
- Dokumen Matek RTRW Kota Banjar Tahun 2023-2043.

Dari keseluruhan isu strategis yang diidentifikasi, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pilar Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut mencakup

- pilar lingkungan (pelestarian lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi dampak lingkungan)
- pilar sosial, (kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan)
- pilar ekonomi, (pertumbuhan ekonomi, pengembangan ` 4-374 usaha, dan penciptaan lapangan kerja)
- pilar hukum serta tata kelola (aspek regulasi, penegakan hukum, dan efisiensi pemerintahan)



3.2.4.5 Isu TPB Berdasarkan Hasil Kuesioner

Penjaringan isu didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat dan perangkat-perangkat daerah terkait di Kota Banjar. Dari hasil kuesioner tersebut, tergambar kondisi yang menjadi isu di Kota Banjar yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pilar Sustainable Development Goals (SDGs).

- Pilar lingkungan mencakup isu degradasi lahan, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem, menekankan perlunya konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
- Di pilar sosial, muncul isu akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, dan ketidaksetaraan sosial yang menjadi fokus utama.
- Pilar ekonomi menyoroti ketidakpastian ekonomi, tingkat pengangguran, dan kebutuhan untuk mengembangkan strategi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kesejahteraan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian dalam
- pilar kesehatan, menyoroti tantangan dalam pelayanan kesehatan dan upaya penanggulangan penyakit.
- pilar tata kelola pemerintahan isu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sorotan dalam.

Dengan mengidentifikasi isu-isu ini ke dalam pilar-pilar SDGs, Kota Banjar dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang holistik dan terarah, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

3.2.4.6 Isu TPB Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dasar hukum utama untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Undang-Undang ini mengatur bahwa SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar. Terdapat 5 ranah yang berada di bawah Pelayanan Dasar, yaitu Pendidikan; Perumahan Rakyat dan Kawasan



Permukiman; Kesehatan; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Sosial dan sudah mempunyai Peraturan Menteri yang mengatur SPM masing-masing ranah.

- Pendidikan: Permendikbud no.23 tahun 2013 tentang Perubahan atas SPM Pendidikan Dasar;
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Permenpera no.22 tahun 2008 tentang SPM;
- Kesehatan: Permenkes no. 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang perubahan SPM bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Permenkes ini menetapkan 18 indikator SPM. Permenkes ini sudah tidak berlaku per tahun 2016, dan telah digantikan dengan Permenkes no.43 tahun 2016 tentang SPM bidang Kesehatan; 4. Saat ini, SEPAKAT masih mengacu kepada Permenkes yang lama dalam pengukuran indikator SPM Kesehatan;
- Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat: Permendagri no.69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri no.62 tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Permen PU no.1 tahun 2014 tentang SPM; dan
- Sosial: Permensos no.129 tahun 2008 tentang SPM.

Penjaringan isu berdasarkan keterkaitan TPB dengan capaian SPM merupakan langkah penting dalam merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan di Kota Banjar.

3.2.5 Pengelompokan Isu Strategis Kota Banjar

Isu-isu strategis menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis, pemerintah atau lembaga dapat mengarahkan sumber daya dan usahanya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif.



Dari hasil pengelompokan isu-isu tersebut kemudian muncul tema besar yang menandai isu-isu tersebut merupakan isu strategis dalam konteks pembangunan.

1. Optimalisasi pengembangan sumber daya alam, ekonomi kreatif pada sektor olah raga, pariwisata, seni, budaya dan UMKM

Kota Banjar merupakan daerah pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar resmi berdiri pada tahun 2003. Angka kunjungan wisatawan ke Kota Banjar tergolong masih rendah, berdasarkan data BPS didapatkan data bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 adalah sebanyak 38.007 wisatawan, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 107.260 wisatawan, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 33.900 wisatawan. Penurunan angka wisatawan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Belum tergalinya potensi wisata unggulan di Kota Banjar;
- b. Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung kepariwisataan;
- c. Rendahnya promosi dan penyebaran informasi wisata;
- d. Belum terbentuknya kelembagaan kepariwisataan;
- e. Belum adanya investasi dalam kepariwisataan Kota Banjar;
- f. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor kepariwisataan;
- g. Kurangnya perhatian pada objek wisata religi;
- h. Terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- i. Ketersediaan SDM pengelola pariwisata masih rendah; dan
- j. Minimnya anggaran yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengembangan ekonomi kreatif secara optimal pada sektor pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif yang secara optimal pada sektor pariwisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banjar. Peningkatan jumlah



wisatawan tersebut akan berdampak positif pada peningkatan jumlah PAD Kota Banjar, selain itu juga akan berpengaruh pada penambahan jumlah lapangan kerja dan akan berdampak juga pada penyerapan jumlah tenaga kerja sehingga akan mengurangi angka pengangguran di Kota Banjar.

Pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya diperlukan pada sektor pariwisata tetapi juga pada sektor UMKM. Sektor UMKM secara tidak langsung berhubungan juga dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjar akan membelanjakan uangnya untuk membeli produk atau jasa, disitulah peran UMKM akan terlibat. Pengembangan ekonomi kreatif pada sektor UMKM akan menyebabkan produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan daya saing sehingga akan menarik pembelian dari wisatawan yang berkunjung. Produk UMKM tidak hanya dibeli oleh wisatawan yang berkunjung tetapi juga dapat dijual ke luar Kota Banjar bahkan dapat diekspor juga. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan ekonomi kreatif pada sektor pariwisata dan UMKM.

2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar terdiri dari sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian, seperti jalan, jembatan, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur dasar mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian. Keterkaitannya adalah pembangunan infrastruktur dasar akan mempercepat pemerataan perkembangan suatu wilayah, yang akan berdampak pada meningkatnya investasi disuatu daerah, dan kemudian akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi angka pengangguran disuatu daerah.

Pembangunan infrastruktur dasar yang merata tentunya akan meningkatkan pemerataan ekonomi juga, oleh karena itu Pemerintah Kota Banjar mempunyai fokus pada pemerataan pembangunan



infrastruktur dasar agar ekonomi merata. Perekonomian yang merata tentunya akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar. Infrastruktur yang berkualitas dan merata tentunya menjadi faktor pendukung perkembangan suatu wilayah dengan lebih baik.

3. Peningkatan konektivitas antar wilayah

Peningkatan konektivitas antar wilayah ini berkaitan dengan pengembangan transportasi di Kota Banjar. Sebagai kota yang masih terbilang baru, konektivitas antar wilayah di Kota Banjar masih rendah. Konektivitas antar wilayah ini nantinya akan berdampak juga pada perkembangan wilayah di Kota Banjar. Konektivitas yang baik akan menyebabkan aksesibilitas wilayah juga meningkat, sehingga menyebabkan semua masyarakat di Kota Banjar mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses sarana dan prasarana yang ada di Kota Banjar.

Pemerintah Kota Banjar berkomitmen ingin meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga perkembangan wilayah di Kota Banjar lebih merata. Berkaitan juga dengan isu-isu sebelumnya, perkembangan wilayah yang merata tersebut akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Banjar mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya penanganan masalah limbah cair domestik dan industri, luasan RTH yang menurun, dan banyaknya jumlah pengrajin gerabah yang masih menggunakan cara tradisional dalam pembakaran. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Banjar tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki indeks risiko 131,62 (sedang).



Bencana menjadi isu permasalahan serius di Kota Banjar, dengan data yang dihasilkan oleh Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2022 Kota Banjar berada pada peringkat 189 dengan skor 145,05, yang menunjukkan bahwa kota ini menghadapi risiko bencana yang tinggi. Klasifikasi risiko bencana tinggi menyoroti tingkat kerentanan dan keterpaparan yang tinggi terhadap ancaman bencana alam atau manusia di wilayah tersebut. Penting untuk memahami bahwa skor tinggi dalam indeks risiko bencana mencerminkan sejumlah faktor. Pertama, dapat merujuk pada kondisi geografis Kota Banjar yang mungkin membuatnya lebih rentan terhadap jenis bencana tertentu, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Kedua, faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat ketidaksetaraan, kepadatan penduduk, dan kualitas infrastruktur, juga dapat berkontribusi pada peningkatan risiko bencana.

Lingkungan hidup yang sehat menjadi hak bagi setiap masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja melainkan seluruh pihak, mulai dari swasta, akademisi, dan juga masyarakat. Tetapi pemerintah di sini memegang peranan penting untuk dapat menggerakkan seluruh pihak, karena pemerintah mempunyai kendali. Oleh karena itu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Kota Banjar, sebab lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas dapat mendukung setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas air

Peningkatan kualitas dan kuantitas air menjadi isu penting bagi masyarakat Kota Banjar, dimana air sebagai kebutuhan dasar dari kegiatan makan minum serta penerapan pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Kegiatan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta sebagai konsumen dalam menggunakan air



menjadi bagian penting yang tidak bias dilepaskan. Menjaga air artinya menjaga ekosistem kehidupan, untuk itu diperlukan penanganan serius baik dari pemerintah, masyarakat serta seluruh stakeholder terkait dalam optimalisasi kualitas dan kuantitas air.

Ketersediaan air bersih merupakan faktor kritis untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mendukung kehidupan, dan memastikan kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi ketersediaan air bersih melibatkan aspek geografis, infrastruktur, manajemen sumber daya air, dan kebijakan

Tabel 3.3
Ketersediaan Air Kota Banjar

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
Banjar	822,58	1.779,66	1.228.508
Langensari	1.695,34	1.561,16	958.646
Pataruman	2.103,81	3.277,05	1.479.080
Purwahaerja	1.073,83	657,97	813.592
Total	5.695,56	7.275,85	4.479.827

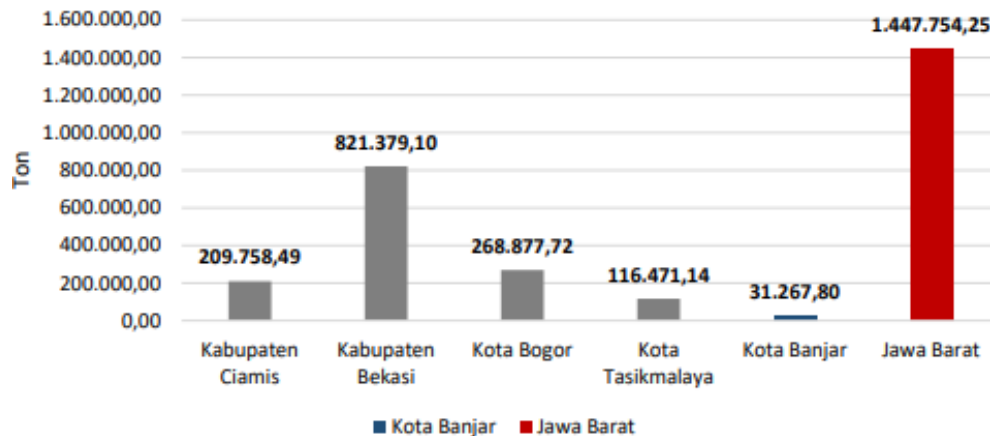
Sumber : KLHS RPJPD Kota Banjar, 2024

Analisis ini menyoroti potensi risiko belum terlampaui dalam daya dukung dan daya tampung air, terutama di Kecamatan Pataruman yang memiliki luasan terlampaui lebih besar. Sementara Kecamatan Purwahaerja, meskipun memiliki luas wilayah yang lebih kecil, juga menunjukkan adanya masih tantangan terkait kondisi tersebut.

6. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju *zero waste to landfill*

Masalah persampahan tidak dapat terlepas dari setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, karena setiap kegiatan dan aktivitas tersebut pasti akan menghasilkan bahan sisa yang disebut dengan sampah. Persampahan melibatkan beragam elemen, termasuk manajemen sampah, infrastruktur untuk pembuangan sampah, praktik daur ulang, dan kesadaran masyarakat tentang

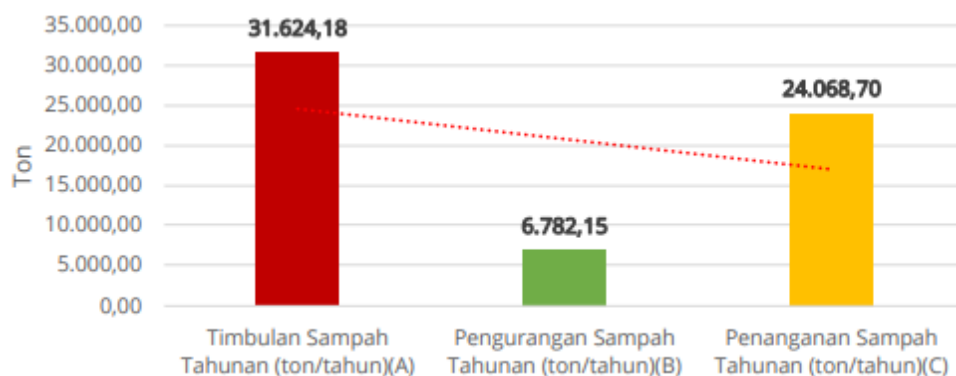
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Permasalahan persampahan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga mencerminkan standar hidup masyarakat dan kemajuan pembangunan kota secara keseluruhan. Data tercatat di situs SIPSN KLHK memberikan perbandingan antara volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Timbunan Sampah Tahun 2022

Sumber : Situs SIPSN KLHK, 2022

Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022, Kota Banjar menghasilkan jumlah sampah tahunan sekitar 31.267,80 Ton, yang setara dengan sekitar 2% dari total sampah yang dihasilkan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Standar nasional, seperti yang diatur dalam SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah, menetapkan parameter timbunan sampah sebesar 2,5 liter per orang per hari.



Gambar 3.3 Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Banjar



Sumber : Situs SIPSN KLHK, 2022

Pengurangan sampah ini mencakup kegiatan seperti pemilahan sampah di sumber, daur ulang, komposting, dan program edukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi sampah, selain upaya pengurangan, Kota Banjar juga telah menangani sampah sebesar 24.068,70 ton. Penanganan ini mencakup berbagai metode seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di fasilitas yang ada. Proses penanganan sampah yang efektif ini memastikan bahwa sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan dapat dikelola dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Namun, melihat proyeksi 20 tahun ke depan, penanganan persampahan di Kota Banjar diperkirakan akan menghadapi tantangan besar jika kapasitas penanganan sampah tidak ditingkatkan secara signifikan. Dengan timbulan sampah yang terus meningkat, penanganan sampah saat ini akan jauh dari mencukupi kebutuhan di masa mendatang.

Permasalahan sampah di Kota Banjar disebabkan oleh faktor:

- Penyelenggaraan sarana dan prasarana yang belum memadai
- Belum optimalnya tata kelola persampahan
- Masih minimnya pengetahuan sosial dan budaya masyarakat terkait dengan sampah

Target *zero waste* tidak akan tercapai apabila Pemerintah Kota Banjar tidak mempunyai fokus pada pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan. Peraturan daerah mengenai persampahan sudah dibuat tetapi manajemen tata kelola persampahan belum dibuat, sehingga pengaplikasian peraturan daerah tersebut tidak dapat maksimal.

Target *zero waste* tersebut dapat dicapai apabila pemerintah melakukan pembenahan di berbagai sektor yang berdampak pada persampahan. Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana persampahan, seperti kendaraan pengangkut, mesin pembakar sampah, dan juga tempah pengolahan sampah. Perbaikan pola pikir tentang sampah pada masyarakat juga perlu dibenahi, sebab



masyarakatlah yang menjadi produsen sampah tingkat pertama. Apabila beberapa poin tersebut dapat dibenahi maka target *zero waste* di Kota Banjar akan tercapai.

7. Peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar

Peningkatan iklim ramah investasi merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investor, baik lokal maupun internasional, agar lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam suatu wilayah atau negara. Potensi ekonomi Kota Banjar saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan potensi daerah terhadap peran sektor ekonomi. Salah satu faktor utama adalah kurangnya investasi dalam promosi dan pengembangan potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang tidak dipromosikan dengan baik atau tidak dikembangkan dengan optimal dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor pariwisata, yang seharusnya menjadi salah satu pendorong ekonomi lokal. Selain itu, persaingan tinggi terhadap daya saing produk daerah juga dapat menjadi kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam produk-produk lokal, kurangnya akses pasar, atau kurangnya pemahaman tentang tren konsumen. Ketidakmampuan dalam meningkatkan daya saing produk daerah dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah

Pengembangan perekonomian di Kota Banjar sangat bergantung dengan investasi yang masuk di Kota Banjar. Berdasarkan hal tersebut penciptaan iklim ramah investasi perlu dilakukan agar investasi dari berbagai pihak dapat masuk ke Kota Banjar. Peningkatan jumlah investasi tersebut akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Kota Banjar.

Peningkatan iklim ramah investasi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang mendukung kepastian hukum dalam investasi, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang berkualitas dan



memadai, kondisi politik dan ekonomi di Kota Banjar yang stabil, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang berkualitas, gencar melakukan promosi investasi, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, optimalisasi pengembangan inovasi dan teknologi, dan perlindungan hukum bagi investor. Dengan meningkatnya iklim ramah investasi, sebuah wilayah berpotensi untuk menarik lebih banyak investor, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta menggerakkan perkembangan sektor-sektor ekonomi tertentu.

8. Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan

Pendidikan berperan sebagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan masyarakat. Pendidikan mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi juga memfasilitasi perbaikan sistem pendidikan di suatu wilayah. Secara spesifik, perluasan partisipasi masyarakat dalam gerakan kesadaran akan pendidikan penting untuk mewujudkan cita-cita meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia sejalan dengan upaya menuju negara yang lebih sejahtera.

Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas kurikulum, pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru, aksesibilitas geografis dan finansial, pembangunan sarana pendidikan, pendidikan inklusif, kemitraan dengan industri, mengembangkan pendidikan berbasis teknologi, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi sistem pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan akan menjadi lebih terjangkau, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan zaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan individu, mengurangi kesenjangan, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.



9. Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan Kota Banjar

Persebaran fasilitas kesehatan merujuk pada penyebaran rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas perawatan medis lainnya yang ada di wilayah Kota Banjar. Keterjangkauan merujuk pada seberapa mudahnya penduduk setempat bisa mengakses layanan kesehatan ini baik dari segi jarak, biaya, maupun ketersediaan layanan yang diperlukan. Peningkatan persebaran dan keterjangkauan fasilitas kesehatan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Banjar karena kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi.

Peningkatan persebaran dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar dapat dilakukan dengan peningkatan infrastruktur kesehatan, pengadaan program *mobile healthcare* (layanan kesehatan bergerak) yang mudah dijangkau oleh masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemberian subsidi biaya kesehatan, optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan, peningkatan kemitraan publik-swasta, pemanfaatan penggunaan teknologi. Strategi-strategi ini dapat membantu memperluas cakupan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

10. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing

Peningkatan kemampuan dan mutu sumber daya manusia adalah tugas bersama untuk membangun sebuah daerah yang kuat dan mewujudkan kemakmuran suatu daerah. SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik dari segi fisik maupun mental, memiliki dampak positif yang luas, bukan hanya pada peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, tetapi juga dalam mendukung pembangunan daerah. Ada hubungan saling memengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan manusia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pembangunan manusia yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi



yang memadai tidak dapat tercapai. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada pembangunan manusia.

Pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, optimalisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karier, peningkatan keterampilan baik teknis maupun non-teknis, mendorong pengakuan dan peningkatan produktivitas dengan apresiasi terhadap kreativitas serta inovasi, pengembangan keahlian spesifik, melakukan pemberdayaan yang inklusif, melakukan kolaborasi dengan industri, dan meningkatkan pemberdayaan *entrepreneurship*. Pembangunan SDM yang unggul membutuhkan pendekatan holistik dan terus-menerus untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing, dan siap bersaing di tingkat lokal maupun global.

11. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik melibatkan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan. Ini meliputi penggunaan aplikasi, platform daring, atau sistem informasi yang memungkinkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, mempercepat proses administratif, dan memudahkan akses informasi. Hal ini dapat mencakup layanan daring untuk pengajuan dokumen, pelaporan masalah, informasi publik yang mudah diakses, dan komunikasi antara lembaga pemerintah dan warga melalui *platform online*. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teknologi berperan penting dalam menjadikan pelayanan publik lebih prima. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penggunaan



aplikasi, platform daring, atau sistem otomatisasi memungkinkan warga untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan, atau melaporkan masalah secara lebih cepat dan mudah. Dengan teknologi, proses administrasi bisa lebih lancar, waktu tanggapan terhadap permintaan masyarakat dapat dipercepat, dan komunikasi antara pemerintah dan warga bisa lebih terbuka dan efektif. Ini berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, menjadikan pelayanan publik lebih responsif, efisien, dan transparan.

Kualitas layanan publik merupakan indikator kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi serta menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat. Namun, tuntutan yang semakin besar dari masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses. Maka, di masa depan, diperlukan pemanfaatan yang lebih maksimal dari teknologi digital untuk mempercepat dan menyempurnakan layanan yang responsif dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik akan mendorong penciptaan layanan yang efektif, responsif, efisien, dan cepat.



Tabel 3.4

Rumusan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan masalah limbah cair domestik dan industri • Menurunnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Belum optimalnya pengelolaan persampahan <p>Perumahan dan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni dan lingkungan pemukiman kumuh • Belum optimalnya pengelolaan emisi dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya Tata Ruang Wilayah Kota Banjar • Belum optimalnya kondisi daerah irigasi • Belum efektifnya jaringan drainase Kota Banjar dalam mengalirkan debit air permukaan • Belum optimalnya pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum • Belum optimalnya pengelolaan sanitasi <p>Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum diketahuinya tingkat konektivitas antar wilayah; • Masih rendahnya kesadaran keselamatan berkendara pada pengguna kendaraan; 	<p>Penanganan perubahan iklim</p>	<p>Megatrust di Laut Selatan Jawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Ruang yang Keberlanjutan Berkelanjutan • daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas air • Peningkatan konektivitas antar wilayah



ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan; • Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan sesuai dengan volume kendaraan yang melintas; <p>Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas penanggulangan bencana • Masih rendahnya kualitas pencegahan, penanganan dan pengendalian serta penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran • Masih banyaknya tebing yang berpotensi longsor 				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA				
<p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan • Rendahnya budaya baca dan literasi masyarakat di Kota Banjar <p>Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penanganan ODGJ serta tingginya <i>stunting</i> • Belum optimalnya akses sarana, prasarana dan alat kesehatan serta peningkatan SDM Kesehatan <p>Tenaga Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas tenaga kerja Masih sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia • Adanya ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia 	Bonus Demografi	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus Demografi • Konektivitas dan infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan Kota Banjar • Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan



ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya SDM Tenaga Kerja yang menguasai IPTEK Belum optimalnya sarana pelatihan kerja Belum tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Mikro dari seluruh perusahaan <p>Daya Saing :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum Rendahnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri, organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan Rendahnya partisipasi dan prestasi masyarakat di bidang olahraga <p>Perlindungan Perempuan dan Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) Belum terkelolanya kebudayaan di Kota Banjar dengan baik <p>Pengendalian Penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sinergitas dalam pengendalian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Urbanisasi Dunia Geopolitik dan Geoekonomi 			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing



ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
ASPEK EKONOMI				
<p>Ketahanan Pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang pertanian dan perikanan • Belum optimalnya pembenihan dan pembesaran perikanan • Belum optimalnya penyediaan dan penyaluran pangan pokok dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Rantai pemasaran produk hasil pertanian • Masih panjang Pengawasan produk pangan segar asal hewan dan tumbuhan • Belum optimal Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan • Belum optimal Berkurangnya jumlah petani, peternak dan pembudidaya ikan • Adanya Alih Fungsi lahan pertanian <p>Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan dan inovasi destinasi pariwisata <p>Kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya masyarakat miskin serta rendahnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberian jaminan sosial <p>Kesejahteraan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirupsi Teknologi • Perkembangan Teknologi • Persaingan Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi hijau dan ekonomi biru • Konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian kerakyatan yang kokoh, berkualitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar



ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa dalam mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD) <p>Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya Daya saing dan Kelembagaan Koperasi Rendahnya Daya saing UMKM Masih terbatasnya nilai ekspor di Kota Banjar Belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar <p>Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya investasi di berbagai aspek di Kota Banjar Rendahnya nilai realisasi investasi 		<ul style="list-style-type: none"> Daya saing SDM 	<ul style="list-style-type: none"> SDM yang berkualitas dan inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pengembangan sumber daya alam, ekonomi kreatif pada sektor olah raga, pariwisata, seni, budaya dan UMKM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
<p>Pelayanan Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik (MPP) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di kecamatan Rendahnya tata kelola arsip di lingkup Pemerintah Kota Banjar <p>SDM Aparatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan manajemen ASN <p>Ketentraman dan Ketertiban Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan demografi Global dan Tata Kelola Keuangan Global 	<ul style="list-style-type: none"> Perpindahan IKN 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik



ASPEK/PERMASALAHAN	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA BANJAR
	GLOBAL	NASIONAL	JAWA BARAT	
<p>Akuntabilitas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya tata kelola akuntabilitas kinerja <p>Pengawasan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (<i>early warning</i>) yang handal dalam mencegah TIPIKOR <p>Teknologi dan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum maksimalnya penerapan perkembangan teknologi informasi <p>Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kemampuan fiskal Pemerintah Daerah• Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung kemampuan fiskal pemerintah daerah• Belum terwujudnya transformasi tata kelola dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah• Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja				

Sumber : Data Bappelitbangda (diolah), 2023

BAB IV VISI DAN MISI

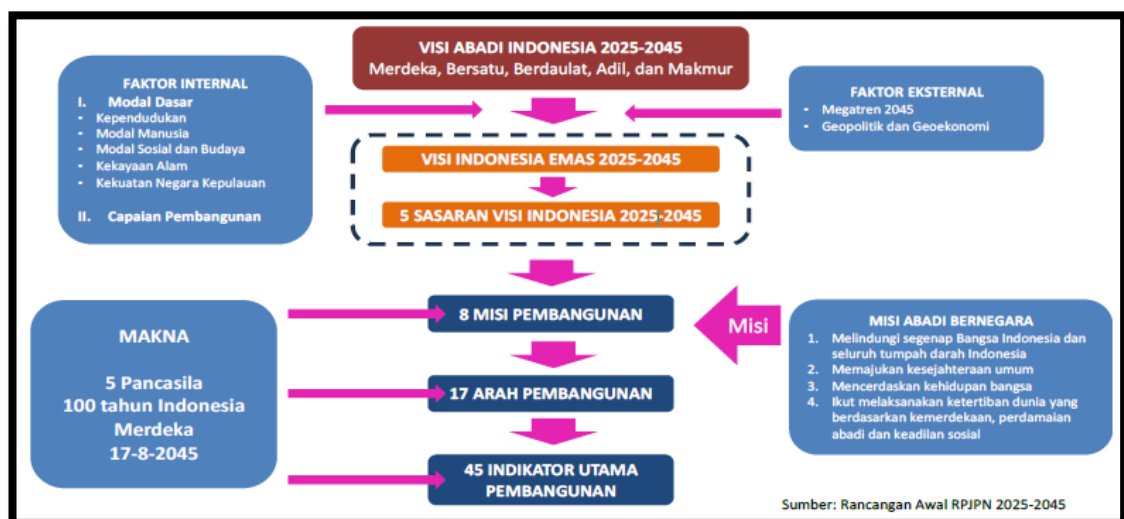
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, maka diperlukannya suatu visi.

4.1 Visi

Visi diperlukan untuk menjawab semua arah pembangunan yang merupakan transformasi secara menyeluruh menuju arah yang lebih baik dan menyentuh segala aspek.

4.1.1 Visi Negara

Visi bernegara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan Makmur. Berikut gambaran visi Indonesia :



Gambar 4.1
Kerangka Visi Indonesia

Sumber : RPJPN 2025-2045



Visi tersebut didukung oleh empat misi negara yang merupakan tujuan bangsa. Pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, dunia yang merdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4.1.2 Visi Indonesia Emas 2045

Sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045 melalui 8 Misi (Agenda) dalam membangun Indonesia Emas 2045, terdapat 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Adapun gambar kerangka visi Indonesia, sebagai berikut :



Gambar 4.2
Visi Indonesia Emas 2045

Sumber : RPJPN 2025-2045

Bahwa Kekuatan geopolitik Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritim secara efektif. Menjadi negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara 2 (dua) samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Melalui kekuatan geopolitik, militer yang memiliki kekuatan di bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar, serta geoekonomi perdagangan serta peradaban maritim mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang besar di kancah dunia internasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045.

Negara Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

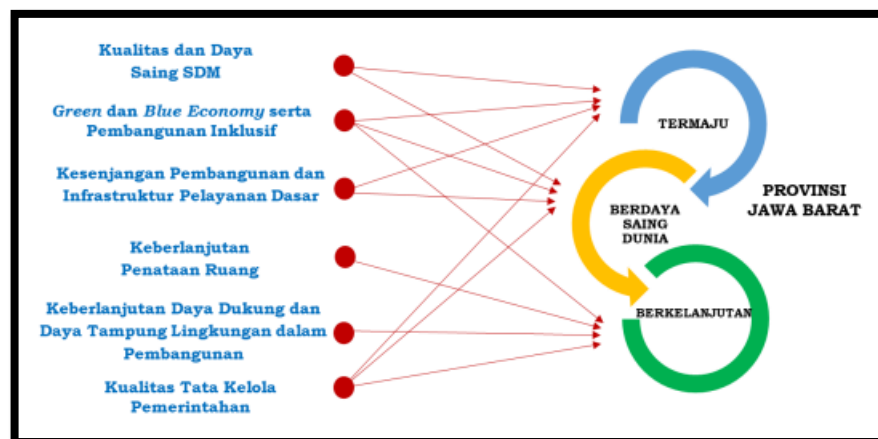
Negara Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor 5 (lima) terbesar dunia, berbasiskan

pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sedangkan komitmen berkelanjutan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.3 Visi Jawa Barat 2045

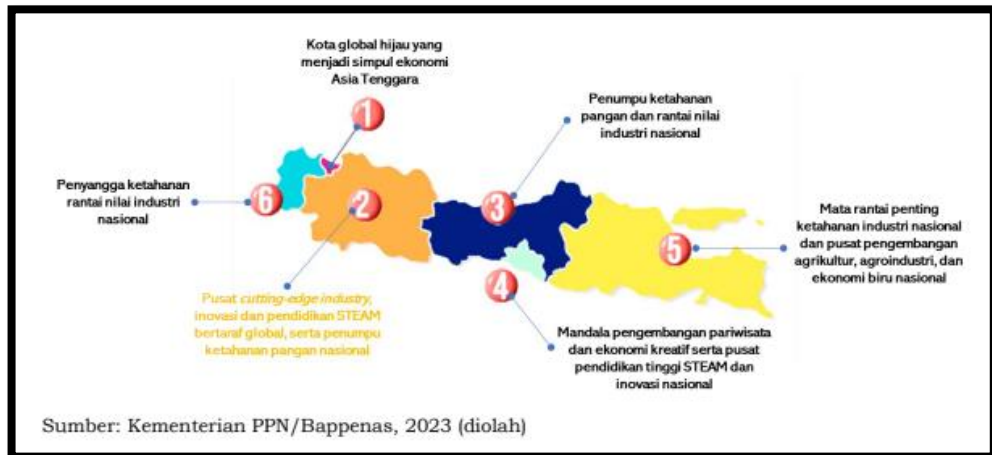
Melalui identifikasi isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Visi Indonesia 2045 dirumuskan sebagai berikut :



Sumber : RPJPD Provinsi Jawa barat, 2024 (diolah)

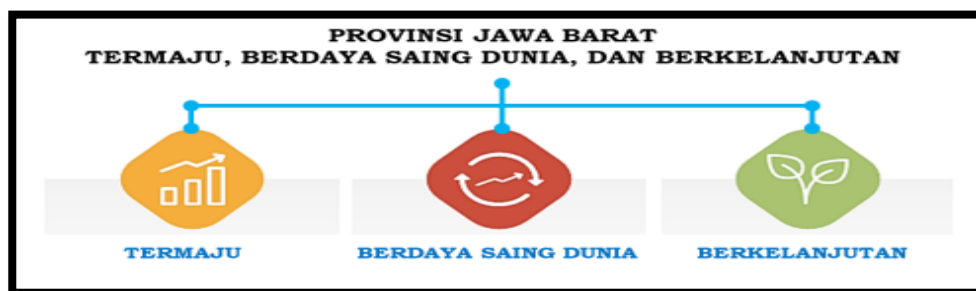
Gambar 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dan Visi 2045

serta penjabaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN, bahwa Pulau Jawa diarahkan sebagai Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.4
Tema Pembangunan Jawa Barat dalam RPJPN

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan visi Provinsi Jawa Barat yaitu Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Dan digambarkan dalam kerangka visi sebagai berikut :



Sumber : RPJPD Provinsi Jawa barat, 2024 (diolah)

Gambar 4.5
Visi Provinsi Jawa Barat 2045

Pada tahun 2045, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi provinsi yang memiliki standar kualitas tinggi melebihi provinsi lainnya di Indonesia dan mampu bersaing dengan standar internasional. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan



adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif. Adapun penjabaran visi Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Termaju

Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang rendah, serta infrastruktur berkualitas dan modern. Kondisi dimana Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat perkembangan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Begitu pula dengan kondisi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat secara optimal mendukung dan merupakan cerminan capaian Provinsi Jawa Barat.

Melalui pengembangan sebagai pusat cutting-edge industry Provinsi Jawa Barat berperan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, dengan dukungan infrastruktur berkualitas, dan modern serta menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi.

B. Berdaya Saing Dunia

Merupakan kondisi Jawa Barat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi melalui transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas barang dan harga barang yang bersaing serta menciptakan teknologi, mengadopsi dan mengelola teknologi secara efektif, efisien dan inovatif dan ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Selanjutnya keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia melalui kualitas SDM yang unggul dan berbudaya, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi.



Sedangkan keunggulan kompetitif bidang infrastruktur melalui kualitas infrastruktur yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

C. Berkelanjutan

Berkelanjutan memiliki arti menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Provinsi Jawa Barat dalam konteks lokal dan global serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Untuk menjadi daerah yang Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat yang memiliki sasaran visi akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah;
3. Meningkatnya kerjasama daerah dengan dunia internasional;
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Keselarasan visi Jawa Barat dengan visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 digambarkan sebagai berikut :



Tabel 4.1
Keselarasan Visi Jawa Barat terhadap RPJPN

RPJPN 2025-2045				RPJPD 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,65	495,56
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34
	b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390	0,357 - 0,380
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat	Efektifitas Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti (%)*	90,91 (2023)	100
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,56	0,69
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84

Sumber: RPJPN 2025-2045, 2024 (diolah)

*indikator proxy

4.1.4 Visi Kota Banjar 2045

Dalam upaya mewujudkan sebuah cita-cita pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu menentukan visi Kota Banjar tahun 2025-2045 perlu dilakukan perumusan dan penyelarasan dari beberapa dasar kebijakan yaitu :

1. bahwa dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 dengan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, melalui penjabaran tema pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 bahwa Provinsi Jawa Barat diarahkan sebagai pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan Pendidikan *Science, Techonology, Engineering, Arts, and Mathematics* (STEAM) serta menumpu ketahanan pangan nasional;
2. bahwa dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 yaitu untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, diperlukan peningkatan standar kualitas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif;

3. Bahwa sesuai Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2024 – 2044 Penataan Ruang Kota Banjar ditujukan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kota hijau dan sehat dengan pengembangan sektor berbasis sumber daya alam dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Sesuai rekomendasi kata kunci visi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045 yaitu Kota Banjar dengan ekonomi hijau dan unggul, berkelanjutan, Tangguh dan inklusif ;
5. Dengan memperhatikan potensi daerah dan capaian sasaran pembangunan sebelumnya (evaluasi RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025); serta
6. Hasil kajian teknokratik RPJPD 2025-2045 berupa identifikasi permasalahan serta penentuan isu strategis yang disajikan di bab III dokumen RPJPD.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan dilakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan serta melalui penyepakatan dan komitmen bersama Pemerintahan Kota Banjar diperoleh Perumusan visi Kota Banjar sebagai berikut :



Sumber : Perumusan Visi Bappelitbangda, 2024 (diolah)

Gambar 4.6
Rumusan Visi Kota Banjar 2045



Dari rumusan visi **“Kota Banjar Madani, Maju dan Berkelanjutan”**. Dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan. Perwujudan visi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konkrit tanpa melalui kerja keras, inovasi, dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah (dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah lainnya), masyarakat, dan sektor swasta. Visi ini akan berhasil dicapai melalui kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Sebuah cita-cita perwujudan pada tahun 2045 didasari dengan tekad, kerja keras, dan visi yang jelas, Kota Banjar dapat mencapai kota yang madani bagi masyarakat, maju, dan keberlanjutan melalui 5 (lima) sasaran utama visi sebagai tolak ukur pencapaian.

Madani

Bahwa Kota Banjar dalam melaksanakan pembangunan fokus pada pencapaian masyarakat yang beradab, berakhlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun perwujudan Visi Madani tercermin dalam sasaran visi Peningkatan Daya Saing Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia serta sasaran visi Kerjasama Daerah (kabupaten/kota) Meningkatkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah.

Maju

Kota Banjar unggul dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan peningkatan kualitas infrastruktur, investasi, teknologi informasi dan sektor strategis lainnya. Adapun perwujudan visi maju tercermin dalam sasaran visi peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita dan kontribusi PDRB industri pengolahan serta sasaran visi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan dengan indikator Tingkat Kemiskinan, Kontribusi Rasio

Gini, Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota serta Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Berkelanjutan

Kota Banjar melaksanakan pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial. Perwujudan Visi Berkelanjutan tercermin dalam sasaran visi Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission dengan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berikut gambaran keterkaitan visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045, sebagai berikut :



Sumber : Visi RPJPN, RPJPD Prov Jawa Barat, 2024 (diolah)

Gambar 4.7
Keterkaitan Perumusan Visi

Untuk menjadikan Kota Banjar Madani, Maju dan Berkelanjutan dirumuskan dalam 5 (lima) sasaran utama visi, 10 (sepuluh) indikator sasaran sebagai tolak ukur pencapaian, yaitu:

A. Kota Banjar madani

1. Meningkatnya kerjasama daerah, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Inovasi Daerah



- b. Indeks Daya Saing Daerah
 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
- B. Kota Banjar Maju
 1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. PDRB per kapita
 - b. Kontribusi PDB Industri pengolahan
 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kemiskinan
 - b. Rasio gini (Indeks)
 - c. Kontribusi PDRB Kota Ke Provinsi
- C. Kota Banjar Berkelanjutan
 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim, dengan indikator :
 - a. Penurunan Intensitas Emisi GRK
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berikut ini merupakan gambaran penyelarsan indikator visi dan target antara RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045, sebagai berikut :



Tabel 4.2

Keselarasan Indikator Visi dan Target antara RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjar

No	RPJPD PROVINSI 2025-2045				RPJPD KAB/KOTA 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	25,43	45,59-96,73
		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54.65	495.56		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) <i>tidak dapat digunakan karena Kota Banjar tidak memiliki laut, yang merupakan indikator atau faktor penghitung.</i>		
		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60		c. Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	9,97	7,80
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,00 - 5,52	0,66 - 1,08
		b. Rasio gini (Indeks)	0,419 – 0,425	0,357 – 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,349 - 0,362	0,329 - 0,342
		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12.54	10.77		c. Kontribusi PDRB Kota Ke Provinsi (%)	0,19	0,23
3	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Inovasi Daerah			Kerjasama daerah (Kab/Kota) Meningkat	a. Indeks Inovasi Daerah	50	75
		Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,87	5,00		b. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,50	4,50
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0.55	0.69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,63	78,69
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6.61	75.84	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-31.107,17	362.306,1
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,37	66,41

Sumber : Data Ranhir RPJPD Prov Jawa Barat (diolah), 2024

4.2 Misi

4.2.1 Misi Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



sumber : Rancangan RPJPN 2025-2045

Gambar 4.8
Perumusan Misi Nasional

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif



- (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
 6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
 7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
 8. Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.



Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang mewujudkan Indonesia Emas 2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

4.2.2 Misi Pembangunan Jawa Barat 2045

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Dan Berdaya Saing

Upaya mengembangkan sumberdaya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan masyarakat Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat yang memiliki karakteristik, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya,



menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman.

b. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Transformasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah seringkali dimulai dengan investasi dalam infrastruktur dasar, mengadopsi teknologi baru dan mendorong inovasi. Hal ini melibatkan dalam proses produksi. Penguatan produktivitas daerah dapat pula mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

c. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif

Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas dan inovatif mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus melakukan reorientasi identitas pemerintah dengan mengubah kebiasaan lama dan menambah pernyataan nilai (value statement) serta manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam tata kelola. Value statement dalam pemerintahan adalah menjelaskan prioritas dan mengungkapkan standar dan prinsip yang dimiliki pemerintah dalam memberikan pelayanan. Knowledge management bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu, Pemerintah



Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat terus berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

d. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Stabilitas Ekonomi

Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif. Dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern, pemerintahan harus dapat dipercaya, dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan menjaga ketentraman dan keadilan serta meningkatkan kerja sama dunia internasional.

e. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, laut, pesisir, dan lahan



basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

f. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.

g. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas



bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

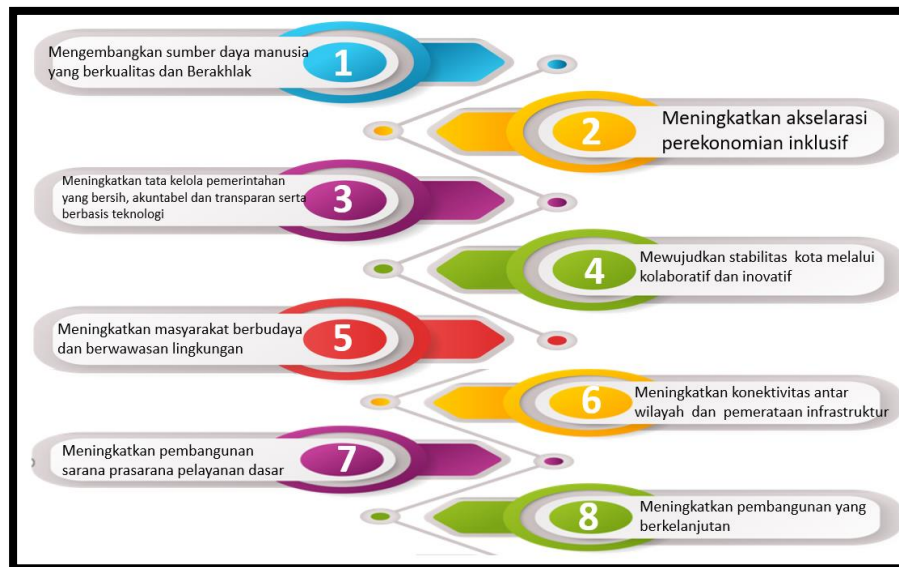
h. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan pertahanan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, upaya dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen resiko yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal itu. Di samping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagaimana masyarakatnya dikenal lembut, periang, sopan, religius, dan menghormati orang tua patut menjadi landasan juga. Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat tampak sebagaimana dalam ungkapan silih asih, silih asah dan silih asuh. Artinya saling mengasahi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu), dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan). Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan Provinsi Jawa Barat Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dapat diwujudkan. Dengan demikian, perwujudan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

4.2.3 Misi Pembangunan Kota Banjar 2045

Upaya mewujudkan Kota Banjar Madani, Maju dan Berkelanjutan pada Tahun 2045, maka diperlukan pernyataan misi sebagai arah tujuan pembangunan, sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

Gambar 4.9
Misi Kota Banjar 2025-2045

Dari 8 (delapan) pernyataan Misi Kota Banjar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak.

Pengembangan SDM berkualitas dan berakhlak merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi, keterampilan, Moral, etika dan beragama serta memiliki kapasitas mampu memberikan kontribusi signifikan dalam lingkup pekerjaan, organisasi, atau masyarakat melalui kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak dalam pemenuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan yang dijabarkan ke dalam kebijakan :

- a. Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan.
- b. Peningkatan kualitas serta aksesibilitas Pendidikan.
- c. Terwujudnya Peningkatan perlindungan sosial.



2. Meningkatkan akselerasi perekonomian inklusif

Peningkatan akselerasi perekonomian inklusif ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula fokus dan berbasis komoditas, bertransformasi menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, diantaranya melalui penciptaan iklim investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, dan kompetensi tenaga kerja yang dijabarkan ke dalam kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan Digitalisasi Pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Penerapan ekonomi hijau
- c. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
- d. Peningkatan iklim ramah investasi.
- e. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan serta berbasis teknologi

Tata kelola pemerintahan yang efektif dengan dukungan teknologi sehingga dalam prosesnya menjadikan Pemerintahan Kota Banjar yang bersih dan transparan dalam pengelolaannya. Kebijakan yang lebih adaptif yang di dukung oleh SDM yang unggul dapat secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik dan fungsi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan menerapkan kebijakan penataan kelembagaan, regulasi, kualitas aparatur dan kualitas kebijakan yang dihasilkan, melalui fokus kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemerintahan yang berintegritas dan berbasis teknologi.



4. Mewujudkan stabilitas kota melalui kolaboratif dan inovatif

Melalui perwujudan stabilitas Kota Banjar diharapkan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menjadi wilayah yang mempunyai standar etika tinggi sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Kota Banjar diharapkan memiliki kemampuan untuk merespon tantangan regional dan global untuk tetap mampu menerapkan kebijakan dalam mempertahankan stabilitas wilayah dalam segala aspek. Melalui kolaboratif dan inovatif dalam membuat kebijakan mewujudkan stabilitas kota dan penciptaan stabilitas lingkungan perkotaan, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengawasan, Keadilan Hukum, Berdemokrasi Dan Wawasan Kebangsaan.
- b. Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah.
- c. Peningkatan kerjasama dan daya saing daerah.

5. Meningkatkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan

Melalui peningkatan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan melalui kebijakan peningkatan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerukunan umat beragama.
- b. Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- d. Peningkatan ketahanan pangan daerah, energi dan sumber daya air.
- e. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.



6. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan infrastruktur

Perwujudan peningkatan infrastruktur merupakan implementasi dari transformasi pembangunan yang baik. Koneksi antar wilayah merupakan bagian penting dalam proses mempercepat dan pemerataan pembangunan berkeadilan. Melalui peningkatan infrastruktur diharapkan akses mobilitas perekonomian dan pertumbuhan inklusi pembangunan akan tumbuh secara optimal.

7. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar

Meningkatkan sarana prasarana pelayanan dasar sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurai kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien.

8. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan alam serta tata ruang yang efisien. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan tepat dan cermat.

Untuk melihat keselarasan dan keterkaitan antara misi dalam RPJPN dengan misi Kota Banjar 2025-2045 digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar (diolah), 2024

Gambar 4.10
Keterkaitan Misi RPJPN dengan RPJPD Kota Banjar

Dari gambar diatas bahwa Misi RPJPD Kota Banjar berkaitan jelas dengan misi RPJPN yang dihubungkan dengan garis lurus persandingan, terlihat koherensi antar dari 8 (delapan) misi RPJPN dan 8 (delapan) misi RPJPD Kota Banjar.

Adapun keselarasan Misi RPJPD Kota Banjar dapat disandingkan dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan disajikan dalam tabel sandingan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar (diolah), 2024

Gambar 4.11
Keterkaitan Misi Provinsi dengan Kota Banjar

Dari gambar sandingan misi RPJPD Kota Banjar dan RPJPD Provinsi Jawa Barat terlihat masing-masing misi mempunyai penyelarasan yang dapat dikatakan selaras, artinya bahwa upaya pencapaian visi dapat dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan upaya pencapaian secara Bersama. Begitu pula upaya perwujudan dari visi nasional dapat dilakukan secara optimal di Kota Banjar khususnya dan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional secara umum.

Berikut Ini penyelarasan yang disajikan dalam bentuk tabel persandingan, melalui agenda transformasi yang disandingkan dengan misi Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, sebagai berikut :



Tabel 4.3

Keselarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Banjar 2025-2045

No	Agenda	MISI		
		RPJPN 2025-2045	RPJPD PROV JAWA BARAT 2025-2045	RPJPD KOTA BANJAR 2025-2045
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Meningkatkan akselerasi perekonomian inklusif
3		Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dan Transparan serta berbasis teknologi
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan stabilitas kota melalui kolaboratif dan inovatif
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Meningkatkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan infrastruktur
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar (diolah), 2024



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan per 5 (lima) tahun dalam periode 20 (dua puluh) tahun kedepan. Melalui tahapan dan proses yang terarah diharapkan kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih optimal seiring dinamika perubahan pembangunan.

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Perumusan arah kebijakan pembangunan Kota Banjar ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dan selaras dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN maupun RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

Rumusan tema dan tahapan pembangunan digunakan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah dan melalui tema tahapan tersebut diharapkan pembangunan lebih mengarah dan fokus dalam menyelesaikan dinamika permasalahan pembangunan. Adapun rumusan tema dan kerangka kerja tematik tahapan RPJPD Kota Banjar 2025-2045 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.1

Tema Pembangunan Kota Banjar Tahun 2025-2045

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda (diolah), 2024

Secara garis besar, tahapan tema pembangunan dari arah kebijakan pembangunan Kota Banjar untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

➤ **Tahap I (Fondasi)**

Merupakan penguatan fondasi pembangunan, dalam tahapan ini yaitu tahun 2025 sampai 2029 Kota Banjar perlu menyiapkan dasar pelaksanaan pembangunan daerah yang mempertimbangkan arah pembangunan regional dan nasional serta meningkatkan capaian kinerja. Adapun upaya yang dilakukan dalam tahap penguatan fondasi meliputi :

1. Pemenuhan pelayanan dasar untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak;
2. Penciptaan iklim investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, riset inovasi dan kompetensi tenaga kerja;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, kualitas aparatur dan kualitas kebijakan;
4. Penciptaan stabilitas lingkungan Perkotaan;
5. Pemberdayaan masyarakat dan penataan pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Penyediaan konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur;



7. Penyediaan Infrastruktur dasar serta penataan sarana prasarana pelayanan;
8. Penciptaan Kawasan Strategis dan Khusus.

➤ **Tahap II (Akselerasi)**

Merupakan akselerasi pembangunan Kota Banjar pada tahun 2030 sampai 2034, dalam tahapan ini Kota Banjar melaksanakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan disemua aspek terlebih pada sektor-sektor yang berdaya saing. Adapun upaya yang dilakukan pada tahap akselerasi meliputi :

1. Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak
2. Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, serta riset dan inovasi dan kompetensi tenaga kerja;
3. Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan kompetensi berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan stabilitas lingkungan Perkotaan;
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta Kualitas tata kelola Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur;
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar serta penataan sarana prasarana pelayanan;
8. Pemenuhan Aksesibilitas Kawasan strategis dan khusus.

➤ **Tahap III (Pemantapan)**

Pembangunan pada tahun 2035 sampai 2039 yang lebih mengarah dan fokus pada pemantapan atau penguatan pembangunan yang akan mendorong perwujudan visi Kota Banjar dengan fokus Pembangunan yang belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan dalam tahap pemantapan meliputi :

1. Penguatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan sektor investasi dan ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja;



3. Penguatan kelembagaan adaptif, dan ASN yang kompetitif;
4. Penguatan stabilitas lingkungan Perkotaan;
5. Optimalisasi keterlibatan masyarakat serta Perlindungan Lingkungan Hidup;
6. Optimalisasi Kualitas konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur;
7. Optimalisasi Infrastruktur dasar serta tata kelola sarana prasarana pelayanan;
8. Optimalisasi Aksesibilitas Kawasan.

➤ **Tahap IV (Perwujudan)**

Tahap perwujudan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2040 sampai 2045, upaya mewujudkan visi Kota Banjar Madani, Maju dan Berkelanjutan yang merupakan visi Kota Banjar dilakukan diberbagai sektor, sehingga kondisi yang diharapkan sesuai misi dapat dilakukan dengan optimal. Adapun upaya yang dilakukan dalam pada tahap perwujudan, meliputi :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing;
3. Tata kelola pemerintahan berintegritas, adaptif serta kolaboratif;
4. Perwujudan stabilitas lingkungan Perkotaan;
5. Perwujudan masyarakat yang berwawasan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Berkelanjutan;
6. Perwujudan konektivitas perkotaan yang berkualitas dan Berkelanjutan;
7. Perwujudan Infrastruktur dasar serta tata kelola pembangunan sarana prasarana pelayanan yang berkelanjutan;
8. Perwujudan Kawasan Khusus dan Strategis.

Untuk menjabarkan arah kebijakan pada setiap tahapan pembangunan yang mengacu pada setiap misi Kota Banjar, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak

Arah kebijakan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia di Kota Banjar yang berkualitas dan berakhlak, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.2

Tahapan Misi 1 Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

2. Misi Meningkatkan Akselarasi Perekonomian Inklusif

Arah kebijakan dalam upaya Meningkatkan akselarasi perekonomian inklusif di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.3

Tahapan Misi 2 Meningkatkan akselarasi perekonomian inklusif



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

3. Misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Akuntabel dan Transparan serta Berbasis Teknologi

Arah kebijakan dalam upaya Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih akuntabel dan transparan serta berbasis teknologi di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.4
Tahapan Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih akuntabel dan transparan serta berbasis teknologi.

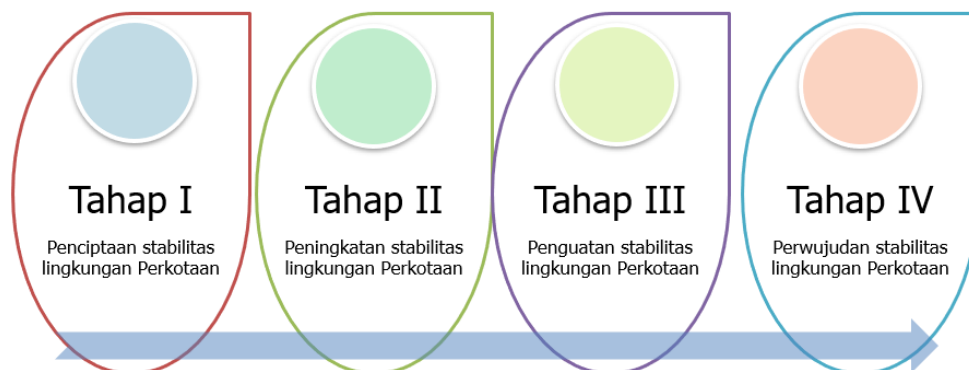


Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

4. Misi Mewujudkan Stabilitas Kota melalui Kolaboratif dan Inovatif

Arah kebijakan dalam upaya mewujudkan stabilitas kota melalui kolaboratif dan inovatif di Kota Banjar, digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.5
Tahapan Misi 4 Mewujudkan stabilitas kota melalui kolaboratif dan inovatif

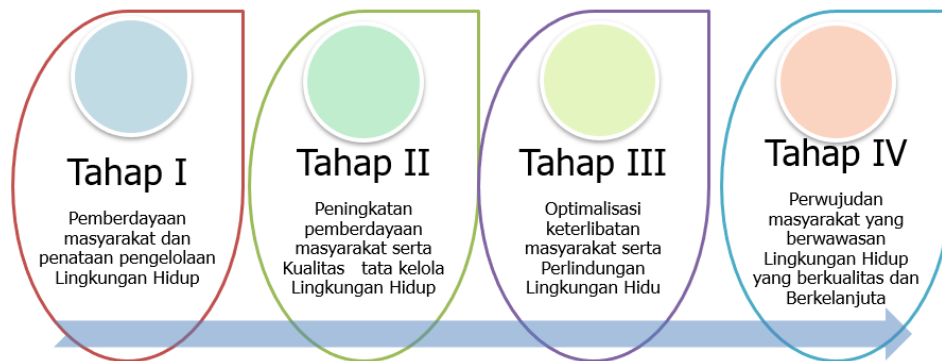


Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

5. Misi Meningkatkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan dalam upaya meningkatkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.6
Tahapan Misi 5 Meningkatkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan

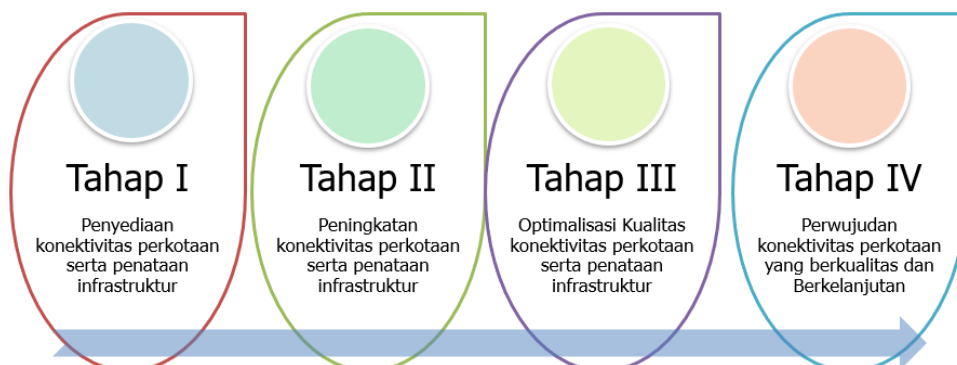


Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

6. Misi Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah Dan Pemerataan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan infrastruktur di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.7
Tahapan Misi 6 Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan infrastruktur

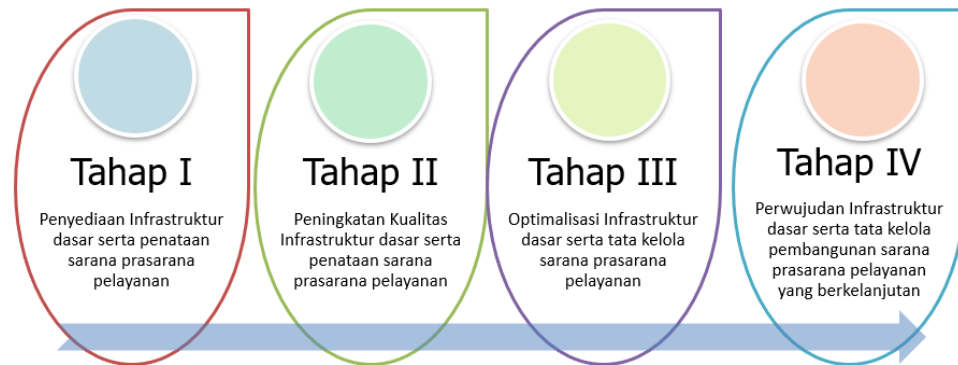


Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

7. Misi Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar

Arah kebijakan dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.8
Tahapan Misi 7 Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar

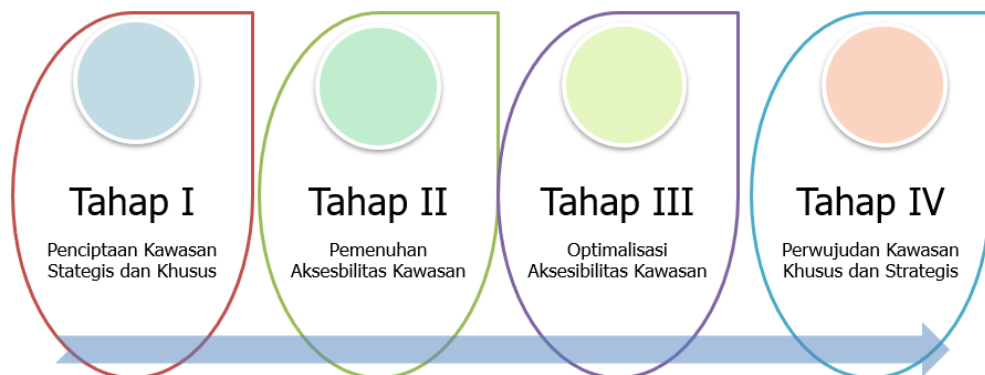


Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

8. Misi Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Banjar, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.9
Tahapan Misi 8 Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan



Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024



Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045

VISI (1)	MISI (2)	ARAH KEBIJAKAN			
		I (3)	II (4)	III (5)	IV (6)
Kota Banjar Madani, Maju dan Berkelanjutan	Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak	Pemenuhan pelayanan dasar untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak	Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak	Penguatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak
	Meningkatkan akselerasi perekonomian inklusif	Penciptaan iklim investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah serta riset inovasi dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, serta riset inovasi dan kompetensi tenaga kerja	Penguatan investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, serta riset inovasi dan kompetensi tenaga kerja	Terwujudnya Pembangunan investasi, ekonomi kreatif, konektivitas antar wilayah, serta riset inovasi dan kompetensi tenaga kerja
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih akuntabel dan transparan serta berbasis teknologi	Penataan kelembagaan, regulasi, kualitas aparatur dan kualitas kebijakan berbasis teknologi informasi	Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan kompetensi berbasis teknologi informasi	Penguatan kelembagaan adaptif, dan ASN yang kompetitif berbasis teknologi informasi	Tata kelola pemerintahan berintegritas, adaptif serta kolaboratif berbasis teknologi informasi
	Mewujudkan stabilitas kota melalui kolaboratif dan inovatif	Penciptaan stabilitas lingkungan Perkotaan	Peningkatan stabilitas lingkungan Perkotaan	Penguatan stabilitas lingkungan Perkotaan	Perwujudan stabilitas lingkungan Perkotaan
	Meningkatkan masyarakat berbudaya	Pemberdayaan masyarakat dan penataan pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pemberdayaan masyarakat serta	Optimalisasi keterlibatan masyarakat	Perwujudan masyarakat yang berwawasan Lingkungan Hidup yang



VISI (1)	MISI (2)	ARAH KEBIJAKAN			
		I (3)	II (4)	III (5)	IV (6)
	dan berwawasan lingkungan		Kualitas tata kelola Lingkungan Hidup	serta Perlindungan Lingkungan Hidup	berkualitas dan Berkelanjutan
	Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan infrastruktur	Penyediaan konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur	Peningkatan konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur	Optimalisasi Kualitas konektivitas perkotaan serta penataan infrastruktur	Perwujudan konektivitas perkotaan yang berkualitas dan Berkelanjutan
	Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar	Penyediaan Infrastruktur dasar serta penataan sarana prasarana pelayanan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar serta penataan sarana prasarana pelayanan	Optimalisasi Infrastruktur dasar serta tata kelola sarana prasarana pelayanan	Perwujudan Infrastruktur dasar serta tata kelola pembangunan sarana prasarana pelayanan yang berkelanjutan
	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan	Penciptaan Kawasan Strategis dan Khusus	Pemenuhan Aksesibilitas Kawasan	Optimalisasi Aksesibilitas Kawasan	Perwujudan Kawasan Khusus dan Strategis

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024



5.1.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)

RPJPD yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang memuat seluruh aspek pembangunan. Namun demikian, dalam upaya mewujudkan pencapaian visi 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*game changers*), yaitu

Tabel 5.2
Upaya Transformatif Kota Banjar Tahun 2025-2045

Misi	<i>Game Changers</i>
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak	<ul style="list-style-type: none">- Percepatan wajib belajar 13 tahun- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi- Peningkatan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta)- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi
Meningkatkan Akselerasi Perekonomian Inklusif	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan anggaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi- Mendukung pengembangan industri kecil dan menengah melalui pelatihan, akses ke teknologi, dan bantuan pemasaran.- Peningkatan Penyediaan dan layanan listrik- Percepatan transformasi digital- Integrasi infrastruktur dengan kawasan pertumbuhan ekonomi



Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Akuntabel dan Transparan serta Berbasis Teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Transformasi manajemen ASN serta pemberantasan korupsi- Peningkatan Reformasi Birokrasi- Peningkatan peran lembaga legislatif
Mewujudkan Stabilitas Kota melalui Kolaboratif dan Inovatif	<ul style="list-style-type: none">- Perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko- Reformasi APBD- Penguatan kelembagaan perencanaan dan penganggaran- Penerapan subsidi tepat sasaran
Meningkatkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan karakter SDM- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi- Ketahanan energi dan air serta ketahanan pangan dengan pendekatan terpadu

Sumber : Hasil Analisis, 2023

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran Pokok RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Pemerintah Kota Banjar 2045 yaitu Madani, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran Pokok dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta disesuaikan dengan karakteristik daerah. Arah Kebijakan Transformasi yang dituangkan kedalam Indikator Utama Pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan dengan sasaran pokok. Maka diperoleh sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. Terwujudnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Terwujudnya perlindungan sosial;
4. Terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
5. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja;



6. Terwujudnya Stabilitas ekonomi dan berkeadilan;
7. Terwujudnya Pembangunan dan pusat pertumbuhan daerah;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif;
9. Terwujudnya Pembangunan Teknologi Informasi Daerah;
10. Terwujudnya reformasi hukum, keamanan ketertiban Masyarakat;
11. Terwujudnya stabilitas ekonomi yang berkeadilan;
12. Terwujudnya pengelolaan potensi dan daya saing daerah;
13. Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat yang berbudaya;
14. Terwujudnya ketahanan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender;
15. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
16. Terwujudnya Infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan;
17. Terwujudnya ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, serta Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 hasil penyelarasan disimpulkan bahwa diperlukannya Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan, Peningkatan kualitas serta aksesibilitas Pendidikan, Peningkatan perlindungan sosial, Optimalisasi dan digitalisasi pengembangan ekonomi kreatif, Penerapan ekonomi hijau, Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, Peningkatan iklim ramah investasi, Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif, Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas, Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah, Peningkatan kerjasama regional, Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender, Peningkatan kualitas lingkungan hidup,



Peningkatan ketahanan pangan dan sumber daya air Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim. Berikut perumusan penyelarasan arah pembangunan Kota Banjar :

Tabel 5.3
Penyelarasan arah Pembangunan RPJPD Kota Banjar dengan
Provinsi Jawa Barat serta RPJPN Tahun 2025-2045

No	Transformasi	Arah Pembangunan		
		RPJPN	RPJPD Prov. Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan berkualitas yang merata	Peningkatan kualitas serta aksesibilitas Pendidikan
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju	Peningkatan perlindungan sosial
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Optimalisasi dan digitalisasi pengembangan ekonomi kreatif
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.	Penerapan ekonomi hijau
		IE 6. Transformasi Digital	Pembangunan SDM berdaya saing	Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Peningkatan iklim ramah investasi
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster	Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pusat



No	Transformasi	Arah Pembangunan		
		RPJPN	RPJPD Prov. Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
		Pertumbuhan Ekonomi	perekonomian di setiap wilayah pengembangan	pertumbuhan ekonomi baru
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, dan berbasis teknologi
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan kerjasama daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan kerukunan umat beragama	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas lingkungan hidup lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup



No	Transformasi	Arah Pembangunan		
		RPJPN	RPJPD Prov. Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan dan sumber daya air
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

Atas tabel penyelarasan tersebut, dalam melaksanakan kebijakan transformasi di daerah yang diuraikan dalam setiap arah pembangunan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan
- 2 Peningkatan kualitas serta aksesibilitas Pendidikan
- 3 Peningkatan perlindungan sosial
- 4 Optimalisasi dan digitalisasi pengembangan ekonomi kreatif
- 5 Penerapan ekonomi hijau
- 6 Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing
- 7 Peningkatan iklim ramah investasi
- 8 Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru
- 9 Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
- 10 Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
- 11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
- 12 Peningkatan kerjasama regional
- 13 Peningkatan kerukunan umat beragama
- 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender
- 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 16 Peningkatan ketahanan pangan dan sumber daya air
- 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan yang dilakukan merupakan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 digambarkan sebagai berikut :



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2023 (diolah)

Activi

Gambar 5.10 **Misi (Agenda) Transformasi Pembangunan Tahun 2045**

Bahwa arah kebijakan transformasi secara garis besar dibagi menjadi kebijakan Transformasi, landasan transformasi dan kerangka implementasi Transformasi.

Dalam menentukan arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Banjar dalam mendukung RPJPD Provinsi Jawa Barat dan berupaya mencapai tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kota Banjar, maka kebijakan yang mendukung tercapainya hal tersebut secara rinci dapat gambarkan pada tabel berikut :



Tabel 5.4

Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Kota Banjar tahun 2025-2045

Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pendidikan kesetaraan
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun <i>reskilling</i> .
	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Pengembangan/peningkatan <i>government-induced</i> activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.</p>
	<p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan</p>
	<p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).</p>	<p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</p>



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Mengembangkan aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi layak secara terintegrasi dan berkelanjutan
	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citanduy



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan termasuk pengetahuan perikanan modern



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan
	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri consumer goods & general manufactures, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (aero-industry), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan <i>green industry</i>).	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri consumer goods & general manufactures, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (aero-industry), industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan <i>green industry</i>).	Pengembangan industri, dan penciptaan Kawasan industri serta pengelolaan sentra industri



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Penciptaan infrakstruktur Kawasan dan konektivitas antar wilayah serta pertumbuhan sarana prasarana jalan (tol/non tol) perkeretaapian, bandar udara, pergudangan dan sector lainnya.
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Percepatan penyediaan infrastruktur sarana prasarana penunjang aktivitas industry dan sector lainnya.
	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung), serta kawasan perkotaan Cirebon.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	- Cibadak-Palabuhanratu;	- Cibadak-Palabuhanratu;	
	- Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang;	- Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang;	
	- Ciranjang-Padalarang;	- Ciranjang-Padalarang;	
	- Akses Pelabuhan Patimban;	- Akses Pelabuhan Patimban;	
	- Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;	- Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;	- Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;
	- Garut-Pameungpeuk;	- Garut-Pameungpeuk;	
	- Kalipucang-Pangandaran;	- Kalipucang-Pangandaran;	
	- Cirebon-Indramayu; dan	- Cirebon-Indramayu; dan	
	- Cirebon-Kuningan.	- Cirebon-Kuningan.	
	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan,



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik
	Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.	Reaktivasi layanan perkeretaapian, terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.
	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat)
	Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian,
	Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.	Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon- Semarang-Surakarta-Surabaya.	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang)



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban.	Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas pelayanan Pelabuhan Patimban.	
	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	
	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	
	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.



	<p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>	<p>Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>	<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis</p>
--	--	--	--



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
Transformasi Tata Kelola	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
	kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi.
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
	Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Penataan dan pengelolaan asset daerah serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, mDUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, mDUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Penguatan dan pengembangan riset dan teknologi berbagai bidang serta penguatan kolaborasi riset multi sektor antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	Pengembangan pembiayaan inovatif, CSR, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> serta pembiayaan lainnya.
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat-provinsi dan Kota.
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	Sinkronisasi periodisasi dan substansi RPJPD dan RTRW Kota
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran prioritas Provinsi dan Nasional.



Transformasi	Arah Kebijakan		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Barat	RPJPD Kota Banjar
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Penguatan Penyelenggaraan otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta penguatan sinergitas/ hubungan Pusat-Provinsi-Daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pelaksanaan, penerapan dan penguatan pengendalian pembangunan melalui manajemen risiko.

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024



5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Banjar tidak terlepas dari proses penyesuaian dan mendukung Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan beberapa indikator proxy penyesuaian dari 45 indikator. Target IUP tahun 2045 ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kota Banjar. Sasaran Pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kota Banjar beserta indikator kinerja, tercantum pada tabel berikut :



Tabel 5.5
Keselarasan Indikator Utama Pembangunan (IKU)

No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL						
IE1	Kesehatan untuk Semua			Peningkatan mutu dan pesebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan						
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75.29	80.78	Usia Harapan Hidup (UHH)(Tahun)	75,17	76.21	77.14	78.31	79,34	Dinkes
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak						
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	a. Angka Kematian Ibu (jumlah kematian ibu)	6	4	3	3	1	Dinkes
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	b. Prevalensi <i>Stunting</i>	20,63	18	15	10	5,43	Dinkes
3	Penanganan Tuberkulosis:	91	100	Insidensi Tuberkulosis						
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	92	94	96	98	Dinkes



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	91	100	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	92	94	96	98	Dinkes
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89.31	99.5	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan (%)	94,8	95,0	96,0	98,0	99,0	Dinkes
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Peningkatan kualitas serta aksesibilitas Pendidikan						
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran						
a.	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	22,25 – 24,25	71,81 – 73,81	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,65	68,90	69,15	69,40	69,65	DKP
	i) Literasi Membaca	1,70 – 3,70	65,20 – 67,20	Tingkat Kegemaran Membaca	51,50	54,00	56,50	59,00	61,50	DKP
b.	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:	35,55 – 37,55	71,42 – 73,42	Indeks Pembangunan Literasi SD/MI/Sederajat	83	88	93	98	100	Disdik
				Indeks Pembangunan Literasi SMP/MTs/Sederajat	64	76	86	96	100	Disdik
	ii) Numerasi	19,34 – 21,34	63,01 – 65,01	Indeks Literasi Numerasi SD/MI/Sederajat	75	80	85	90	100	Disdik
				Indeks Literasi Numerasi SMP/MTs/Sederajat	62	72	82	92	100	Disdik



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
c.	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	Rata-Rata lama sekolah - RLS (tahun)	8,81	8,95	8,97	8,99	9,01	Disdik
d.	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	Harapan Lama Sekolah - HLS (tahun)	13,3	13,5	13,8	14,1	14,4	Disdik
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9.64	9,64 – 14,50	APK SD/Mi/Paket A Sederajat	99.5	100	100	100	100	Disdik
				APK SMP/MTS/Paket B Sederajat	100	100	100	100	100	Disdik
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63.3	75	APM SD/Mi/Paket A Sederajat	95	100	100	100	100	Disdik
				APM SMP/MTS/Paket B Sederajat	95.5	98	100	100	100	Disdik
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			Peningkatan perlindungan sosial						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Tingkat Kemiskinan (%)	5,52	3,74	2,74	1,74	0,51	Dinsos
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20.27	80.04	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kota (%)	56,15	63,70	67,50	72,30	78,10	Disnaker
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	20	25	30	35	DinsosP3A



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	65	74	79	84	89	DinsosP3A
	TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI						
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Optimalisasi dan Digitalisasi pengembangan ekonomi kreatif						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15 – 41,38	46,43 – 47,60	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,97	9,37	9,08	8,86	7,8	DKUKM
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata						
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2.88	4.89	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,2	3,45	3,65	3,85	4,19	Dispora
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	536.6	1,341.50	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	140.000	210.000	240.000	265.000	290.000	Dispora
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1.84	2.06	Persentase Produk Ekonomi Kreatif Terdaftar (%)	12,5	22,97	32,14	34,04	48,08	Dispora
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
a.	i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	12.31	20.28	Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang pada level Kota (%)	3,6	10,8	14,4	14,4	18	DKUKMP



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
	ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6.3	14	Proporsi Jumlah Industri yang berkembang pada level Kota (%)	5,18	7,42	9,67	11,91	14,16	DKUKMP
b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3.5	9.86	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,48	6,4	8,1	10,2	12,22	DKUKMP
c.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.8	12.5	Proporsi Koperasi Berkualitas (%)	24,14	25,29	26,44	28,74	29,89	DKUKMP
d.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1.62	5.56							
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3 – 7,0	6,1 – 7,1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,24	5,31	5,17	5,02	3,85	Disnaker
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52.3	62.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,42	57,79	62,89	67,81	72,55	Disnaker
17	Indeks Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah (poin)	50	60	65	70	75	Bappelitbangda
18	Indeks Pembangunan Statistik	2.61	3.37	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	3,35	3,36	3,37	3,38	Diskominfo
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau						
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
a.	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61.3	85.05	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	44,8	49,83	56,11	62,22	62,26	DKPPP
IE6	Transformasi Digital			Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing						
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6.4	8	Nilai Keamanan Informasi (KAMI)	390	465	500	550	600	Diskominfo
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Peningkatan iklim ramah investasi						
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7.88	5	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi*	139,5	139,7	140	140,5	141	DKUKMP
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23.6	23.8	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,28	31,24	31,25	31,26	31,91	Bappelitbangda
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26.3	44.8	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	3,65	3,75	3,9	4,15	4,4	DKUKMP
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Peningkatan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru						
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24.63%	31.19%	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Banjar terhadap Provinsi Jawa Barat (%)						



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56.95	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,17	87.92	92.06	94.96	100	DLH
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	N/A	N/A	Indeks Desa (%)	31,25	33.2	34.2	35.5	37,50	DPMD
	TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA						
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif			Peningkatan pemerintahan yang berintegratas dan berbasis teknologi						
24	Indeks Reformasi Hukum*	90.7	100	Indeks Reformasi Birokrasi	65	85	85	85	85	Bag. Organisasi SETDA
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.37	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00	Diskominfo
26	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	91.06	95	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	91,06	93,76	94,00	95,00	95,00	Diskominfo
26	Indeks Pelayanan Publik	4.62	5	Indeks Pelayanan Publik -IPP (Poin)	4,05	4,30	4,35	4,40	4,51	Bag. Organisasi SETDA
27	Indeks Integritas Nasional	72.96	87.89	Skor/Nilai Pencegahan Korupsi Terintegrasi/MCP KPK (Poin)	88	94	96	97	98	Inspektorat
	KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH						



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial <i>(nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>			Peningkatan pengawasan, keadilan hukum, berdemokrasi dan wawasan kebangsaan						
28	Indeks Pembangunan Hukum*			Indeks Reformasi Hukum	65	85	85	85	85	Bag. Hukum SETDA
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51.78	69.16	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKK)	85	90	93	96	98	Satpol PP
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Presentase Penanganan Konflik Sosial	83	88	98	100	100	Kesbangpol
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro <i>(nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)</i>			Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2.2	4.6	Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	57,89	12,5	12,5	12,5	12,5	BPKPD
32	Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,9	1,1 – 3,2	Indeks Perkembangan Harga (IPH)	2,5±1%	2,5±1%	2,5±1%	2,5±1%	2,5±1%	Bag. PSDAP SETDA
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	25.31	78.1	Persentase Pengelolaan Aset Daerah (%)						
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1.24	2.78							



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	55,162.04	302,703.47		97,83	98,38	98,93	99,48	100	BPKPD
d.	Total Kredit/PDRB (%)	23.7	73.8							
e.	Total kredit/PDB (%)									
34	Inklusi Keuangan (%)	94.22	99.03	Persentase Peningkatan PAD (%)	11,52	12,5	12,5	12,5	12,5	BPKPD
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan (<i>nomenklatur dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan tetap serumpun dengan IE</i>)			Peningkatan kerjasama dan daya saing daerah						
35	Jumlah Kerjasama Internasional	N/A	N/A	Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah (%)	20	20	20	20	20	Bag. Tapem SETDA
36	<i>Jumlah Sister Province</i>	N/A	N/A	Persentase Evaluasi Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	Bag. Tapem SETDA
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI						
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama						
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41	Persentase Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	Disdik



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	Persentase Kerukunan Umat Beragama	75	100	100	100	100	Kesbangpol
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda dan kesetaraan gender						
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 – 70,95	75,81 – 76,05	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,7	69,2	76,2	84,2	91,7	DPPKB
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 – 0,45	0,23 – 0,21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,281	0,256	0,231	0,206	0,181	DInsosP3A
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup						
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.557	0.741	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,40	0,41	0,43	0,46	0,50	DLH
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup						
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	56.27	57.68	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (poin)	61,37	62,63	63,89	65,15	66,41	DLH
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13.5	85	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	8,34	34,75	53,37	67,88	79,84	DLH
c.	Pengelolaan Sampah	11.54	90	Pengelolaan Sampah						



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	-2022		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,49	37,01	54,54	72,06	89,58	DLH
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47.77	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	91,46	100	100	100	100	DLH
		-2022		- Sampah Terkumpul (ton/hari)	69,80	71,22	73,29	76,95	80,79	DLH
				- Daur Ulang Sampah (Recycling) (%)	20,07	21,01	22,19	24,08	26,11	DLH
				- Residu Sampah di Lahan Urug Residu (%)	68,95	68,12	66,38	64,98	62,95	DLH
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan daerah, energi dan sumber daya air						
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan						
a.	Ketahanan Energi			a. Indeks Ketahanan Pangan	79,75	80,25	80,75	81,25	81,75	DKPPP
b.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6.75	1.39	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	3,8	2,85	1,55	0,64	0,26	DKPPP
c.	Ketahanan Air			c. Ketahanan Air						



No	Provinsi Jawa Barat			Kota Banjar						PD Pengampu (Koordinator)
	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	Target RPJPD 2025-2045					
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045	
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4.93	63.12	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1,86	2,29	2,43	2,73	3,03	DPUTR
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34.74	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	26,59	44,94	63,29	81,65	100	DPUTR
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	131.62	107,27 - 86,47	Indeks Risiko Bencana (IRB)	126,81	110,95	104,87	99,34	84,77	BPBD
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
a.	a. Kumulatif	2.66	31.65	a. Kumulatif	47.132,76	88.717,31	160.992,14	262.875,58	401.494,71	DLH

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Banjar, 2024

Ket : Kolom warna kuning merupakan IUP wajib dengan target floating Provinsi

Dari tabel indikator utama pembangunan diatas dapat dilihat hasil penyelarasan indikator utama pembangunan Kota Banjar dan Indikator utama pembangunan Provinsi Jawa Barat. Dalam tabel tersebut terdapat beberapa target dan indikator yang merupakan floating target dari Provinsi Jawa Barat dengan warna kuning yang di berikan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk target Kota Banjar.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang di Kota Banjar dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dalam mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi di Pemerintah Kota Banjar, baik dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Pemerintah Pusat, maka koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional perlu dilakukan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya menjawab tantangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan perlu melaksanakan kaidah-kaidah pelaksanaan Pembangunan diantaranya, bahwa :

1. Pemerintah Daerah Kota Banjar (Perangkat Daerah) bersama instansi provinsi/vertikal, Lembaga, stakeholder serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di wilayah Kota Banjar, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dengan sebaik- baiknya.
2. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 dengan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam pelaksanaan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.



4. Untuk merealisasikan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama dalam pelaksanaannya yaitu:
 - Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu program terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*time*).
 - Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan Siklus PDCA dengan tahapan: Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah maupun sinergitas dengan perangkat daerah Provinsi serta dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.
 - Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
 - Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*); dan
 - Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
 - Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).
 - Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memerankan:
5. Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu



- serta output; dan
6. Desk akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (*counseling partner*) dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran atau prinsip 3 E dan 1 K (efesien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan).
 7. Evaluasi terhadap RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kota Banjar.

6.2 Pembiayaan

Dukungan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan RPJPD Kota Banjar ini diharapkan dapat dilakukan dengan optimal dan sehingga tujuan Pembangunan dapat dicapai. Oleh karena itu, potensi sumber pembiayaan pembangunan untuk mendukung konsistensi perencanaan pendanaan pembangunan yaitu menggunakan anggaran, antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Banjar melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi serta adanya insentif PAD. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain (CSR, Hibah, Penyertaan, Pinjaman dll sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan).

Dalam upaya transformasi pembangunan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan sehingga sasaran pembangunan daerah dapat terwujud. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah berbanding dengan kebutuhan pembiayaan maka diperlukan peningkatan kapasitas dan perluasan sumber pembiayaan antara lain melalui pengembangan inovasi skema pembiayaan, sehingga optimalisasi peran sektor keuangan disektor publik antara lain :

- a. Pengembangan inovasi skema pembiayaan disektor publik mencakup penguatan perencanaan pembiayaan;



- b. Perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
- c. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Sedangkan, optimalisasi peran sektor keuangan disektor nonpublik antara lain :

- a. peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan
- b. antara lain melalui optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana social korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan;
- c. Pengembangan inovasi skema-skema pembiayaan syariah untuk sektor publik;
- d. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan seperti *blue financing*, *green financing*, dan *circular financing*;
- e. dan penguatan penerapan bauran pendanaan (*blended finance*) yang dapat mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan.

Selanjutnya, upaya peningkatan kapasitas pembiayaan publik dan non publik tersebut dapat digunakan secara optimal apabila diikuti dengan manajemen investasi yang ramah dan berkualitas dan merupakan bagian dalam upaya pencapaian dan perwujudan sasaran pembangunan di Kota Banjar.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan menjadi hal penting guna penyelarasan kegiatan yang menilai pencapaian sasaran



pembangunan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari analisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan terhadap hasil rencana pembangunan, yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Banjar Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, dalam hal ini komunikasi publik berperan sangat penting dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kota Banjar Tahun 2045: *“Kota Banjar yang Madani, Maju dan Berkelanjutan”*

6.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kota Banjar ada beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta



memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.

Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kota Banjar dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Banjar, Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BANJAR

Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si.,



BAPPELITBANGDA
Kota Banjar



www.bappelitbangda.banjarkota.go.id



0265-745270



bappeda@banjarkota.go.id



Jl. Batulawang No.26 Kota Banjar